

**KETERLIBATAN UGANDA DALAM KONFLIK INTERNAL
DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)
(1998-2003)**

TESIS

DEWI TRI OCTAVIA HANDAYANI

0706187905



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

JAKARTA

2009

**KETERLIBATAN UGANDA DALAM KONFLIK INTERNAL
DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)
(1998-2003)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Hubungan Internasional**

DEWI TRI OCTAVIA HANDAYANI

0706187905

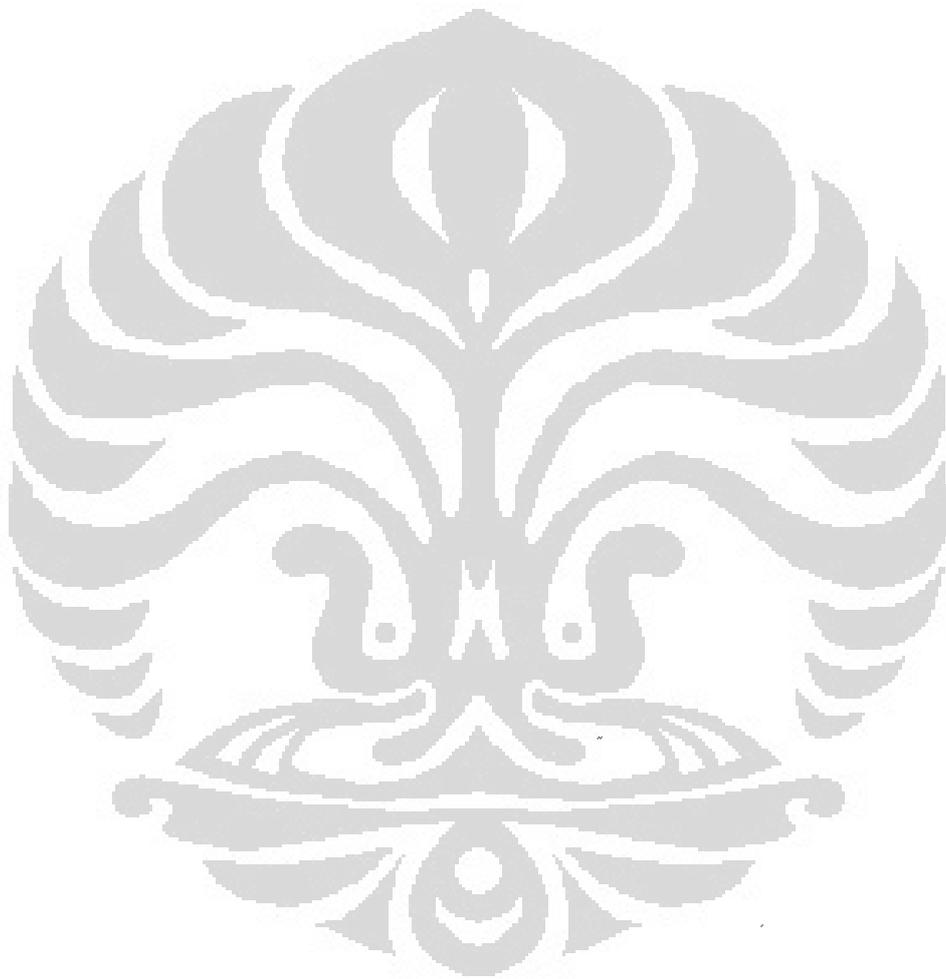


**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEKHUSUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

JAKARTA

2009





*Tesis ini saya persembahkan untuk
Yang terhormat kedua orangtua saya,
Bapak, Mama terima kasih atas
segala yang diberikan hingga Henry bisa seperti sekarang.*

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dewi Tri Octavia Handayani

NPM : 0706 187 905

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

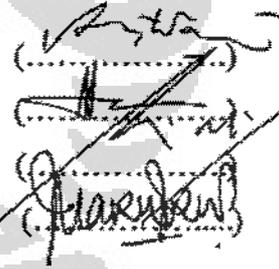
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dewi Tri Octavia Handayani
NPM : 0706 187 905
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : KETERLIBATAN UGANDA DALAM
KONFLIK INTERNAL DI REPUBLIK
DEMOKRATIK KONGO (RDK) (1998-2003)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Artanti Wardhani, M.Phil
Penguji Ahli : Dra. Nurani Chandrawati, M.Si
Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat
Sekertaris Sidang : Christian Harijanto, MA



(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Salemba
Tanggal : 19 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada :

- (1) Mbak Artanti Wardhani, M.Phil, selaku dosen pembimbing saya yang dengan kesabarannya telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Ibu Dra. Nurani Chandrawati, M.Si selaku penguji ahli yang telah bersedia dan menyisihkan waktunya untuk menguji tesis saya agar menjadi lebih baik. Terima kasih juga saya ucapkan atas saran yang diberikan;
- (3) Bapak Dr. Makmur Keliat, selaku Ketua Sidang dan Mas Christian Harijanto, MA selaku Sekertaris Sidang, terima kasih saya ucapkan atas segala bantuannya dari awal hingga akhir proses penyusunan tesis ini, terima kasih atas saran yang diberikan juga waktunya yang disediakan untuk menguji tesis saya agar menjadi lebih baik;
- (4) Seluruh Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan dan atas ilmu yang telah diberikan selama ini;
- (5) Kedua Orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang, doa dan segala yang terbaik untuk saya hingga saat ini;
- (6) Pasangan hidup saya, Mas Sugianto yang telah memberikan kasih sayang, doa dan semangatnya. Terima kasih atas segala pelajaran hidup yang telah diberikan kepada saya dan telah dengan sabar mendampingi saya;
- (7) Rio, sahabat sejati saya, terima kasih telah menjaga kedua orangtua saya selama saya menuntut ilmu di Jakarta;

- (8) Theresia Ratri Tetuko Avianti, sahabat yang selalu setia saat saya marah, senang dan sedih. Miss you and Yogya;
- (9) Seluruh staf tata usaha Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang telah banyak membantu saya dalam segala hal;
- (10) Seluruh teman-teman Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia dari segala angkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuannya. Dewi Bee, mas Din, Yugo, mba Farida Dasta, Elsi, Devi dan semua teman-teman angkatan 14 terima kasih atas segala bantuannya;
- (11) Seluruh teman-teman di PT. Antheus Indonesia. Kak Devi terima kasih atas nasehat dan semangatnya, Silvy yang selalu mengingatkan saya untuk puasa senin kamis, Azwar yang selalu sabar kalau saya marahi; Pak Santo, Pak Temmy, Bu. Ratih, Bu. Milda, terima kasih atas ijin yang selalu diberikan setiap saya ijin untuk menyelesaikan tesis ini; Pak. Nasrudin atas surat rekomendasinya; Ratna Suwandi, thanks for every thing.
- (12) Buat akang di foto kopi "Sunda", thanks ya kang kortingannya;
- (13) Buat Cici, Ari, Ratna, Noni, Agnes terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Robbi adkhlilnii mukhola shidqiw wa akhrijnii mukhroja shidqiw waj'al lii mil ladunka sulthoonan nashiiroo.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Juni 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Tri Octavia Handayani
NPM : 0706 187 905
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KETERLIBATAN UGANDA DALAM KONFLIK INTERNAL DI
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK) (1998-2003)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba

Pada Tanggal : 19 Juni 2009

Yang menyatakan

(Dewi Tri Octavia Handayani)

ABSTRAKSI

Nama : Dewi Tri Octavia Handayani
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : KETERLIBATAN UGANDA DALAM
KONFLIK INTERNAL DI REPUBLIK
DEMOKRATIK KONGO (RDK) (1998-2003)

Tesis ini membahas bagaimana kebijakan luar negeri Uganda untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yang berusaha menjaga keamanan dan ketubuhan wilayahnya dari berbagai ancaman hingga merambah ke arah sektor ekonomi dengan mengambil sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk membantu memperbaiki perekonomian Uganda. Keterlibatan Uganda berawal dari kebijakan luar negeri Uganda untuk membantu Laurent Kabila menumbangkan Mobutu Sese Seko yang dinilai bersikap diskriminasi terhadap salah satu etnis hingga mengakibatkan muncul kelompok pemberontak. Uganda memutuskan untuk membantu Laurent Kabila karena ingin menjaga ketubuhan wilayahnya dari ancaman perbatasan yang rawan. Perbatasan yang rawan itu sendiri adalah hasil dari banyaknya pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) ke wilayah perbatasan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Masuknya Uganda ke dalam konflik internal di Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan wujud dari kekecewaan Uganda terhadap gagalnya jaminan yang diberikan Laurent Kabila untuk sebuah keamanan wilayah perbatasan, akibatnya banyaknya pelanggaran HAM dan tindakan politik yang buruk. Hasil penelitian ini menyarankan untuk pentingnya kejelasan batas wilayah dan menjaga kedaulatan wilayah juga stabilitas keamanan negara demi dan untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara tersebut.

Kata kunci :

Konflik etnis Kongo → *National Interest Uganda* → *Decision Making Theory*
→ Kebijakan Luar Negeri Uganda .

ABSTRACTION

Name : Dewi Tri Octavia Handayani

Studies : Magister of International Relations

Title : UGANDA INVOLVEMENT IN
THE INTERNAL CONFLICT IN
THE REPUBLIC OF DEMOCRATIC CONGO (RDC)
(1998-2003)

This thesis will discuss about how Uganda foreign policy to realize national interest of Uganda for saving Uganda national security and sovereignty of Uganda territory from all kinds of threats. In the fact, Uganda have hidden agenda for national interest of Uganda, and to realize their hidden agenda, Uganda taking of natural resources of the Republic Democratic of Congo (RDC) to help improve the Uganda economy. Uganda was involvement in the internal conflict of Republic Democratic of Congo (RDC) with Uganda foreign policy to help Laurent Kabila. Laurent Kabila wants to topple Mobutu Sese Seko because Mobutu Sese Seko was discrimination toward appear ethnic groups to cause the rebels. Uganda decided to help Laurent Kabila because Uganda want to maintain the integrity of the border Uganda territory from the threat-prone. Prone border itself is the result of the refugees number in the border between Republic Democratic of Congo (RDC) with Uganda. Uganda involvement in the internal conflict in the Republic Democratic of the Congo (RDC) is caused Uganda disappointed toward of Laurent Kabila failure for a security border their territory, consequently is the number of human rights violations and political action that can be bad. The Results of this research suggest the importance of clear boundaries and maintain the sovereignty of the country for save stability and security for the viability of the entire community.

Keywords:

Congo's ethnic conflict --> National Interest of Uganda --> Decision Making Theory --> Foreign Policy Uganda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PUBLIKASI	v
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Hipotesis	21
H. Asumsi Dasar	21
I. Metode Penelitian	22
J. Jangkauan Penelitian	22
K. Sistematika Penelitian	23

BAB II. KETERLIBATAN UGANDA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)

A. Hubungan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo

(RDK)	25
A.1. Konflik Internal Uganda	30
A.1.1 Republik Uganda dimasa kolonial	30
A.1.2 Pemerintahan Idi Amin	32
A.1.3 Pemerintahan Apollo Milton Obote	34
A.2.3 Pemerintahan Tito Lutwa Okello	35
A.2.4 Pemerintahan Yoweri Museveni	36
A.2. Konflik Internal Republik Demokratik Kongo	39
A.2.1 Pemerintahan Republik Demokratik Kongo masa kolonial	40
A.2.2 Pemerintahan Mobutu Sese Seko	42
A.2.3 Pemerintahan Laurent kabila	43
A.2.3 Masa Pemerintahan Joseph Kabila	44
A.3 Keberadaan Rwanda dalam Konflik Bersenjata antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo	49
A.4 Masuknya Uganda ke dalam Konflik Internal di Republik Demokratik Kongo	50

BAB III. NATIONAL INTEREST UGANDA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)	
A. National Interest Uganda	55
A.1 Arti Penting Sumber Daya Alam Bagi Republik Demokratik Kongo dan Uganda	59
 BAB IV. ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK UGANDA DALAM KONFLIK BERSENJATA DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)	
A. Peningkatan Ketegangan Antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo	69
B. Keberadaan Militer dalam Sebuah Kebijakan Politik	73
C. Menjaga Kestabilan Perdamaian Bangsa dan Negara	75
D. Keberadaan Kaum Perempuan dan Penduduk Sipil	81
E. Pencapaian Perdamaian antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo	87
E.1 Perkembangan Perdamaian antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo Tahun 2005	90
E.2 Perkembangan Perdamaian antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo Tahun 2008-2009.....	96
 BAB V. KESIMPULAN.....	99
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

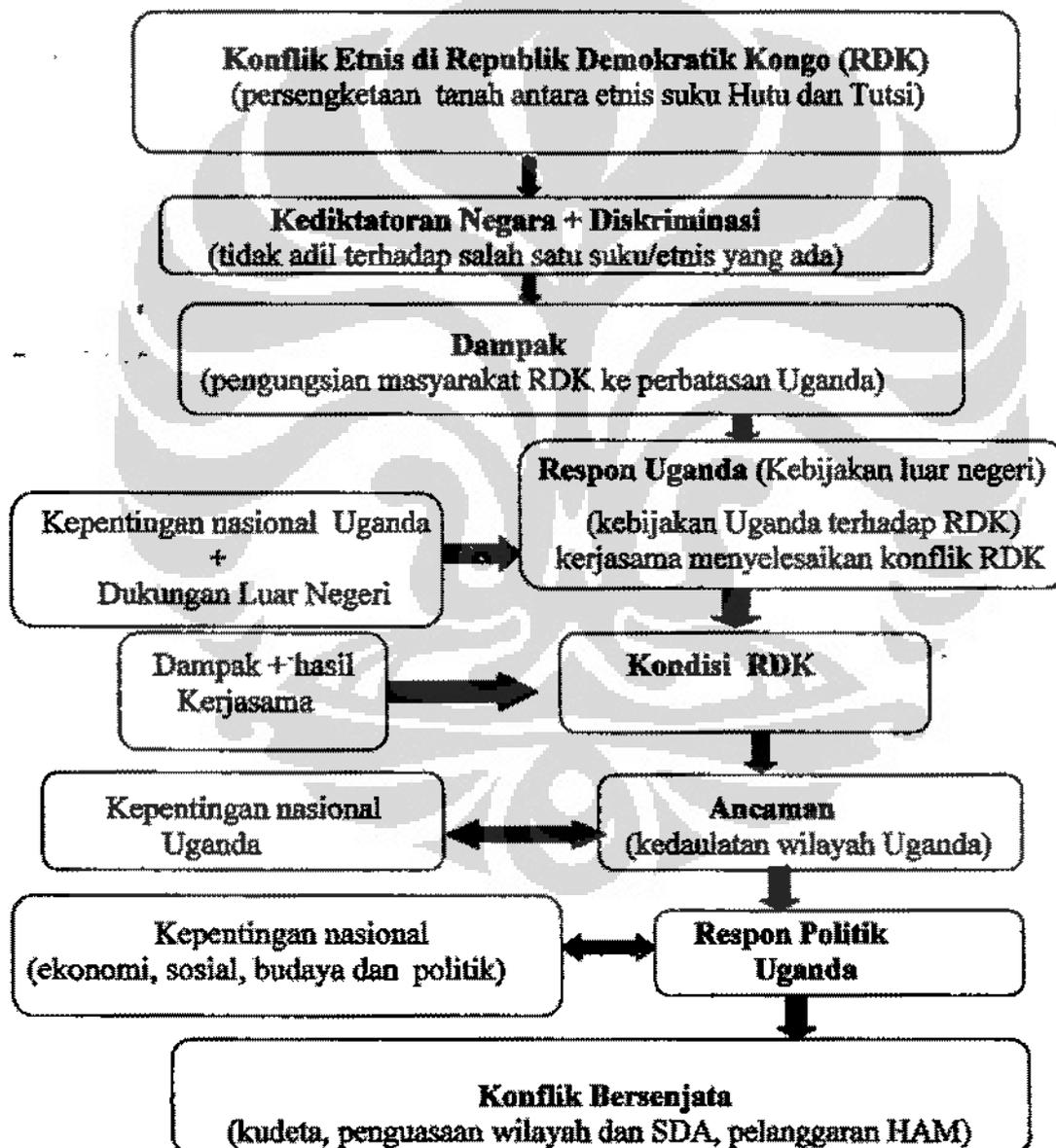
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Uganda yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) membuat negara ini tidak dapat terhindar dari dampak yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Pemerintahan Uganda selalu diwarnai dengan perebutan kekuasaan atau kudeta. Pada awal mulanya hubungan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) sangat harmonis, hal ini ditandai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) kepada Uganda dan begitu juga sebaliknya, pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) melalui Presiden yang saat itu adalah Mobutu Sese Seko memberikan bantuan kepada Uganda berupa pengiriman pasukan Republik Demokratik Kongo (RDK). Namun hubungan ini memburuk dengan terlibatnya Uganda dalam konflik Internal di Republik Demokratik Kongo (RDK). Kondisi dalam negeri di Uganda dan Kongo sendiri memicu hubungan keduanya kedalam sebuah konflik. Uganda yang pada saat itu mengalami masalah dengan munculnya *Lord's Resistance Army (LRA)*¹ di Uganda dan di Republik Demokratik Kongo (RDK) memiliki permasalahan internal negaranya seperti kudeta dan konflik antar etnis. Konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) berawal dari persengketaan tanah antara etnis suku Hutu dan Tutsi dan memberi dampak buruk bagi negara yang berbatasan langsung seperti Uganda. Ketidakjelasan dalam perbatasan di negara Burundi, Rwanda, dan Republik Demokratik Kongo (RDK) mengakibatkan banyak ditemukan suku Hutu dan Tutsi di masing-masing negara tersebut. Masalah menjadi tajam saat etnis Hutu di Rwanda bergabung dengan etnis Hutu yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) membantai

¹ *Lord's Resistance Army (LRA)* yang dibentuk pada tahun 1987 adalah sebuah kelompok pemberontak paramiliter yang beroperasi terutama di daerah utara Uganda. Kelompok yang dipimpin oleh Joseph Kony ini melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Uganda untuk mendirikan negara sendiri yang berdasarkan interpretasi sinkretisme antara kepercayaan Acholi dan agama Kristen millenarianisme (kepercayaan akan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya). LRA dituduh melakukan pelanggaran terhadap HAM seperti mutilasi, penyiksaan, pemerkosaan, penyerangan terhadap warga sipil, penggunaan tentara anak-anak, dan beberapa kasus pembantaian.

banyak orang dari etnis Tutsi.² Pelanggaran HAM berat juga banyak terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK), seperti pembantaian dan pengusiran yang dilakukan kaum militan suku etnis di dukung pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK). Gelombang pengungsian yang merupakan dampak dari pengusiran tersebut memberi dampak buruk bagi negara yang berbatasan langsung. Perbatasan menjadi rawan akan konflik, seperti ketidakstabilan aktivitas sosial, kedaulatan wilayah, dan lain sebagainya. Jika digambarkan konflik bersenjata antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Uganda adalah sebagai berikut :



² Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, *Laporan Tahunan 1996-1997*, buku I. Hal : 26.

Dari bagan diatas, dapat terlihat bahwa keterlibatan Uganda dalam konflik internal di Republik Demokratik Kongo (RDK) diawali dengan adanya konflik etnis yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) yaitu persengketaan tanah antara suku Hutu dan Tutsi yang disikapi dengan tidak adil oleh Mobutu Sese Seko sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK). Sikap Mobutu tersebut memberi dampak langsung terhadap Uganda yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Banyak penduduk Republik Demokratik Kongo (RDK) yang lari mengungsi ke Uganda untuk menghindari konflik di negaranya yaitu Republik Demokratik Kongo (RDK). Dampak dari konflik internal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) membuat Uganda yang berbatasan langsung merespon dengan membuat suatu kebijakan luar negeri Uganda yang didalamnya terdapat kepentingan nasional Uganda.

Uganda yang juga memiliki masalah internal negaranya menilai banyaknya pengungsi yang berdatangan di wilayah perbatasan sebagai ancaman bagi Uganda yang lambat laun dengan adanya interaksi sosial yang dilakukan antara pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan penduduk asli Uganda maupun interaksi yang dilakukan pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) itu sendiri sehingga memungkinkan munculnya suatu gerakan pemberontak akan memperparah keadaan Uganda juga dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketuhan wilayah Uganda. Karena hal itulah maka Uganda yang didalam pemerintahannya juga mengalami masalah internal membuat suatu kebijakan luar negeri terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketuhan wilayahnya dengan cara mencoba masuk ke Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan membantu Republik Demokratik Kongo (RDK) menyelesaikan konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK), yang pada saat itu Uganda mendapat tawaran kerjasama dari Laurent Kabila untuk menumbangkan pemerintahan Mobutu Sese Seko dengan jaminan jika Uganda membantu Laurent Kabila menumbangkan pemerintahan Mobutu, Laurent Kabila harus mampu memberikan jaminan keamanan wilayah perbatasan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Laurent Kabila harus mampu menyelesaikan konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) tersebut.

Namun setelah Mobutu diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) dan digantikan oleh Laurent Kabila sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK), konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak juga terselesaikan. Konflik tetap terjadi dan ditambah korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan Laurent Kabila menambah buruk kondisi Republik Demokratik Kongo (RDK). Kegagalan Laurent Kabila memberikan jaminan terselesaikannya konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) dan keamanan wilayah perbatasan Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) membuat Uganda mengambil tindakan tegas dengan masuk kembali ke konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) tersebut dengan membantu Bemba yang juga pada akhirnya menjadi lawan politik Yoseph Kabila dalam pemilu Republik Demokratik Kongo (RDK).

Konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) telah banyak menghasilkan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Dampak dari konflik tersebut tidak hanya pada sektor politik tetapi juga ekonomi, sosial dan budaya. Dampak dalam sektor ekonomi adalah banyak penduduk Republik Demokratik Kongo (RDK) yang menderita busung lapar dan kemiskinan karena Uganda juga menjarah sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK). Dampak dalam sektor budaya adalah hilangnya suatu kesolidan antar suku atau etnis di dalam suatu negara, seharusnya suku-suku yang ada di Uganda maupun Republik Demokratik Kongo (RDK) dapat saling bersatu dan kerjasama membangun negara mereka. Dimana keanekaragaman etnis atau suku adalah salah satu kekayaan dan identitas suatu bangsa/negara. Dampak pada sektor sosial adalah banyaknya anak-anak dan kaum perempuan yang menjadi korban dari tindakan pelanggaran HAM seperti penculikan anak-anak dibawah umur untuk dijadikan tentara perang dan pemerkosaan yang dilakukan militer Uganda terhadap rakyat sipil Republik Demokratik Kongo (RDK).

Hubungan antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) bearawal dengan baik. Hal ini ditandai dengan terciptanya kerjasama antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan Uganda. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Uganda, Republik Demokratik Kongo (RDK) yang pada saat itu dibawah kepemimpinan Presiden Mobutu Sese Seko memberikan

bantuan kepada Uganda berupa pengiriman pasukan Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk mendukung militer Okello.³ namun keadaan ini ternyata tidak berlangsung lama. Keterlibatan yang berawal dari terjalinnya hubungan baik antara Presiden Uganda Yoweri Kaguta Museveni dengan pemimpin pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK), Laurent Kabila membuat hubungan antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) menjadi buruk.⁴ Awal dari buruknya hubungan antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah terlibatnya Uganda dalam kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK) dibawah kepemimpinan Mobutu Sese Seko oleh Laurent Kabila. Ketidakstabilan pemerintah Mobutu Sese Seko itu sendiri berawal dari tindak diskriminatif yang dilakukan Mobutu terhadap salah satu etnis yang berada di Republik Demokratik Kongo (RDK) yaitu etnis Tutsi.⁵ Laurent Kabila sebagai pemimpin pemberontakan ingin menggulingkan kediktatoran Presiden Mobutu Sese Seko, Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) bekerjasama dalam mencapai keinginannya masing-masing. Melalui kudeta tersebut akhirnya Laurent Kabila berhasil menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK). Pergantian Presiden di Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak membawa Republik Demokratik Kongo (RDK) kedalam situasi aman dan stabil. Pemerintahan Kabila juga tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul, hal ini terbukti dengan banyaknya gerakan kelompok-kelompok yang mencoba menumbangkan kekuasaannya.

Konflik internal negara Republik Demokratik Kongo (RDK) membawa Uganda merespon dampak dari konflik tersebut. Kegagalan Pemerintahan Laurent Kabila yang dalam prosesnya menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) dibantu oleh Uganda⁶, dilihat dari gagalnya Republik Demokratik Kongo (RDK) dalam memberikan jaminan keamanan disepanjang wilayah perbatasan

³Tito Okello adalah bekas komandan Angkatan Darat Obote yang telah berhasil menggulingkan kekuasaannya tanggal 27 Juli 1985. Dr. A.M Obote diangkat menjadi Presiden Uganda setelah Kabaka Mutesa II wafat. Obote mengubah Uganda dari Federal menjadi Republik.

⁴Pemberontakan pimpinan Laurent Kabila disebut ADFL (*Alliantie Democratie Front Liberal*).

⁵ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, *loc. cit*.

⁶ Uganda membantu Kabila menumbangkan Mobutu Sese Seko karena Uganda melihat kegagalan Mobutu dalam menyelesaikan konflik internal RDK. Sebagai negara yang berbatasan langsung, untuk mengantisipasi dampak dari konflik tersebut Uganda membantu Laurent Kabila menumbangkan Mobutu.

dan memberikan ruang pada ADF (*Allied Democratic Forces*)⁷ untuk menyerang Uganda dan garis belakang di Republik Demokratik Kongo (RDK).

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diangkat adalah “*Bagaimana keterlibatan Uganda dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo (RDK) dilihat dari faktor internal Uganda ?*”

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Melihat faktor internal yang mendorong keterlibatan Uganda dalam pelanggaran HAM di Republik Demokratik Kongo (RDK).
2. Melihat Kepentingan nasional dan Kebijakan luar negeri Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK).

D. MANFAAT PENELITIAN

Negara-negara didunia selalu bersaing untuk memperlihatkan kredibilitasnya sebagai sebuah negara yang patut untuk diakui. Begitu pula dengan Uganda, dengan menjaga kestabilan sosial, ekonomi, dan politik akan membawa negara tersebut kedalam pengakuan sebagai negara yang berdaulat di hadapan negara-negara lain. Semua hal itu terdapat dalam sebuah kepentingan nasional, dimana Uganda ingin negaranya menjadi negara yang dapat mandiri dan diakui keberadaannya sebagai sebuah negara oleh negara lainnya. Untuk itu

⁷ ADF (*Allied Democratic Forces*) adalah suatu kelompok (pemberontak) teroris yang terdapat di Uganda, yang melawan atau beroposisi dengan pemerintah Uganda dan beroperasi di sebelah barat Uganda yang berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo, pada awalnya (tahun 1996), ADF merupakan suatu kelompok minoritas yang berada di pegunungan Ruwenzori yang membentang sepanjang perbatasan, tetapi dalam beberapa tahun kemudian ADF mampu memperluas aktivitas-aktivitasnya. ADF dibentuk oleh para muslim puritan Uganda yang berasal dari sekte Tabliq, yang kemudian menggabungkan diri dengan sisa-sisa anggota kelompok pemberontak yang lain, yaitu *the National Army for Liberation of Uganda*, tokoh utamanya adalah Jamil Mukulu, dahulu beragama Khatolik, sedangkan sebagian besar anggota ADF berasal dari daerah-daerah sentral di Uganda, seperti Inganga, Masaka, dan Kampala, dan mereka menggambarkan diri mereka sebagai *religious crusader*. Mulai tahun 2004, ADF telah sebagian besar dihancurkan oleh UPDF (*the Uganda People's Defence Force*), tetapi pada Desember 2004 sisa-sisa anggota ADF terlihat tinggal di daerah timur Kongo, dan pada Desember 2005, PBB dan pasukan Kongo pun meluncurkan *the Operator North Night Final*, dalam rangka untuk menghancurkan kelompok pemberontak dan membawa kedamaian kepada daerah yang bermasalah, yaitu Ituri.

penelitian ini memiliki manfaat penelitian untuk memperlihatkan mengenai faktor internal didalam kepentingan nasional sebuah kebijakan luar negeri Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK). Penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana sebuah negara (khususnya Uganda) merumuskan kepentingan nasionalnya didalam kebijakan luar negeri. Dari penelitian ini dapat diperoleh juga mengenai pentingnya sebuah garis batas wilayah yang jelas dalam menjaga kedaulatan negara.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Stephen M. Walt semenjak berakhirnya perang dingin terjadi berbagai perubahan didalam teori hubungan internasional, yang disertai pula dengan munculnya beragam isu-isu baru seperti, konflik etnik, lingkungan dan masa depan *nation-state*.⁸ Semua negara-negara didunia selalu menjadikan keamanan menjadi hal penting dalam menjaga kedaulatan negaranya. Konsep kedaulatan negara itu sendiri membawa negara memiliki hak untuk menentukan sendiri bagaimana negara tersebut akan menentukan kebijakan internal dan eksternalnya. Uganda sebagai negara yang wilayahnya berbatasan langsung wajib untuk menjaga kestabilan dan keamanan wilayahnya.

Dalam berbagai literatur studi keamanan, masalah pendefinisian konsep "keamanan" sendiri menjadi salah satu topik perdebatan yang hangat, setidaknya sampai berakhirnya Perang Dingin. Walter Lippmann melihat konsep keamanan dengan pernyataannya yang terkenal, "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang".⁹

Pada permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, peneliti akan berangkat dengan teori neo realis. Neo realisme merupakan sebuah bentuk baru dari teori realisme. Realisme sendiri merupakan bentuk kritik dari paham

⁸ Lihat Stephen M. Walt, "International Relations: One World, Many Theories" Foreign Policy, No. 110, Spring 1998.

⁹ Di kutip dari *Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003, Oleh: Dr. Kusnanto Anggoro, *KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

idealisme yang dianggap oleh kaum realis terlalu meremehkan “power” dan terlalu menjadikan perang sebagai cara yang paling ampuh dalam menyelesaikan suatu konflik. Kaum realis melihat setiap negara memiliki dalih untuk melindungi negaranya. Paham neo realisme tidak jauh berbeda dari realisme sebagai dasar terbentuknya paham tersebut dan yang menjadi pelopor utama dari paham ini adalah Kenneth Waltz.¹⁰ Asumsi dasar yang diambil Kenneth Waltz dari paham realisme adalah negara merdeka hidup dan bergerak dalam sistem anarki internasional. Perbedaan mendasar antara realisme klasik dan neo realism itu sendiri adalah realisme lebih mendasarkan pada pusat perhatiannya terhadap para aktor utama politik internasional sedangkan neo realisme lebih mendasarkan perhatiannya pada struktur. Bagi neo realis bahwa struktur-struktur itulah yang mendasari tindakan. Struktur sistem sangat mempengaruhi tingkah laku aktor, negara adalah aktor rasional yang akan memilih strategi untuk dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dan negara melihat seluruh negara lainnya sebagai musuh potensial yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasionalnya sehingga menyebabkan dilema keamanan yang nantinya dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara.¹¹

Konflik internal yang memecahkan hubungan antara Uganda dan Kongo berakar dari tindak diskriminasi pada salah satu etnis yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Barry Posner yang memberikan penjelasan tentang konflik etnis. Ia mencatat bahwa pecahnya negara-negara multietnis menempatkan kelompok etnis lawan dalam situasi yang anarkis. Sehingga menimbulkan ketakutan dan membuat masing-masing kelompok menggunakan kekuatan untuk meningkatkan posisi mereka.¹² Permasalahan ini akan semakin parah ketika di dalam wilayah masing-masing kelompok terdapat wilayah yang ditinggali oleh etnis lawan, hal ini dikarenakan masing-masing pihak akan tergoda melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan melakukan ekspansi untuk memasukan anggota kelompok mereka yang berada di luar batas wilayah.

Melihat apa yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK), sesuai dengan yang diungkapkan Walter Lippmann bahwa suatu bangsa berada dalam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Dikutip dari Stephen M. Walt, *loc.cit.*, 1998.

keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.¹³ Neo realis tidak menampik kudeta yang dilakukan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) dalam upaya menumbangkan Mobutu Sese seko merupakan langkah politik. Hal tersebut sesuai dengan asumsi dasar pengertian tentang apa itu politik. Morgenthau juga menilai bahwa politik adalah cara memperoleh kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya kekuasaan adalah tujuan terpentingnya dan cara-cara memperoleh, memelihara, dan menunjukkan kekuasaan untuk menentukan teknik dan tindakan politik.

Bagi neo realis cara yang terbaik adalah yang memfokuskan pada yang terbaik adalah yang memfokuskan pada struktur sistem, unit-unit yang berinteraksi, kesinambungan dan perubahan sistem., unit-unit yang berinteraksi, kesinambungan dan perubahan sistem. Asumsi dasar neo realis yang memperhatikan tentang keselamatan dan kelangsungan hidup dan poin lain yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dibagi menjadi beberapa konsep :

1. Konsep kedaulatan negara

Konsep ini menyatakan bahwa negara adalah berdaulat jadi negara tersebut menentukan sendiri bagaimana negara tersebut akan menentukan kebijakan internal dan eksternalnya. Negara akan selalu menjaga keamanan negaranya untuk keutuhan maupun kedaulatan negaranya dan menjaga kestabilan politik negara tersebut. Meningkatnya pengungsi dari negara Kongo di perbatasan Uganda membawa Uganda merespon dampak yang ada di wilayah perbatasannya sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan wilayahnya dan politik dalam negeri.

2. Kosep kepentingan nasional

Konsep ini mengacu pada pilihan dimana setiap negara menetapkan cara yang terbaik untuk mendapatkan kepentingannya. Konsep kepentingan nasional itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Waltz, bahwa masing-masing negara menetapkan cara yang dipikirmya terbaik

¹³ *Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, op.cit.*

menjalankan kepentingannya.¹⁴ Hal ini merupakan pemikiran moral yang harus dipertahankan dan dimajukan oleh pemimpin negara yang secara sederhana konsep kepentingan nasional dapat “diukur” dari potensi strategis yang dimiliki oleh sebuah negara. Keterkaitan antara kepentingan nasional dengan Politik luar negeri. K.J Holsti menilainya sebagai tindakan tertentu yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara terhadap satu atau lebih negara lainnya dalam menghadapi keadaan domestik serta situasi luar negerinya.¹⁵ Dalam menjaga kedaulatan negara dan hubungan dengan negara lain, tentu saja sebuah negara harus menjaga keamanan wilayahnya. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

3. Kebijakan Luar Negeri

Didalam implementasinya konsep kepentingan nasional akan dimasukkan dalam sebuah kebijakan luar negeri dan politik luar negeri. Dengan kata lain dalam kepentingan nasional yang dimiliki sebuah negara terdapat sebuah kepentingan luar negeri yang merupakan konsep kunci dalam suatu politik luar negeri sebuah negara. Menurut K.J. Holsti sendiri kebijakan luar negeri adalah “ide atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan perubahan pada kebijakan, sikap, atau tindakan dari negara atau negara-negara lain, pada aktor-aktor non-negara, pada ekonomi internasional, atau pada

¹⁴ Dikutip dari Robert J dan George S, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal: 115.

¹⁵ K.J Holsti, “Pengantar Politik Internasional”, *kerangka untuk analisis*, terjemahan M. Thahir Azhary, SH, Erlangga, Jakarta, 1998.

lingkungan fisik dunia".¹⁶ Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Chris Brown, bahwa kebijakan luar negeri adalah sebuah "cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar".¹⁷ Dari definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional negara tersebut yang dalam interaksinya dengan negara-negara lain tertuang dalam sebuah sistem internasional. Tindakan yang diambil sebuah negara tersebut berdasar pada suatu teori yang disebut *Decision Making Theory*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Richard C. Synder bahwa ada dua aspek penting dalam pengambilan keputusan suatu negara yaitu eksternal seting dan internal seting.¹⁸ Internal seting meliputi seluruh struktur sistem politik domestik suatu negara yang dapat dilihat dari struktur ekonomi negara tersebut sebagai akibat dari kebutuhan ekonomi masyarakat, tuntutan ideologi, psikologi, dan sosial budaya suatu negara.¹⁹ Sedangkan eksternal seting umumnya menyangkut kondisi wilayah teritorial suatu negara, dan berkaitan dengan perluasan wilayah suatu negara.

Perumusan kebijakan luar negeri dijelaskan dengan rinci oleh Holsti sebagai berikut:

1. Faktor-faktor domestik:

a) Karakteristik geografis dan topografis

Menurut Holsti, kebutuhan keamanan dan sosial-ekonomi sangat berkaitan dengan keberadaan sumber daya alam dan lokasi geografis suatu negara terhadap negara lain.²⁰ Karakteristik geografis menciptakan apa yang oleh

¹⁶ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, 7th Edition (New Jersey: Prentice-Hall, 1995). Hal:83 (terjemahan oleh peneliti).

¹⁷ Lihat Chris Brown & Kirsten Ainley, *Understanding International Relations*, 3rd edition London: Palgrave MacMillan, 2005. Hal : 63 (terjemahan oleh peneliti).

¹⁸ Richard C. Synder, "The Decision Making Approach to The Study of International Politics", dalam James N Rosenau, *International Politics and Foreign Policy, A Reader in Research and Theory*, The Free Press, New York, 1962. Hal: 203.

¹⁹ *Ibid*, hal : 204.

²⁰ Holsti, *loc. cit.*, hal: 256.

Barry Buzan disebut sebagai kelemahan (*vulnerabilities*) sehingga suatu negara kemudian mempersepsikan ancaman terhadap keamanannya berdasarkan kemungkinan negara-negara lain memanfaatkan kelemahan tersebut.²¹

b) Atribut nasional

Maksud dari atribut nasional adalah ciri-ciri utama dari suatu negara, yaitu ukuran wilayah, jumlah populasi, sistem dan kinerja ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Holsti mengutip sebuah penelitian yang menyatakan bahwa negara-negara besar cenderung menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya ketimbang negara-negara kecil.²²

c) Struktur dan filosofi pemerintahan

Faktor ini memberikan penjelasan terhadap batasan-batasan pilihan (apabila ada) dalam merumuskan kebijakan luar negeri.²³ Sebagai ilustrasi, sebuah pemerintahan yang otoriter nyaris tidak ada batasan karena semua keputusan berada di tangan satu orang atau kelompok saja. Di sisi lain, pemerintahan yang demokratis cenderung menghadapi batasan yang lebih banyak karena banyaknya kepentingan yang muncul dan sistem *checks and balances* yang menjaga agar tidak ada orang atau kelompok yang menguasai setiap aspek dari perumusan kebijakan.²⁴

d) Opini publik

Faktor opini publik lebih mudah diukur dalam sebuah sistem politik yang mendukung kebebasan pers, yaitu sistem yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari luar, terdapat kesadaran umum mengenai lingkungan eksternal, dan memiliki lembaga-lembaga politik formal yang didukung secara luas oleh publik.²⁵

²¹ *Ibid.*, hal : 85.

²² *Ibid.*, hal : 256-257.

²³ *Ibid.*, hal : 258.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal : 261.

e) Kelompok kepentingan dan partai politik

Negara-negara yang memberikan ruang bagi opini publik lazimnya memiliki kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan opini tersebut kepada penguasa atau pemerintah. Kelompok kepentingan juga merupakan sarana bagi aktor-aktor non-negara (*non-state actors*) untuk turut serta dalam perumusan kebijakan luar negeri.²⁶

f) Birokrasi

Birokrasi adalah lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi penggagas atau pelaksana dari suatu kebijakan luar negeri. Dikategorikan sebagai penggagas karena lembaga-lembaga tersebut juga memiliki kepentingan terhadap negara lain dan sebagai pelaksana karena lembaga-lembaga inilah yang biasanya mengimplementasikan sebuah kebijakan (contohnya adalah Departemen Luar Negeri atau Departemen Perdagangan dan Industri).²⁷

Dalam melihat konsep kepentingan nasional yang ada pada neo realis, faktor kepentingan ekonomi suatu negara akan membawa dan berkaitan erat dengan kondisi geografis strategis dan menguntungkan yang dimiliki oleh suatu negara. Kepentingan nasional mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Berangkat dari pengertian tentang kepentingan nasional tersebut, penting untuk sebuah negara menjaga kedaulatan negaranya. Perluasan wilayah kekuasaan itu sendiri juga merupakan sebagai tujuan untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki negara lawan. Melihat kepentingan tersebut secara geopolitik adalah dimana negara sebagai organisme yang dapat memperluas diri beserta paham yang menganggap sudah tidak diperlukannya lagi batas negara dengan segala aturan yang menghambat segala aspek kehidupan internasional, terutama bidang ekonomi yang berkaitan dengan pencapaian kehidupan yang makmur tanpa

²⁶ *Ibid.*, hal. 265.

²⁷ *Ibid.*, hal. 266.

membedakan asal negaranya.²⁸ Posisi geopolitis negara dalam sistem global dan hubungan dengan negara-negara lain yang memiliki relevansi juga harus menjadi pertimbangan dalam membuat suatu sudut pandang. Pada geopolitik, kekuatan-kekuatan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dasar nasional untuk kepentingan nasional. Pengertian geopolitik itu sendiri adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasar pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Berdasar pemikiran tersebut Uganda mengambil tindakan untuk menjaga kedaulatan wilayahnya serta menjaga potensi alam yang dimilikinya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan nasional terdiri dari berbagai variabel yang menjadi acuan bagi pelaksanaan politik luar negeri suatu negara.

Dalam melihat ancaman yang selalu berkembang, Buzan membuat lima kategori ancaman berdasarkan sektornya terhadap keamanan nasional, yaitu:²⁹

1. Ancaman militer : Munculnya kapabilitas militer dari suatu negara baik konvensional maupun non-konvensional, dalam strategi menyerang atau bertahan, persepsi ancaman militer dari negara terhadap negara lain. Secara tradisional ancaman militer merupakan prioritas tertinggi yang menjadi perhatian dari keamanan nasional, hal ini dikarenakan ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat memusnahkan apa yang telah di capai oleh manusia. Ancaman militer juga tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga dapat tidak langsung ditujukan kepada negara itu, tetapi lebih kepada kepentingan-kepentingan eksternal yang ditujukan kepada negara itu.
2. Ancaman politik : Ancaman ini ditujukan kepada stabilitas kinerja institusi negara. Tujuan mereka cukup luas, dari mulai menekan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan tertentu, penggulingan pemerintahan, menggerakkan kekacauan. Target dari ancaman politik ini adalah nilai-nilai negara,

²⁸ *Ibid.* Hal: 205.

²⁹ Lihat Buzan, Barry., *People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post Cold War Area*, New York: Harvester Wheatsheaff, 1991hal: 116-133.

terutama identitas nasional, ideologi, dan beberapa institusi yang berurusan dengan ini. Ancaman politik juga dapat bersifat struktural, yang secara spesifik muncul ketika terjadi bentrokan antara dua kelompok besar dalam negara dengan pemikiran yang berbeda.

3. Ancaman sosietaI : Ancaman sosial terhadap keamanan nasional biasanya datang dari dalam negeri. Keamanan sosial ialah mengenai ancaman terhadap keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, identitas etnik. Masih menurut Buzan, ancaman sosietaI dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yang secara mendasar yaitu: ancaman fisik (kematian, kesakitan), ancaman ekonomi (pengerusakan hak milik, terbatasnya akses lapangan kerja), ancaman terhadap hak-hak (pembatasan hak-hak kebebasan sipil), dan ancaman terhadap posisi atau status (penurunan pangkat, penghinaan di depan publik). Hilangnya identitas suatu bangsa atau negara merupakan sebuah ancaman sosial.
4. Ancaman ekonomi : Masalah akses terhadap sumber daya-sumber daya, finansial, dan pasar guna mempertahankan kemakmuran dan kekuatan negara. Masalah utama dari ide tentang keamanan ekonomi sendiri adalah berlangsungnya kondisi normal dari aktor-aktor pelaku pasar tanpa gangguan persaingan tidak sehat dan ketidakpastian. Ancaman ekonomi juga mengkaji masalah pengangguran, kemiskinan, keterbatasan terhadap sumber daya, dan daya beli rakyat.
5. Ancaman ekologi : Memperhatikan masalah pemeliharaan lingkungan hidup sebagai sebuah sistem dimana manusia sangat tergantung kepadanya. Yang menjadi isu sentral keamanan ekologi adalah masalah aktivitas manusia yang merusak lingkungan seperti pemanasan global, efek rumah kaca, banjir, eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran dan terus menerus.

Pada penelitian ini yang masuk dalam kategori Buzan adalah :

* Ancaman politik : Ancaman ini ditujukan kepada stabilitas kinerja institusi negara. Tujuan mereka cukup luas, dari mulai menekan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan tertentu, penggulingan pemerintahan, menggerakkan kekacauan. Target dari ancaman politik ini adalah nilai-nilai negara, terutama identitas nasional, ideologi, dan beberapa institusi yang berurusan dengan ini. Ancaman politik juga dapat bersifat struktural, yang secara spesifik muncul ketika terjadi bentrokan antara dua kelompok besar dalam negara dengan pemikiran yang berbeda.

* Ancaman sosial : Ancaman sosial terhadap keamanan nasional biasanya datang dari dalam negeri. Keamanan sosial ialah mengenai ancaman terhadap keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, identitas etnik. Masih menurut Buzan, ancaman sosial dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yang secara mendasar yaitu: ancaman fisik (kematian, kesakitan), ancaman ekonomi (pengrusakan hak milik, terbatasnya akses lapangan kerja), ancaman terhadap hak-hak (pembatasan hak-hak kebebasan sipil), dan ancaman terhadap posisi atau status (penurunan pangkat, penghinaan di depan publik). Hilangnya identitas suatu bangsa atau negara merupakan sebuah ancaman sosial. Dalam permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, hilangnya sebuah identitas bangsa dan negara seperti etnis, bahasa, agama atau kepercayaan menjadi ancaman serius bagi Uganda. Hal ini dinilai karena identitas bangsa ataupun negara dapat bergeser karena adanya perkawinan maupun hubungan antara penduduk asli dengan pendatang ataupun pengungsi. Steve Smith mengemukakan "kita tidak datang ke dalam sebuah interaksi tanpa membawa identitas yang sebelumnya telah didapatkan". Artinya identitas yang telah kita peroleh sebelumnya akan mempengaruhi pihak lain yang terlibat di dalam sebuah proses interaksi, begitu juga sebaliknya.³⁰ Jadi suatu masyarakat berinteraksi dengan komunitas atau masyarakat lain selalu membawa identitas diri masing-masing.

Keterlibatan Uganda yang berawal dari sebuah konflik etnik masuk dalam ancaman politik dan sosial. Dalam melihat etnis dan konflik yang terjadi di

³⁰ Steve Smith, 1997, *loc.cit.*

Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK), Frances Steward mengemukakan konflik etnis dapat terjadi karena ketidakmerataan yang terjadi antara kelompok-kelompok etnis dalam penguasaan sumber daya ekonomi dan politik.³¹ Jika melihat pada uraian yang telah ada sebelumnya, hal ini berkaitan dengan konsep kepentingan nasional yang salah satunya adalah pencapaian kehidupan yang makmur dan merata. Konflik etnis yang menjadi sumber konflik bersenjata antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) membawa suatu konflik kedalam suatu kerangka etnopolitik. Pengertian dari konflik etnopolitik itu sendiri adalah konflik yang melibatkan unsur-unsur sentimen etnik, dimana ada empat jenis gerakan etnopolitik, yakni *ethnonationalist*, *indigenous people*, *communal contenders*, dan *ethnoclasses*. Berdasarkan targetnya, dua jenis yang pertama (*ethnonationalist* dan *indigenous people*) digolongkan sebagai kelompok yang menghendaki pemisahan diri atau "otonomi" dari negara yang memerintah mereka. Sedangkan dua jenis kelompok yang terakhir, *communal contenders* dan *ethnoclasses*, tidak menghendaki pemisahan melainkan ingin mengupayakan akses yang lebih besar dari yang telah diberikan oleh negara yang memerintah mereka.³²

Terancamnya batas dan kedaulatan Uganda sebagai dampak dari konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) membawa banyaknya pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang lari ke Uganda membawa Uganda pada tingkat kekhawatiran yang tinggi. Kesenjangan antar etnis dan antar kawasan adalah salah satu penyebab dan sumber permasalahan yang dapat menjelaskan berbagai pergolakan yang menuju pada disintegrasi bangsa. Etnis atau kesukuan merupakan salah satu faktor dalam politik yang dapat memberikan implikasi penting dalam suatu konflik etnis baik yang terjadi dalam wilayah nasional maupun tingkat internasional.³³ Dalam suatu komunitas pasti ada yang kelompok minoritas dan mayoritas. Perilaku dan pembentukan struktur institusi dapat memberikan pengaruh dalam sebuah identitas etnis yang dominan tersebut.

³¹ Lihat : Riwanto Tirtosudarmo, "Demografi-politik pasca-Soeharto" : *Etnopolitik-Pemekaran Wilayah*, Yayasan Ober Indonesia, 2007. Hal : 159.

³² *Ibid*.

³³ Lihat : David Carment, "The Ethnic Dimension In World Politics", *Third World Quarterly*, Journal of Emerging Areas Volume 15 Number 4, Carfax Publishing Company, UK, 1994. Hal : 553.

Suku yang termasuk kaum minoritas tersebut akhirnya mengalami diskriminasi politik, dimana diskriminasi politik disini adalah pembatasan secara sistematis dalam hak politik maupun akses untuk sebuah posisi politik yang dimana didalamnya akan membandingkan antara satu dengan lainnya.³⁴

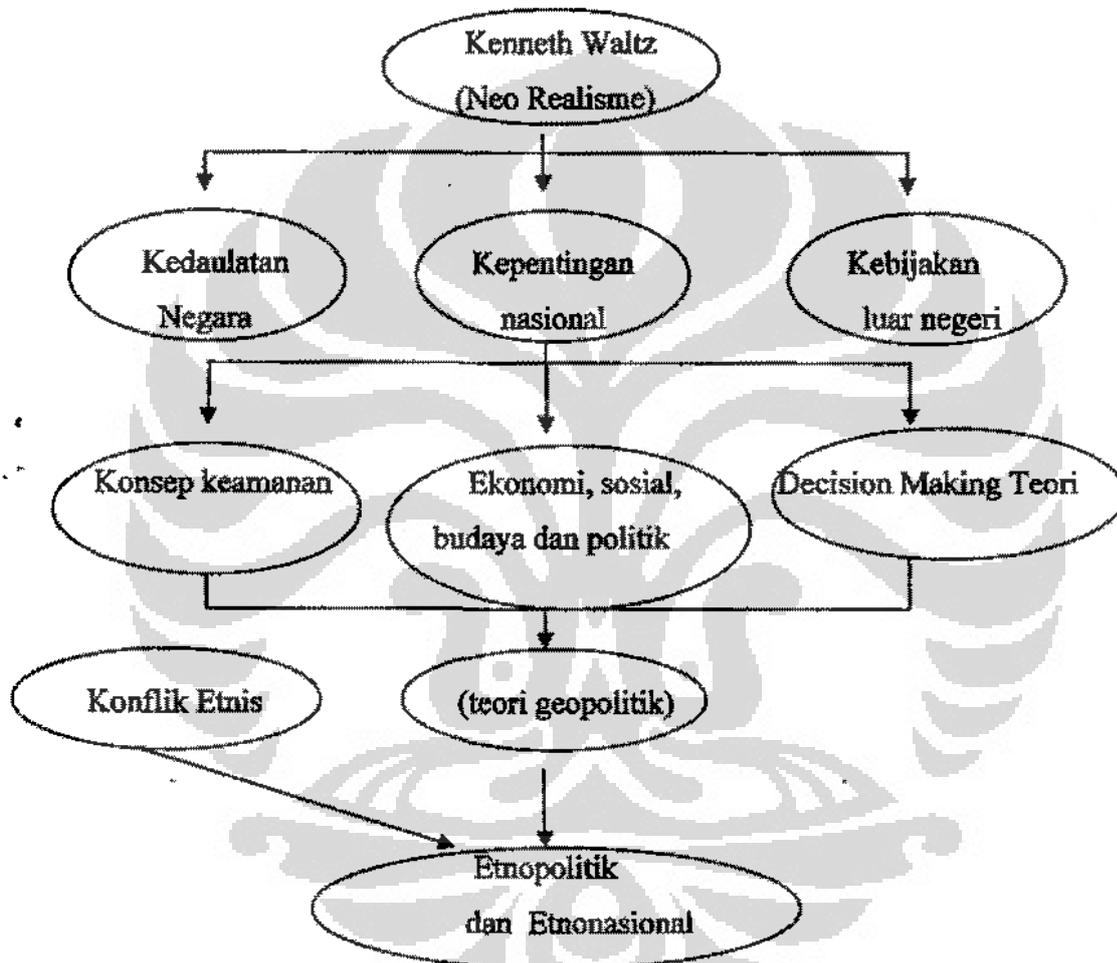
Pada penelitian yang akan membahas sebuah kepentingan nasional Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK), Uganda berusaha untuk menciptakan sebuah keamanan wilayah atau stabilitas kawasan untuk menciptakan wilayah yang aman di wilayah Uganda sendiri. Untuk lebih mudah dalam melihat alur kerangka pemikiran yang akan digunakan, peneliti merangkainya sebagai berikut :



³⁴ Lihat : Ted Robert Gurr, *Minorities at Risk; A Global View of Ethnopolitical Conflict*, United States Institute of Peace Press, Washington, D.C, 1993. Hal : 46

Pernyataan dasar :

1. Walter Lippmann dan Stephen M. Walt (pernyataan mengenai kondisi negara yang dikatakan aman)
2. Kenneth Waltz (neo realis) : struktur yang mampu mempengaruhi sebuah kebijakan negara

**F. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan membandingkan faktor internal di sebuah Negara dalam menjalankan politik luar negerinya. Tesis dalam tinjauan kepustakaan yang akan diambil adalah Tesis yang berjudul “Kebijakan luar negeri Israel mengenai penyelesaian konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahan Yitzhak Rabin (1992-1995)”. Tesis tersebut membahas

bagaimana kebijakan luar negeri Israel dalam menghadapi konflik dengan palestina yang pada dasarnya adalah masalah perbatasan. Namun dalam tesis yang di tulis oleh Dionnisius Elvan Swasono ini lebih melihat pada faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang telah mendorong Yitzhak Rabin sehingga pada masa pemerintahannya yang kedua dia banyak mengeluarkan kebijakan yang cukup kondusif bagi perdamaian di Timur Tengah khususnya dalam konteks penyelesaian konflik Israel-Palestina. Salah satu kebijakan Israel tersebut adalah kesediaannya mengadakan perundingan damai secara langsung dengan PLO, organisasi yang selama ini dipandang sebagai organisasi teroris. Perundingan ini menghasilkan *Declaration of Principles* (DoP) yang ditandatangani di Washington DC, AS pada tanggal 13 September 1993, Masyarakat dunia berharap DoP dapat menjadi titik awal bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina secara menyeluruh. Poin penting dari DoP adalah kesediaan Israel memberi otonomi kepada Otoritas Palestina di Jalur Gaza dan kota Jericho. Otonomi ini juga akan diberlakukan di wilayah-wilayah tepi barat lainnya.

Berdasarkan pada teori kebijakan luar negeri yang mengatakan bahwa faktor pemimpin sangat berperan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (*foreign policy decision making*), maka permasalahan utama yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang telah mendorong Yitzhak Rabin sehingga pada masa pemerintahannya yang kedua dia banyak mengeluarkan kebijakan yang cukup kondusif bagi perdamaian di Timur Tengah khususnya dalam konteks penyelesaian konflik Israel-Palestina. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis *case studies*. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada faktor internal Uganda yang dapat membuat mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negerinya terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK) dalam mencapai *national interest* negara Uganda.

Dalam penelitiannya Elvan menjabarkan bahwa Salah satu kebijakan Israel tersebut adalah kesediaannya mengadakan perundingan damai secara langsung dengan PLO, organisasi yang selama ini dipandang sebagai organisasi teroris. Perundingan ini menghasilkan *Declaration of Principles* (DoP) yang ditandatangani di Washington DC, AS pada tanggal 13 September

1993, Masyarakat dunia berharap DoP dapat menjadi langkah awal bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina secara menyeluruh. Poin penting dari DoP adalah kesediaan Israel memberi otonomi kepada Otoritas Palestina di Jalur Gaza dan kota Jericho. Otonomi ini juga akan diberlakukan di wilayah-wilayah Tepi Barat lainnya.³⁵ Terlihat bahwa penelitian tersebut lebih mengedepankan kerjasama, demi perdamaian yang akan diciptakan. Pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan pendekatan lebih secara geopolitik dimana untuk menjaga kestabilan dan kedaulatan wilayah negaranya Uganda akan melakukan politik luar negeri yang memberikan posisi aman bagi kepentingan nasionalnya.

G. HIPOTESIS

1. Pentingnya garis batas wilayah yang jelas sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan wilayah suatu negara.
2. Konflik yang terjadi di negara yang berbatasan langsung menjadi sebuah ancaman bagi negara tersebut.
3. Jalan dan kinerja pemerintahan yang baik dalam menyelesaikan segala konflik yang ada didalam negerinya dapat menciptakan stabilitas keamanan wilayah negaranya.

H. ASUMSI DASAR

- Posisi geopolitis negara dalam teori geopolitik memiliki kekuatan-kekuatan yang ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternative kebijaksanaan dasar nasional untuk kepentingan nasional.
- Pencapaian kepentingan nasional suatu negara atau bangsa dapat menimbulkan kondisi yang baik terhadap negara-negara lainnya dan dapat membawa negara tersebut kedalam kerjasama dengan negara-negara lainnya.

³⁵ Lihat Thesis Dionnisius Elvan Swasono, "*Kebijakan luar negeri Israel mengenai penyelesaian konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahan Yitshak Rabin (1992-1995)*", Jakarta 2005.

- Untuk pencapaian sebuah kepentingan nasional yang dirumuskan dalam kebijakan luar negeri.
- Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara.

I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisa, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang kemudian akan dilanjutkan dengan menganalisa data yang ada. Teknik pengumpulan data itu sendiri adalah dengan studi kepustakaan, dimana data yang ada diambil dari berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penulisan, seperti: buku, jurnal ilmu politik, data yang diperoleh melalui internet yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan.

J. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian suatu permasalahan sangatlah penting untuk menghindari kesulitan yang timbul dalam proses analisa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembahasan ini akan berkisar antara tahun 1998 hingga 2003. Pada tahun itu kepemimpinan Mobutu Sese Seko digantikan oleh Laurent Kabila yang akhirnya menimbulkan konflik etnis berkepanjangan yang memberi dampak gelombang pengungsian ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dalam penulisan ini terdapat peristiwa diluar kurun waktu di atas. Hal ini dimaksudkan sebagai pelengkap serta penunjang dari bahasan yang utama. Pada pembahasan permasalahan yang ada, akan dilakukan pembatasan yaitu hanya melihat segi faktor Internal keterlibatan Uganda di Kongo.

K. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, metode penelitian, kerangka analisis, dan jangkauan penelitian dari "Keterlibatan Uganda Di Republik Demokratik Kongo (RDK)".

BAB II KETERLIBATAN UGANDA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)

Pada bab II akan melihat keterlibatan Uganda di Republik Demokratik Kongo. Bagaimana proses Uganda masuk kedalam konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) dan sejauh mana Uganda melibatkan diri didalam konflik tersebut.

BAB III KEPENTINGAN NASIONAL UGANDA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)

Pada Bab ini akan diuraikan tentang faktor internal dari kepentingan nasional Uganda yang mendorong keterlibatan Uganda dalam pelanggaran HAM di Kongo. Sumber daya alam yang dimiliki Republik Demokratik Kongo (RDK) membuat ketertarikan Uganda untuk memperbaiki kondisi ekonomi negaranya. Menjaga stabilitas keamanan terutama di wilayah perbatasan menjadi dasar sebuah kepentingan nasional Uganda terhadap negara yang berbatasan langsung dengan Uganda.

BAB IV ANALISA KEBIJAKAN POLITIK UGANDA DALAM KONFLIK BERSENJATA DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)

Bab ini akan menganalisa keterlibatan Uganda di Republik Demokratik Kongo (RDK) secara keseluruhan. Pada bab ini akan dilihat bagaimana peran militer yang pada dasarnya sebagai pelindung masyarakat sipil dan negara dari sebuah ancaman menjadi sumber dari ancaman itu sendiri. Keberadaan masyarakat sipil di masa perang juga akan menjadi sumber analisa dari konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Hal ini melihat banyak

korban dari konflik tersebut adalah masyarakat sipil yang dapat dispesifikasikan lagi yaitu kaum perempuan dan anak-anak kecil.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Menarik intisari dari hasil analisa studi konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK).



BAB II

KETERLIBATAN UGANDA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)

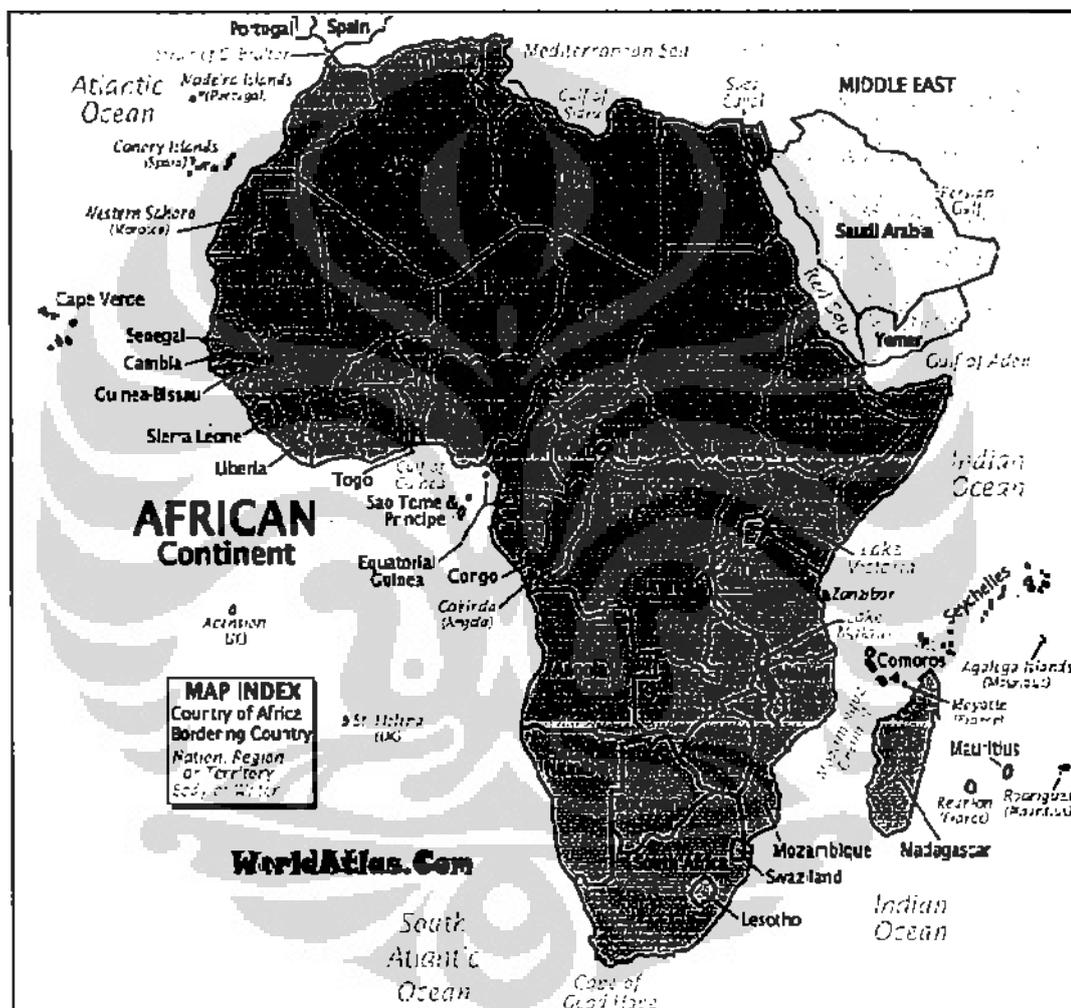
A. Hubungan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK)

Hubungan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) terjalin dengan baik, hal ini ditandai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) kepada Uganda dan begitu juga sebaliknya. Uganda membantu Laurent Kabila dengan melihat pula bantuan yang pernah dilakukan oleh Laurent Kabila dalam menghadang pasukan Sudan. Uganda memiliki masalah yang disebabkan oleh ketidaksetujuan rezim Khartoum di Sudan terhadap pemerintahan Museveni. Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) melalui Presiden yang saat itu adalah Mobutu Sese Seko memberikan bantuan kepada Uganda berupa pengiriman pasukan Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk mendukung militer Okello. Tito Okello adalah bekas komandan Angkatan Darat Obote yang telah berhasil menjatuhkan kekuasaannya tanggal 27 Juli 1985. Dr. A.M Obote sendiri diangkat menjadi Presiden Uganda setelah Kabaka Mutesa II wafat. Masa pemerintahan Obote telah mengubah Uganda dari Federal menjadi Republik.

Posisi geografis yang saling berbatasan sangat berpengaruh dalam jalannya dan berlangsungnya pemerintahan dalam negeri Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK). Luas wilayah Uganda mencapai 241 ribu kilometer persegi. Uganda terletak di bagian timur Afrika, bertetangga dengan Kenya di sebelah timur, Tanzania dan Rwanda di sebelah selatan, Republik Demokratik Kongo (RDK) di sebelah barat dan Sudan di sebelah utara. Kebanyakan topografi dalam wilayah Uganda adalah daratan tinggi sekitar 1,200 meter di atas permukaan laut.³⁶ Uganda adalah suatu negara multi etnis, dan mempunyai sekitar 40 etnis.

³⁶ Untuk melihat lebih jelas posisi geografis antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) dapat melihat peta negara Afrika secara keseluruhan dengan sumber dari : http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/africaa.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Ddata%2Bstatistik%2Bkekerasan%2BUganda%2Bdi%2BKongo%26si%3Did%26tl%3Den&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhIbcOeTtH0tUGJnlL9XNPROnRNQ
Tanggal akses : 8 April 2009.

Bahasa resmi Uganda adalah bahasa Inggris, dan menggunakan bahasa Kiswahili dan Rwanda. Pada tahun 1963-1965, Uganda bekerjasama membantu pemerintah revolusioner di Angola dan Republik Demokratik Kongo (RDK) dalam menghadapi gerakan pro Barat dan Afrika Selatan.³⁷ Berikut adalah peta negara Afrika, dimana terlihat Uganda berbatasan dengan Kenya, *lake victoria*, Republik Demokratik Kongo (RDK), Sudan dan Rwanda.



Peta negara Afrika, sumber : www.worldatlas.com

³⁷ Lihat : "Oktober 1965: Ramai-ramai Menggadai Kedaulatan Politik Luar Negeri" - Category : Politik. <http://www.geopolitik.org>. Tanggal akses : 19 Maret 2009

Sebagaimana kepentingan nasional yang dijabarkan oleh Holsti adalah sebagai tujuan yang menjadi ingin dicapai oleh suatu negara, dan Holsti melihat ada sekurang-kurangnya empat tujuan yang saat ini lazim ditemukan yaitu :³⁸

- **Keamanan (*security*)** : Negara-negara akan menjaga keamanan wilayah negara mereka dari berbagai ancaman pihak luar. Hal ini untuk atau demi menjaga stabilitas keamanan wilayah negara tersebut. Uganda sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) melihat pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) di wilayah perbatasan uganda-Kongo (RDK) sebagai ancaman yang akan mengancam kondisi keamanan wilayah perbatasan Uganda – Kongo maupun wilayah Uganda keseluruhan. Karena itulah, setiap negara pasti menjadikan pencapaian keamanan wilayah sebagai salah satu dari kepentingan nasional suatu negara.
- **Otonomi (*autonomy*)** : Setiap negara juga pasti memiliki kepentingan nasional untuk menjadikan pemerintah berlaku otonomi di segala sektor. Dalam arti, pemerintah memiliki otoritas penuh untuk dapat melakukan segala tindakan politik dengan melakukan interaksi publik tanpa harus ada campur tangan orang lain atau pihak lain. Baik Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) saling ingin berdiri sendiri dan menjadikan negara mereka menjadi negara yang diakui keberadaannya di dunia internasional. Baik Uganda maupun Republik Demokratik Kongo (RDK) ingin memiliki dan menjadikan wilayah negara mereka berlaku otonom. Dimana mereka berhak dengan otoritas penuh mengatur dan mengontrol segala aspek yang ada dalam kehidupan bernegara.
- **Kesejahteraan (*welfare*)** : Tidak ada negara ataupun bangsa yang tidak ingin menyejahterakan rakyatnya. Menyejahterakan rakyat adalah salah satu dari segala macam kepentingan nasional yang dimiliki suatu negara. Dengan pencapaian kesejahteraan tersebut diharapkan akan

³⁸ K.J. Holsti, *op.cit.*, hal : 83.

menghasilkan kondisi masyarakat yang kondusif dan tidak ada rasa kekecewaan terhadap pemerintah yang akhirnya dapat menimbulkan pemberotakan-pemberontakan rakyat terhadap pemerintah. Seperti halnya yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang didalam setiap pergantian Presidennya tetap mengalami kegagalan dalam menyelesaikan konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) yang sudah lama ada. Banyaknya pemberontakan di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan kudeta yang ada adalah sebagai ungkapan dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Hal itu tentu saja akan berakhir jika rakyat merasakan kesejahteraan dari pemerintah.

- *Status (status and prestige)* : Pencapaian pengakuan akan status sebuah negara didepan negara lain adalah sebagai kepentingan nasional yang dimiliki sebuah negara. Dalam menjalankan politik luar negerinya, negara ingin mendapatkan hasil yang salah satunya adalah diakui negara tersebut didepan negara lain terutama didunia internasional. Hal inilah yang berlaku antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK). Mereka sama-sama memiliki kepentingan nasional agar mereka diakui sebagai negara yang berdaulat didepan negar lain didunia internasional.

Konflik yang terjadi antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) berakar dari sebuah konflik internal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK). Konflik etnis yang menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan menjadi tugas dan tanggung jawab setiap presiden Republik Demokratik Kongo (RDK). Konflik etnis tersebut itu sendiri muncul sebagai hasil dari tindakan diktator Mobutu Sese Seko atas diskriminasi salah satu etnis di Republik Demokratik Kongo (RDK). Persengketaan tanah antara suku Hutu dan Tutsi direspon secara diktator oleh Mobutu. Hal itu pula yang menimbulkan berbagai kelompok pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK) yang berusaha mencoba untuk menggulingkan pemerintahan Mobutu. Banyak pelanggaran HAM

yang terjadi di Afrika khususnya Republik Demokratik Kongo (RDK). Bagi Afrika, masalah HAM adalah masalah yang selalu muncul hingga pada akhirnya pada Juli 1979 Organisasi Persatuan Afrika (OAU) menyetujui naskah Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Bangsa Afrika untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia di Afrika.³⁹ Dalam melaksanakan kinerja dan tanggung jawabnya, PBB juga memiliki Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang dimandatkan untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan berbagai bentuk kebebasan mendasar.⁴⁰ Komisi ini telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia dan menangani berbagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Sekretaris Jendral PBB juga menyatakan bahwa untuk menghasilkan perdamaian dan keamanan di Afrika terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebagai contoh yang terjadi di Afrika Selatan, bangsa / negara-negara di Afrika Selatan pada tahun 1912 membentuk ANC (*African National Congress*), sebuah gerakan liberalisasi nasional di Afrika Selatan yang dibentuk untuk menyatukan bangsa Afrika. Tujuan ANC sendiri adalah membentuk kesatuan masyarakat yang demokratis tanpa memandang ras dan jenis kelamin serta memperbaiki kualitas kehidupan bangsa Afrika (Afrika Selatan).⁴¹

Terbentuknya ANC dapat dimaknai sebagai media untuk menciptakan keamanan wilayah yang baik antar negara-negara di Afrika. ANC diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ada di Afrika dengan cara *soft power* yaitu diplomasi dan negosiasi diantara negara-negara di Afrika. Keberadaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga hak asasi manusia di hasilkan dengan mandat langsung PBB kepada ECOSOC untuk meningkatkan penghargaan terhadap HAM. Terjaganya sebuah penghargaan terhadap HAM di Afrika dapat mempererat hubungan diantara negara-negara yang ada di Afrika. Sebagai bentuknya adalah terciptanya sebuah kerjasama yang baik didalam segala sektor bidang. Hal ini tentu saja akan membawa dampak yang baik bagi kelangsungan hidup negara-negara di Afrika. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang

³⁹ *Ibid*, hal : 37.

⁴⁰ Lihat Makarim Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, dalam *Selamat Datang Dewan Keamanan Hak Asasi Manusia PBB*, LP3ES, Jakarta, 2006. Hal: 25.

⁴¹ *Ibid*.

dihasilkan dari kerjasama negara-negara di Afrika tersebut akan berhasil jika terjaganya kestabilan penghargaan terhadap HAM yang ada di Afrika, mengingat Afrika memiliki suku/etnis yang berbeda-beda. Tentu saja kesejahteraan dan penghargaan yang baik terhadap etnis tidak akan menimbulkan konflik etnis, sebagaimana yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) bahwa penghargaan atas sebuah etnis didalam menjalankan pemerintahan menjadi sangat penting demi tercapainya sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera.

Negara tidak dapat meniadakan keanekaragaman etnis maupun adat istiadat yang ada di masyarakat mereka. Penghargaan terhadap keanekaragaman maupun perbedaan suku, etnis, adat istiadat dan budaya yang ada memiliki peran dan nilai penting disebuah negara. Suku, etnis, adat istiadat dan budaya yang ada merupakan identitas suatu bangsa/negara. Sebuah hal yang harus diperlakukan secara adil untuk menghindari tindakan anarkis yang dapat melahirkan kelompok pemberontak melawan pemerintah. Dalam sebuah kebijakan negara terhadap politik yang dijalani tidak boleh meniadakan identitas bangsa/negara itu sendiri. Pada konflik antar suku bangsa, corak kesukuan individual perorangan berubah menjadi kategorikal. Yang akan dihancurkan bukan lagi orang per orang, bukan pula kelompok, melainkan kategori etnis suku bangsa, termasuk keyakinan keagamaan yang dipeluknya. Agar konflik etnis tidak berkembang menjadi konflik agama, diperlukan kesadaran dari setiap masyarakat etnis untuk melihat bahwa dalam sejarah, agama seringkali dipakai demi memenangkan persaingan ekonomi atau politik dalam rangka kepentingan individu atau kelompok tertentu.

A.1 Konflik Internal Uganda

Uganda memiliki masalah internal dari masa ke masa. Buruknya kondisi pemerintahan, perekonomian dan lainnya membawa Uganda tidak pernah berada pada posisi stabil.

A.1.1 Uganda di Masa Kolonial

Sejarah korupsi yang melanda Uganda tidak bisa lepas dari sejarah kolonisasi Kerajaan Inggris sejak tahun 1894. Selama periode penjajahan itu, rakyat pribumi yang bekerja di sektor layanan publik tidak memiliki kesempatan

untuk melakukan korupsi. Hampir semua keputusan penting dipegang oleh pejabat kolonial. Pemerintahan kolonial hampir tidak bisa disentuh oleh kritik dan kontrol masyarakat serta tuntutan publik menyangkut transparansi. Namun pada kenyataannya para pejabat pribumi yang mengambil alih kekuasaan setelah Uganda memperoleh kemerdekaannya pada 9 Oktober 1962 mengikuti cara-cara pemerintahan kolonial dalam mengurus negara.⁴²

Para penguasa baru tidak memperbaiki sistem lama dan membuat pemerintah lebih mengerti terhadap tuntutan rakyat. Para pemimpin Uganda menggunakan kekuatan militer dan polisi untuk melawan sistem demokrasi yang ada. Konstitusi kemerdekaan salah satunya menghasilkan penyelenggaraan pemilihan umum lima tahun sekali juga dilanggar oleh pemerintah Uganda. Saat itulah korupsi mulai terjadi di Uganda. Masa-masa awal kemerdekaan Uganda sendiri ditandai dengan adanya pencaangan pembangunan diberbagai sektor, terutama untuk memerangi kemiskinan dan memberantas penyakit. Pada masa penjajahan komisi yang dihasilkan dari proyek pemerintah tersebut dimonopoli oleh pejabat colonial. Akibatnya, pemerintah Uganda bertambah buruk ketika masa demokrasi yang berada dibawah Idi Amin pada tahun 1972. Keadaan mulai membaik ketika Uganda dipimpin oleh Yoweri Museveni pada tahun 1986. Ia membuat berbagai kebijakan untuk melawan korupsi. Birokrasi dibersihkan dari korupsi, sistem politik yang demokratis dibangun, masyarakat sipil diberdayakan dan ekonomi dipulihkan.⁴³ Pada pemilihan umum tahun 1980, Gerakan Patriotik Uganda *The Uganda Patriotic Movement* (UPM) mendeklarasikan perubahan kearah yang lebih baik yaitu dengan membentuk pemerintahan yang bersih. Janji itu dipenuhi oleh pemerintahan baru yang dipimpin Museveni lewat salah satu programnya yaitu memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

⁴² Lihat www.tempointinteraktif.com/id/cetak/1999/06/14/sel/mbm.19990614.sel95372.id.html.
Tanggal akses: 9 Mei 2009.

⁴³ *Ibid*.

A.1.2 Pemerintahan Idi Amin (25 Januari 1971- 13 April 1979)

Rezim Idi Amin dimulai pada tahun 1971. Kepemimpinan Idi Amin terjadi saat ia mengadakan suatu pemberontakan militer terhadap pemerintahan Milton Obote yang saat itu sedang berkuasa. Saat itu, presiden sedang menghadiri sebuah konferensi di Singapura, sehingga Idi Amin sebagai panglima besar militer diminta untuk menjaga keamanan Uganda. Namun, ia menggunakan kekuasaan tersebut untuk memberontak dengan menggunakan tentara militemya. Idi Amin, adalah pemimpin diktator militer di Uganda yang memerintah pada 25 Januari 1971- 13 April 1979. Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional. Pada bulan Agustus 1972, semua orang Asia berwarga negara Inggris (60.000 jiwa) diberi waktu sembilan puluh hari untuk angkat kaki dari Uganda. Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena Uganda ingin memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda.⁴⁴ Inggris kemudian menghubungi Australia, Selandia Baru, dan negara-negara persemaikmuran Inggris lainnya untuk membicarakan penampungan. Hal ini melihat Kenya dan Tanzania menolak memberikan penampungan terhadap para pengungsi. Sepuluh hari kemudian ditetapkan aturan tambahan bahwa orang asing yang sudah menjadi warga negara Uganda harus pergi dari Uganda. Jumlahnya sekitar 23.000 jiwa. Sudah tentu warga negara keturunan asing yang lahir di Uganda kebingungan. Jika mereka pergi, status mereka adalah tanpa negara. Ditambah lagi, India, Pakistan, dan Bangladesh yang menjadi negara asal mereka telah menolak untuk menerima kembali mereka.⁴⁵

Dibuatnya kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik orang-orang Eropa di Uganda membuat krisis ekonomi parah di Uganda. Sekitar 90 % perdagangan dan industrinya dikuasai orang-orang Asia. Penduduk Uganda sendiri masih sangat agraris tradisional dan kurang kecakapan, modal, dan ketrampilan. Sebenarnya, rencana pengusiran orang Asia sudah direncanakan oleh Milton Obote karena dirasakan terlalu mencengkram ekonomi Uganda, tetapi masih menargetkan waktu lima tahun, dengan alasan mempersiapkan orang Uganda. Obote sendiri adalah lawan politik Idi Amin. Ia digulingkan Idi Amin

⁴⁴ Lihat "kekuasaan Idi Amin", <http://www.country-data.com>. Tanggal Akses : 12 Mei 2009.

⁴⁵ *Ibid.*

pada tahun 1971, namun kembali merebut kekuasaan pada tahun 1980. Masa baktinya yang kedua diwarnai penindasan dan pembunuhan terhadap warga sipil semasa perang saudara. Obote tampil sebagai pembimbing presiden yang sukses untuk Idi Amin dan Yoweri Museveni. Ia disebut sebagai bapak pendiri kemerdekaan Uganda.

Uganda dahulunya adalah sebagai salah satu negeri ter subur di Afrika, kini hasil pertanian menjadi langka sampai penduduk kota harus menanam tebu dan pisang. Kebutuhan pokok di kota menjadi langka. Sementara di pedesaan hasil panen begitu melimpah, penduduk kota tidak dapat menikmati hasilnya. Dulu negeri Uganda dikenal sebagai pengeksport teh dan kopi, namun karena sistem administrasi dan transportasi yang buruk, ratusan karung kopi di gudang menunggu dieksport, sementara puluhan ribu ton diselundupkan ke Kenya.⁴⁶ Pada bulan April 1979, Idi Amin berhasil digulingkan oleh tentara nasionalis Uganda yang dibantu Tanzania. Sebelumnya Idi Amin dengan bantuan Libya mencoba menyerang Kagera, provinsi utara Tanzania. Pada tanggal 17 Agustus 2003, David Owen Sekretaris Kementrian Luar Negeri Inggris (1977-1979), pernah memerintahkan agar Idi Amin dibunuh untuk mengakhiri rezim terorinya. Hal ini dikarenakan rezim Idi Amin sangat buruk, dan mengerikan bila dia dibiarkan berkuasa terlalu lama. Namun usul itu ditolak. Idi Amin meninggal di Arab Saudi pada tanggal 16 Agustus 2003. Permintaan keluarga Idi Amin untuk menguburkan Idi Amin di Uganda di tolak oleh Presiden Uganda Yoweri Museveni. Dalam menjalankan pemerintahannya, Idi Amin menggunakan pola personal dan koersif. Pendekatan yang dilakukan oleh Idi Amin adalah model personal untuk mengontrol masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan legitimasi dari perwakilan dan tidak ingin ada jalan baru atau sistem baru yang muncul selain dirinya. Karakteristik dari pola ini adalah kepatuhan masyarakat pada pemerintah.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Di kutip dari Elijah Dickens Mushemeza, "Issues of Violence in the Democratisation Process in Uganda" dalam jurnal online http://www.codesria.org/Links/Publications/ad_articles/mushemeza.pdf, hal : 62. Tanggal akses : 7 Mei 2009.

A.1.3 Pemerintahan Obote (1981 – 1985)

Setelah berakhirnya masa pemerintahan dibawah pimpinan Idi Amin. Apollo Milton Obote kembali ke kancah politik yang membawanya menjadi Presiden Uganda pada tahun 1981. Upaya militer Obote yang berkuasa selama empat tahun (1981 – 1985) untuk memusnahkan para pemberontak mengakibatkan luas wilayah penghancuran dan kerugian yang lebih besar daripada kehidupan selama delapan tahun masa pemerintahan Idi Amin. Pada pemilu tahun 1980, partai Kongres Rakyat Uganda (UPC) pimpinan Obote berhasil menang, namun lawan-lawannya menuduhnya curang dalam pemilu. Pendukung Obote telah melakukan intimidasi terhadap pengikut Partai Demokrat, dengan memaksa mereka meninggalkan tempat sebelum surat suara dihitungkan.⁴⁸ Hal ini mengakibatkan pemberontakan yang dipimpin oleh Yoweri Museveni. Sekitar 100 hingga 300 ribu orang meninggal dunia dalam konflik antara kedua pihak tersebut. Sejak digulingkannya Marsekal Idi Amin dengan bantuan tentara Tanzania, kekerasan bersenjata ternyata belum punah.

Pada awal 1983, dilakukan pemindahan penduduk secara besar-besaran yang mempengaruhi hampir 750.000 orang untuk mendukung "Museveni's gerilya" di wilayah wilayah Kecamatan Luwero, utara Kampala. Langkah Obote tersebut tidak seperti rezim Amin, ia menyadari pentingnya bantuan pengamanan asing untuk pemulihan ekonomi bangsa. Obote telah berusaha dan mengikuti saran dari Dana Moneter Internasional, walaupun pada akhirnya Obote tetap pada ideologi sendiri. Bagi Obote tantangan utama adalah bagaimana menyelesaikan konflik bersenjata yang sering terjadi di dalam negeri. Dengan dukungan penguasa militer Paulo Muwanga, yang juga diangkat sebagai wakil presiden merangkap menteri pertahanan dan Tanzania, tetangga dekat Uganda, juga mendukung Obote, membuat pemerintahan Obote akan lebih kuat ketimbang rezim sebelumnya.⁴⁹ Obote mengangkat dirinya sebagai presiden Uganda seumur hidup pada April 1966 sebelum digulingkan oleh kepala staf Angkatan Daratnya Idi Amin lima tahun kemudian pada saat menghadiri pertemuan negara

⁴⁸ Lihat "*Kembalinya Obote dengan Pemilu*", <http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/1980/12/27/LN/mbm.19801227.LN53080.id.html>. Tanggal akses : 7 Mei 2009.

⁴⁹ *Ibid.*

persemakmuran di Singapura. Merespon pemilihan Presiden yang dimenangkan oleh Obote, pihak oposisi mengatakan pemilihan umum tahun 1980 yang merupakan pemilu pertama selama 18 tahun setelah kemerdekaan yang menguntungkan bagi pihak Obote, namun pihak gerilyawan dibawah kepemimpinan Yoweri Museveni melakukan perang gerilya menentang kekuasaan Obote.

Yoweri Museveni Menteri pertahanan, mantan anggota Komisi Militer, dan Paulo Muwanga sebagai Vice President menyatakan untuk mendukung *National Resistance Army* (NRA). Museveni bermaksud meruntuhkan Obote dengan membuat gerakan pemberontakan. Museveni, yang telah mengalami perang gerilya dengan untuk *Liberation Front of Mozambique* (*frente de Libertação de Moçambique - Frelimo*), di daerah pedesaan memperseterukan Obote dari pemerintah, terutama dari daerah pusat dan Buganda barat dan barat wilayah di Ankole dan Bunyoro.⁵⁰ Sebagai reaksinya para anggota pasukan pemerintah yang berperilaku tidak disiplin melakukan pembunuhan massal namun Obote berkeras tidak bersedia berunding dengan Yoweri Museveni sebelum mengakhirinya kekuasaan Obote dengan kudeta pada Juli 1985.

Obote sekali lagi dijatuhkan, setelah pertama kali ia ikut dalam pemilihan Presiden Uganda yang dimenangkan oleh Idi Amin dan sempat menjabat sebagai Presiden selama empat tahun, pada tanggal 27 Juli 1985, oleh para komandan militernya sendiri, Brigadir Bazilio Okello dan Jenderal Tito Okello Obote dijatuhkan kembali dalam sebuah kudeta militer. Obote lari ke Zambia. Pada Agustus 2005, ia mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai ketua Kongres Rakyat Uganda (UPC).

A.1.4 Pemerintahan Tito Lutwa Okello (Juli 1985 - Januari 1986)

Tito Lutwa Okello memerintah dari Juli 1985 sampai Januari 1986 dengan tidak ada kebijakan yang eksplisit. Okello diundang mantan prajurit dari Idi Amin untuk kembali ke Uganda dari kamp pengungsi di Sudan dan berpartisipasi dalam perang saudara di pihak pemerintah. Tito Lutwa Okello (1914 - 3 Juni 1996)

⁵⁰ *Ibid.*

adalah pemimpin facto negara Uganda (1985-1986) dan merupakan salah satu komandan dalam koalisi antara angkatan bersenjata Tanzania dan orang Uganda dalam pengasingan yang menjatuhkan Idi Amin tahun 1979, dan komandan angkatan bersenjata nasional Uganda dari tahun 1980 sampai tahun 1985 .Tito Okello bersama dengan tentara Tanzanian, menyerang Uganda pada tahun 1979. Dari 1980 ke 1985 Okello menjabat sebagai komandan dari tentara *Uganda National Liberation Army* (UNLA).

A.1.5 Pemerintahan Yoweri Museveni

Yoweri Museveni berkuasa untuk memimpin Uganda sebagai Presiden Uganda. Pada masa pemerintahan Museveni banyak muncul gerakan pemberontakan yang berusaha melawan pemerintahan. Munculnya gerakan tersebut salah satunya adalah sebagai kelanjutan dari hasil pemerintahan Idi Amin yang merugikan rakyat Uganda sendiri. Tidak tercapainya kesejahteraan rakyat Uganda membawa rakyat Uganda melakukan pemberontakan sebagai ungkapan ketidakpuasan mereka oleh pemerintah maupun negaranya.

Munculnya gerakan pemberontak di Uganda yang berada dibawah junta militer Okello membawa uganda masuk kedalam konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK). Munculnya LRA (*Lord's Resistance Army*) pada tahun 1987 dan ancaman pasukan dari Sudan yang ingin masuk ke wilayah Uganda menggoyahkan politik dalam negeri Uganda. LRA (*Lord's Resistance Army*) menewaskan sekitar 370 penduduk sipil di daerah Lamwo Country, sebelah Utara Uganda. Tindakan LRA (*Lord's Resistance Army*) tersebut merupakan pembalasan atas dirampasnya sejumlah 300 pucuk senjata LRA (*Lord's Resistance Army*) oleh pasukan pemerintah Uganda.⁵¹ Republik Demokratik Kongo (RDK) sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Uganda meresponnya dengan memberikan bantuan berupa pengiriman pasukan untuk menangkal keterlibatan pasukan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang akan mendukung junta militer Okello. Tampilnya Okello sendiri tidak disetujui oleh *National Resistance Army* (NRA) yang akhirnya menjadikan pada tanggal 11

⁵¹ Lihat "*Africa-Uganda, General Information, Uganda Conflict*", [Http://www.pcr.uu.se/database/conflictsummary.php](http://www.pcr.uu.se/database/conflictsummary.php). Tanggal akses : 11 April 2008.

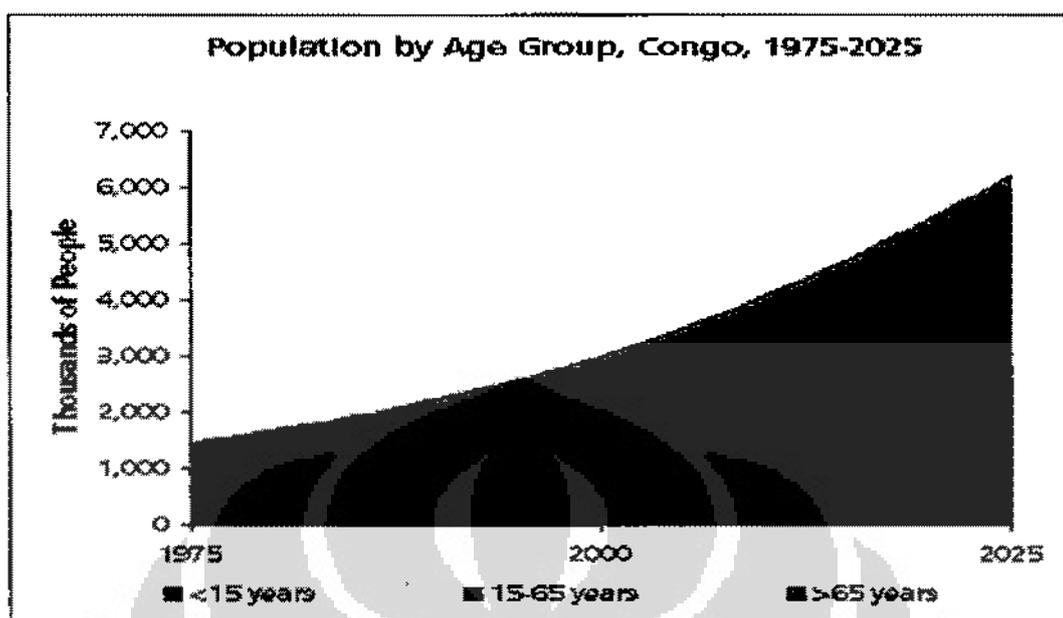
Mei 1996 Yoweri Museveni diangkat sebagai Pemimpin Uganda. Museveni mengemban tugas untuk menyelesaikan konflik yang ada di Uganda dengan menumpas pemberontakan yang terjadi di Uganda. Pemberontakan yang menghasilkan masyarakat Uganda menjadi saling berkelompok untuk melawan negara. Museveni sebagai orang yang dipercaya dan terpilih untuk menjadi Presiden Uganda mengambil kebijakan yang sangat keras untuk menyelamatkan kedaulatan wilayah Uganda juga untuk kepentingan nasional Uganda. Negara Uganda merasa perlu adanya respon yang cepat dalam menanggapi konflik yang ada di negara yang berbatasan langsung. Uganda melihat bahwa tidak ada cara lain selain menindak tegas kelompok pemberontak yang tidak terkontrol.

Di Uganda sendiri banyak terjadi konflik perebutan kekuasaan, perang antar etnis dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, seperti LRA (*Lord's Resistance Army*) yang dipimpin Joseph Kony di bawah pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK).⁵² *Lord's Resistance Army* (LRA), yang dipimpin oleh Joseph Kony, melakukan berbagai pelanggaran yaitu penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak. Selama dua puluh tahun, Uganda bagian utara sudah menjadi tempat paling berbahaya di bumi bagi anak-anak. LRA (*Lord's Resistance Army*) sudah menculik sekitar 30.000 anak-anak di Uganda bagian utara (lihat gambar 1 pada halaman lampiran gambar).

Berikut adalah tabel populasi penduduk Republik Demokratik Kongo (RDK) berdasarkan usia.⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ <http://www.fokh.org.uk/images/population.gif>



Sumber : <http://www.fokh.org.uk/images/population.gif>

Dari table tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah anak-anak yang berusia dibawah umur. Peningkatan populasi penduduk yang dibawah umur dari tahun ke tahun meningkat, namun hal ini juga yang akan memberi ancaman terhadap kehidupan masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK). Hal ini dikarenakan yang menjadi korban penculikan anak-anak yang dilakukan oleh LRA (*Lord's Resistance Army*) banyak yang dibawah umur. Hampir semua pasukan tentara yang merupakan hasil dari penculikan anak dibawah umur yang rata-rata usianya adalah 15 tahun menjadi jenderal. Memaksa anak-anak untuk menjadi tentara itu sudah cukup kejam, tapi pada kenyataannya, taktiknya jauh lebih kejam. Untuk menguatkan mental anak-anak, mereka memutuskan hubungan anak-anak itu dengan keluarga dan masyarakat. Untuk mengikat hati nurani dan harapan anak-anak kepadanya, Kony biasanya memaksa anak-anak itu untuk membunuh anggota keluarga mereka sendiri, atau anak-anak lain yang baru saja diculik. LRA (*Lord's Resistance Army*) telah menculik banyak warga sipil untuk pelatihan pasukan pemberontak yang sebagian besar korban adalah anak-anak dan remaja. LRA (*Lord's Resistance Army*) juga menculik perempuan yang belum dewasa untuk dijadikan sebagai budak seks dan buruh.

Selama tahun 1998 lebih dari 6.000 orang telah diculik. Anak-anak terutama perempuan juga telah dijual, diperdagangkan, atau diberikan sebagai hadiah oleh LRA (*Lord's Resistance Army*) ke penjual senjata di Sudan.⁵⁴ Sedangkan dalam bidang ekonomi, Museveni membuat pendekatan baru untuk meningkatkan ekonomi. Ia membuat sebuah sistem ekonomi yang tersentral dan juga mengontrol secara ketat impor dan juga harga-harga dalam pasar. Selain itu, agar Uganda tidak bergantung pada bantuan-bantuan negara asing, Museveni membuat kebijakan yang mengunci Uganda dari bantuan-bantuan dari negara-negara pendonor. Namun, hal tersebut tidak berhasil justru dengan hal tersebut inflasi di Uganda meningkat hingga 380%. Oleh karena itu, Museveni pada akhirnya menyetujui perjanjian bantuan ekonomi (pinjaman) yang berasal dari *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank*. Sehingga ia membuat kebijakan untuk mengetatkan kebijakan fiskal dan moneter, memfokuskan pada liberalisasi pasar serta kebebasan politik, dan mengubah kebijakan dalam bidang sektor pelayanan publik dan sektor perdagangan. Kebijakan ini berhasil mengatasi permasalahan ekonomi sehingga saat ini tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Uganda rata-rata 6%.⁵⁵

A.2. Konflik Internal Republik Demokratik Kongo (RDK)

November 1970 adalah masa dimana Republik Demokratik Kongo (RDK) berada dibawah kepemimpinan Mobutu Sese Seko, dimana pada masa itu Republik Demokratik Kongo (RDK) dikenal dengan nama Zaire.⁵⁶ Mobutu menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) selama 32 tahun. Banyak terjadi kudeta militer sebagai upaya pemisahan propinsi-propinsi yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK). Pemisahan diri dari propinsi tersebut merupakan cara kelompok masyarakat yang terdiskriminasi untuk dapat berdiri sendiri dan melakukan otonomi di daerahnya sendiri untuk membentuk suatu kelompok baru yang memiliki visi dan misi yang sama. Tentu saja hal ini sebagai

⁵⁴ "The Lord Resistant Army",

<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/lra.htm>.

⁵⁵ Dikutip dari Leefer, Kristin. "The Course of Political Development in Uganda and its Effect on Economic Development", <http://lilt.ilstu.edu/critique/spring2004docs/leefer.pdf>, tanggal akses : 18 Mei 2009.

⁵⁶ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakkar, *loc.cit*.

dampak dari kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK) terhadap negara yang saat itu dipimpin oleh Mobutu.

A.2.1 Republik Demokratik Kongo (RDK) di masa kolonial

Republik Demokratik Kongo (RDK) beribukota di *Kinshasa* yang terbagi dalam 10 propinsi, memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tanggal 30 Juni 1960. Gelombang migrasi pertama di Republik Demokratik Kongo (RDK) dilakukan oleh suku Bantu Negro (Bantu/Pygmi) pada tahun 200 sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi. Pada abad ke-5 Masehi, pembentukan masyarakat Bantu mulai berkembang di tepian sungai Lualaba di propinsi Katanga, membentuk suatu kebudayaan yang dikenal dengan Upemba, dan pada akhirnya membentuk kerajaan *Luba* sampai dengan abad ke-15. Kerajaan Luba digantikan dengan kerajaan *Kuba*, konfederasi dari suku Luba, Leele dan Wongo hingga abad ke-19. Pada abad ke-15 di sekitar Republik Demokratik Kongo (RDK) juga berdiri Kerajaan Kongo yang meliputi sebelah barat daya Republik Demokratik Kongo (RDK), Angola dan Kabinda. Kerajaan ini memanfaatkan jual beli budak kepada bangsa-bangsa Eropa.⁵⁷

Bangsa Eropa mulai melakukan eksplorasi di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1870 hingga tahun 1960. Orang Eropa pertama yang berjasa memetakan Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah Henry Morton Stanley (Inggris) yang mendapatkan sponsor dari Raja Leopold II (Kerajaan Belgia). Pada akhirnya Belgia berhasil menguasai Republik Demokratik Kongo dan memberikan nama *Congo Free State*. Oleh pemerintah kolonial Belgia, pada tahun 1908, nama *Congo Free State* diganti menjadi *Belgian Congo*. Belgia berjasa besar bagi Republik Demokratik Kongo (RDK) karena berhasil mengusir Italia, namun Belgia juga dengan licik menjual hasil tambang yang berupa uranium milik Republik Demokratik Kongo (RDK) kepada Amerika Serikat, dan uranium tersebut diproses menjadi bom atom oleh Amerika Serikat, yang kemudian pada Perang Dunia Kedua tahun 1945 berhasil digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki Jepang.⁵⁸

⁵⁷ "Kerawanan Konflik di Afrika" <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/09/02/0029.html>. Tanggal akses : 8 Mei 2009.

⁵⁸ *Ibid*.

Konflik persengketaan antara suku Hutu dan Tutsi muncul dari masa penjajahan Belgia. Hal inilah yang menyebabkan banyak ditemukan suku Hutu dan Tutsi di negara-negara yang memiliki ketidakjelasan perbatasan seperti Burundi, Rwanda, dan Republik Demokratik Kongo (RDK).⁵⁹ Bergabungnya etnis Hutu di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan etnis Hutu di Rwanda mengakibatkan terjadinya pembantaian ribuan orang etnis Tutsi. Hal ini disebabkan karena etnis Hutu ingin membentuk suatu negara etnis di Republik Demokratik Kongo (RDK).⁶⁰ Kondisi geografis antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang saling berbatasan tidak melihat logika etnis dan suku yang berbeda. Dampak dari hal tersebut adalah konflik antar etnis yang sukar diselesaikan. Pemilahan garis batas yang menimbulkan konflik ini dahulunya dibuat oleh para penjajah untuk mengadu domba sesama bangsa Afrika.⁶¹ Para penjajah melakukannya dengan cara membuat perlakuan yang berbeda antara sesama suku dan berbagai macam hal yang bisa membuat masing-masing suku berperang sendiri-sendiri, dan kemudian mengambil semua harta kekayaan alam Afrika untuk kepentingan penjajah pada waktu itu. Masyarakat Afrika hanya menjadi buruh dan budak penjajah sehingga tidak punya kesempatan untuk membangun negaranya.

Berkat kegigihan dan perjuangan bangsa Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk memisahkan diri dari Belgia, maka pada tanggal 30 Juni 1960, Republik Demokratik Kongo (RDK) memperoleh kemerdekaannya, *Joseph Kasavubu* diangkat sebagai Presiden, sedangkan *Patrice-Emery Lumumba* (dari suku Batatele) diangkat sebagai Perdana Menteri. Mereka yang berjuang secara gigih untuk memerdekakan Republik Demokratik Kongo (RDK), akhirnya menamakan Republik Demokratik Kongo (RDK) sebagai *Congo-Leopoldville*. Namun yang pada perjalanan kariernya, Lumumba disingkirkan karena Lumumba menjadi tangan kanan Uni Soviet, sehingga dibenci Amerika Serikat.⁶² Krisis yang semakin menjadi membuat tentara multinasional PBB diminta untuk menjadi penengah. Tahun 1964, *Morse Tshombe* diangkat sebagai Perdana

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakkar, *loc.cit.*

⁶¹ "Kerawanan Konflik di Afrika", *loc.cit.*

⁶² *Ibid.*

Menteri, dan pada pemilu tahun 1965, Tshombe memenangkannya, namun dikudeta oleh *Letnan Jendral Mobutu Sese Seko*, pada gilirannya, beliau mendeklarasikan diri sebagai Presiden.⁶³

A.2.2 Pemerintahan Mobutu Sese Seko

Pada masa Mobutu, Zaire yang saat ini dikenal dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) mendukung junta militer Okello⁶⁴ yang ada di Uganda. Setelah Mobutu berkuasa, Republik Demokratik Kongo (RDK) relatif damai dan stabil. Namun Mobutu dianggap oleh HAM internasional banyak melakukan praktek pelanggaran hak azasi manusia, represif dan korupsi (mempunyai rekening di bank Swiss sebesar US \$ 4 miliar).⁶⁵ Pada awal kekuasaannya, Mobutu merubah nama ibukota Leopoldville menjadi Kinshasa, Stanleyville menjadi Kisangani dan Elisabethville menjadi Lubumbashi. Dan puncaknya pada tahun 1971, Mobutu merubah *Congo-Leopoldville* menjadi *Republic of Zaire*. Bersamaan dengan hancurnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, Mobutu melonggarkan pemerintahannya. Mobutu Sese Seko dikenal dengan pemerintahan yang diktator. Mobutu bertindak tidak adil terhadap suku atau etnis yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) Mobutu melakukan tindakan diskriminasi terhadap suku Tutsi yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK), yang pada akhirnya mereka membentuk kelompok pemberontak untuk menggulingkan Mobutu. Pada akhirnya etnis Tutsi membentuk perlawanan dengan mendapat dukungan dari etnis Tutsi pendatang dan yang berdomisili di Rwanda dan Burundi.

Pemerintahan Mobutu yang tidak stabil dan sering bertindak diskriminatif tidak disukai rakyat, namun tetap dapat bertahan selama kurang lebih 32 tahun. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Mobutu mendapat dukungan dari negara barat terutama Amerika.⁶⁶ Pemerintahan Mobutu dinilai gagal dalam

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Tito Okello adalah bekas komandan Angkatan Darat Obote yang telah berhasil menggulingkan kekuasaannya tanggal 27 Juli 1985. Dr. A.M Obote diangkat menjadi Presiden Uganda setelah Kabaka Mutesa II wafat. Obote mengubah Uganda dari Federal menjadi Republik. Obote tampil sebagai pembimbing presiden yang sukses untuk Idi Amin dan Yoweri Museveni. Ia disebut sebagai Bapak kemerdekaan Uganda.

⁶⁵ "Kerawanan Konflik di Afrika", *loc.cit*.

⁶⁶ *Ibid*.

menyelesaikan konflik yang telah lama berlangsung di Republik Demokratik Kongo (RDK). Mobutu membantu etnis Hutu dengan cara mengusir etnis Tutsi yang mendominasi wilayah Timur Republik Demokratik Republik Demokratik Kongo (RDK). Mobutu menggerakkan militernya dan Gubernur Propinsi Kivu untuk mengusir dan membantai etnis Tutsi agar segera keluar dari Republik Demokratik Kongo (RDK) dalam jangka waktu satu minggu.⁶⁷ Untuk menumbangkan pemerintahan Mobutu, etnis Tutsi membentuk kelompok untuk melawan politik yang dilakukan Mobutu. Mereka bergabung dengan etnis Tutsi yang ada di Rwanda dan Burundi. Pada saat ini muncul sosok Laurent Kabila sebagai pemimpin pemberontakan yang berkoalisi dengan dukungan dari luar negeri seperti : Burundi, Angola, Rwanda dan Uganda membentuk ADFL (*Aliantie Democratie Front Liberal*). Kudeta ini akhirnya membawa Laurent Kabila menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) pada bulan April 1997.

A.2.3 Pemerintahan Laurent Kabila

Pada tahun 1996, muncul perang saudara di Zaire⁶⁸ yang menewaskan banyak manusia, dan pada akhirnya pemberontak yang dipimpin oleh Laurent-Disire Kabila berhasil menguasai Zaire pada bulan Mei 1997, dan merubah nama *Republik of Zaire* menjadi *Democratic Republic of The Congo*. Walaupun Laurent Kabila telah berkuasa, pemberontakan tetap terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK). Para pemberontak yang didukung oleh Rwanda, Burundi dan Uganda, pada akhirnya mengundang pasukan penjaga perdamaian yang beranggotakan Zimbabwe, Angola, Namibia, Chad dan Sudan.

Bersamaan dengan kondisi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang tidak stabil itulah menjadi kesempatan bagi Laurent Kabila muncul sebagai pemimpin pemberontakan. Kabila membentuk sebuah pasukan yang dinamakan ADFL (*Aliantie Democratie Front Liberal*) yang mendapat dukungan dari etnis Tutsi dan Rwanda. Hubungan baik yang terjalin antara Presiden Uganda Yoweri Museveni dengan pemimpin pemberontak Laurent Kabila membawa hubungan

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Sekarang dikenal dengan nama Republik Demokratik Kongo (RDK).

Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) menjadi buruk. Hubungan tersebut menimbulkan kepentingan masing-masing untuk mencapai tujuannya. Laurent Kabila mengajak Museveni untuk bekerjasama. Uganda yang menghadapi ancaman dari pasukan Sudan yang ingin memasuki wilayah Uganda dan munculnya *Lord's Resistance Army (LRA)*, sedangkan kepentingan Kabila memiliki kepentingan untuk menggulingkan kediktatoran Mobutu Sese Seko. Gerakan *ADFL (Aliantie Democratie Front Liberal)* dibawah pimpinan Kabila akhirnya berhasil membawa Kabila menjadi Preiden Kongo pada tahun 1997. Dengan cara kudeta akhirnya rezim Mobutu SeseSeko tumbang. Pasukan Uganda menyalurkan senjata kepada kelompok bersenjata dan melakukan pelanggaran serius di bagian timur Kongo Republik Demokratik Kongo (RDK). Pasukan Uganda juga menggunakan kesempatan yang labil ini untuk menjarah sumber daya alam milik Republik Demokratik Kongo (RDK).

A.2.4 Pemerintahan Joseph Kabila

Joseph Kabila yang menggantikan ayahnya Laurent Kabila menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Kongo.⁶⁹ Pengangkatan ini juga dianggap sebagai dimulainya sistem monarki, yang jelas tidak disukai rakyat, terutama kelompok pemberontak, *The Congolese Rally for Democracy*, yang menguasai separuh negara. Joseph Kabila tidak memiliki pengalaman politik. Dia mendapat pelatihan militer di Cina setelah ayahnya merebut kekuasaan pada 1997. Namun, dia dipanggil pulang saat meledak perang saudara pada Agustus 1998. Dan ayahnya langsung memberinya pangkat jenderal.⁷⁰ Presiden Republik Demokrasi Kongo (RDK) Joseph Kabila hari Sabtu tanggal 14 April 2001 mengumumkan sebuah kabinet baru untuk menggantikan kabinet yang dibubarkannya, dengan hanya menyisakan sedikit dari sekutu almarhum ayahnya, Laurent Kabila.⁷¹ Dari pemerintahan yang lama hanya empat dari 25 anggota

⁶⁹ *Tewasnya Laurent Kabila*, <http://liputan6.com/luarnegeri>. Tanggal akses: 29 Maret 2009.

⁷⁰ *"Kabila Tewas, Anaknya Menggantikan"*, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2001/01/22/LN/mbm.20010122.LN77092.id.html>. Tanggal akses : 16 April 2009.

⁷¹ *"Kabinet Baru Kabila Terbentuk"*, <http://www2.kompas.com/kompascetak/0104/16/LN/kabi03.htm>.

pemerintahan lama yang tetap memegang jabatannya dalam daftar kabinet baru, yang diumumkan tanpa komentar resmi.

Pada awal ia menjabat sebagai presiden Joseph Kabila mengizinkan penempatan pasukan PBB dan mengurangi kehadiran pasukan Rwanda dan Uganda di Republik Demokratik Kongo (RDK). Ia melakukan dialog nasional yang mengikutsertakan pemerintah dan faksi-faksi pemberontak. Kehadiran Joseph Kabila menjadi pengganti Laurent Kabila sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak didukung oleh banyak pihak. Uganda menilai bahwa Joseph Kabila adalah bagian dari masalah yang belum terselesaikan di Republik Demokratik Kongo (RDK), karena itulah ia harus mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK). Hal ini didukung oleh pemerintahan Rwanda yang juga menilai bahwa Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak akan mencapai perdamaian jika Joseph Kabila menjadi Presiden. Pemerintahan Joseph Kabila ini mendapat perlawanan dari kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Bemba⁷² dengan dukungan Uganda.

Joseph Kabila memperlihatkan kemauan yang lebih besar untuk berdamai dari pada ayahnya, mencapai kesepakatan di mana semua pihak menarik pasukannya, memungkinkan dikirimnya pasukan PBB untuk melindungi pengamat dan memulai dialog nasional. Pada masa pemerintahannya, Joseph Kabila mengambil langkah untuk mencoba berdamai. Ia melakukan perundingan damai di Afrika Selatan dengan para pemberontak. Hadir dalam perundingan tersebut Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki, fasilitator *Inter Congolese Dialogue* Ketumile Misire, dan para delegasi dari *Movement Pour La Du Congo* (MLC), *Rassemblement Congolais Pour la democratie* (RCD – Goma) serta pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK).⁷³ Kesepakatan antara MLC yang dipimpin oleh Bemba dengan dukungan Uganda dan pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah dengan menjadikan Bemba sebagai Perdana Menteri sedangkan Joseph Kabila tetap menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK). Kesepakatan ini sebelumnya telah dibicarakan pada

Tanggal akses: 18 April 2009.

⁷² Bemba adalah seorang tokoh pendiri MLC (*Movement Pour la Liberation du Kongo*). Gerakan pemberontak yang didukung oleh Uganda. Untuk lebih lengkapnya lihat pada bab IV.

⁷³ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakkar, 1996-1997, *op.cit.*, hal : 21.

perundingan di Sun City pada tanggal 17 April 2002 namun dengan dukungan Rwanda akhirnya perundingan tersebut ditolak.⁷⁴

Adanya perselisihan antara pemberontak yang didukung Uganda dan Rwanda maka dibuatlah proses perdamaian pada tanggal 26 April 2002 dengan ditanda tangannya *Common Understanding* antara Uganda dan Rwanda mengenai proses perdamaian di Republik Demokratik Kongo (RDK). Pada akhirnya tanggal 6 September 2002 akhirnya ditandatangani persetujuan damai bilateral antara Museveni dengan Joseph Kabila. Hal ini juga dilakukan untuk menciptakan suatu keamanan wilayah yang stabil di wilayah Afrika. Menurut Joseph Kabila persetujuan damai tersebut merupakan cara untuk mengakhiri konflik yang melibatkan kedua negara, yaitu Republik Demokratik Kongo (RDK) dinegara Uganda. Sedangkan menurut Museveni selaku Presiden Uganda persetujuan damai tersebut hanyalah sebagai langkah politik untuk menunjukkan bahwa rakyat Uganda dan negara lainnya menginginkan perdamaian. Perdamaian tersebut mendapat sikap pesimis dari Honore Kadima dan Kelompok *Rassemblement Congolais Pour la democratie – Kisangani Mouvement de Liberation*. Mereka pesimis dengan apakah Uganda akan mematuhi kesepakatan tersebut mengingat telah banyak keterlibatan pasukan Uganda di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan penjarahan sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK) seperti emas dan intan yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) oleh pasukan Uganda. Pernyataan pesimis tersebut juga mendukung penilaian Museveni terhadap perjanjian damai Uganda.

Isi dari persetujuan damai tersebut meliputi :⁷⁵

1. Penarikan mundur pasukan Uganda dari wilayah utara Republik Demokratik Kongo (RDK). Uganda diberikan kesempatan selama 5 hari setelah tanggal penandatanganan persetujuan tersebut untuk menarik mundur sisa pasukannya dari dua daerah yang sebelumnya telah dilakukan penarikan mundur pasukan Uganda sebanyak 2000 tentara yaitu Beni dan Gbadoloite.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Departemen Luar Negeri Direktorat Afrika, "*Demokrasi Kongo*", Jakarta, Desember 2004. Hal : 21.

2. Uganda memiliki waktu 100 hari untuk menyelesaikan penarikan mundur 2 batalyon dari kota bermalah yaitu Bunia yang terletak di bagian timur laut Republik Demokratik Kongo (RDK) dan selama itu juga Uganda PBB meminta Uganda untuk tetap melindungi keamanan para penduduk sipil dengan tidak melakukan tindakan yang mengancam kehidupan masyarakat sipil.

3. Normalisasi hubungan bilateral antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK). Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) sepakat melakukan penarikan mundur pasukan memiliki tujuan agar tercapainya perdamaian yang abadi dan normalisasi hubungan kedua negara yang akan memperkuat kerjasama diberbagai bidang dengan hasil saling menguntungkan.

Persetujuan damai yang disaksikan oleh sejumlah pejabat PBB dan Duta besar asing setempat, sebenarnya melanjutkan MOU tentang penarikan pasukan Uganda dan mekanisme normalisasi hubungan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Uganda, James Waapkabolo dengan Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo (RDK), Katumba Muanke pada tanggal 14 – 15 Agustus 2002 dibawah mediasi Menteri Luar Negeri Angola, Joao Miranda.

Di dalam pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK) sendiri Joseph Kabila yang merupakan mantan kepala staf Angkatan Darat melakukan pemberhentian menteri-menteri, seperti Menteri Dalam Negeri Gaetan Kakudji, Menteri Negara Victor Mpoyo, dan Menteri Pendidikan Abdoulaye Yerodia. Sedangkan yang mereka yang tetap dalam kabinet adalah Menteri Luar Negeri Leonard She Okitundu, yang dipuji di dalam dan di luar Republik Demokratik Kongo (RDK) karena penanganannya atas perundingan perdamaian selama perang dua setengah tahun terhadap pemberontak yang didukung Uganda dan Rwanda.⁷⁶ Kabila memecat seluruh anggota kabinetnya, dalam sebuah langkah

⁷⁶ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/29/IATIM/284610.htm>, *op.cit.*

yang dipandang di sini sebagai suatu tanda presiden berusia muda itu semakin percaya diri memimpin negara Afrika tengah yang luas, yang mulai beringsut menuju perdamaian itu. Setelah dia memecat kabinet yang diwariskan dari ayahnya, Joseph menjanjikan untuk memilih sebuah tim baru yang akan membawa perdamaian, kemakmuran dan demokrasi ke Republik Demokratik Kongo (RDK), negara nomor tiga terbesar di Afrika itu. Orang-orang yang dipilih Joseph Kabila bukanlah orang yang dikenal semasa ayahnya, Laurent yang menggulingkan diktator Mobutu Sese Seko pada tahun 1997 dengan bantuan Rwanda dan Uganda, namun kemudian pecah persekutuan dengan mantan teman-temannya itu. Rwanda dan Uganda melanggar masuk Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk membantu gerakan pemberontak yang baru. Zimbabwe, Angola, dan Namibia ikut serta dalam peperangan di wilayah luas yang kaya bahan tambang itu pada pihak Kabila.

Negara yang terletak di Afrika Tengah itu kembali muncul setelah Kabila gagal memenangi suara mayoritas dalam pemilu presiden yang pertama kali digelar selama 45 tahun terakhir. Padahal Republik Demokratik Kongo (RDK) mulai merasakan hidup damai sejak perang sipil pada tahun 1961. Kubu pendukung setia Bemba diyakini menjadi pihak yang memulai baku tembak. Pendukung setia Bemba kecewa dengan hasil sementara pemilihan umum presiden. Kedua kandidat calon presiden Kabila dan Bemba harus maju ke putaran kedua, 29 Oktober, karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapat dukungan suara lebih dari 50 persen. Kabila mendapat 44,8 persen dan Bemba yang memiliki latar belakang sebagai mantan pemimpin gerilyawan 20 persen.⁷⁷

Ancaman sosial yang dirasakan Uganda dari konflik bersenjata yang menimbulkan gelombang pengungsian ini adalah adanya konflik perbatasan yang merupakan dampak dari gelombang pengungsian yang tinggi ke negara tetangga yang langsung berbatasan dengan negara tersebut dapat mengikis identitas masyarakat asli daerah tersebut. Dengan terjadinya perkawinan antara penduduk asli Uganda dengan pengungsi dapat menghilangkan suku atau etnis penduduk Uganda baik pengungsi atau masyarakat asli negara Uganda.

⁷⁷ Lihat "Situasi Kongo Masih Tegang", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/24/ln/2901599.htm> . Tanggal akses: 16 April 2009.

A.3 Keberadaan Rwanda dalam Konflik antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK)

Keberadaan Rwanda dalam konflik antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah ketika Rwanda bergabung dengan Uganda untuk membantu gerakan kaum pemberontak Laurent Kabila yang ingin menggulingkan Mobutu Sese Seko. Republik Rwanda sendiri adalah sebuah negara di Afrika bagian tengah yang berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo, Uganda, Burundi dan Tanzania. Rwanda sendiri adalah sebuah negeri berpenduduk 7,4 juta jiwa dan merupakan negara terpadat di Afrika Tengah. Penduduk pribumi terdiri dari tiga suku: Tutsi, yang merupakan orang-orang dusun yang tiba di Rwanda sejak abad ke-15; Hutu, yang merupakan suku mayoritas penduduk Rwanda, yang pada tahun 1959, suku Hutu membentuk strata dominan di bawah sistem feodal yang berdasarkan pada kepemilikan ternak; dan Twa adalah suku yang dipercayai sebagai suku yang tersisa dari suku pertama di Rwanda. Orang Twa dianggap yang tertua, lalu orang Hutu dan kemudian Tutsi.

Di Rwanda pada tahun 1994 terjadi pembantaian yang menelan korban hingga 1 juta jiwa.⁷⁸ Pembantaian di Rwanda, yang di dunia internasional juga dikenal sebagai genosida Rwanda, adalah sebuah pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok suku Hutu ekstrim yang dikenal sebagai Interahamwe terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994.⁷⁹ Interahamwe adalah sebuah organisasi militer Hutu. Pemberontak ini berdiri selama pemerintahan Hutu, sebagian besar penduduk Hutu juga keluar Rwanda ke timur Republik Demokratik Kongo (RDK). Kelompok ekstrim Hutu berencana memusnahkan suku Tutsi dari Rwanda. Kelompok ini berperan penting dalam pembantaian etnis. Pembantaian etnis itu baru berhenti ketika RPF yang dipimpin Kagame sebagai Presiden Rwanda menguasai Kigali dan mengusir pemerintahan ekstremis pada 4 Juli 1994. Presiden Republik Rwanda Paul Kagame menuturkan, "Jika berkaitan dengan keamanan negara, kami tidak akan berkompromi. Kami harus menolak kelompok apa pun yang mengganggu negara kami. Kami harus melawan mereka seperti yang pernah kami lakukan." Sejak diusir dari Rwanda,

⁷⁸ *Pembantaian Etnis*, <http://www2.kompas.com/kompascetak/0407/06/ln/1130019.htm>. Tanggal Akses : 28 Juni 2009.

⁷⁹ *Ibid.*

kelompok bersenjata itu pindah ke Republik Demokratik Kongo (RDK).

Masuknya Rwanda dalam konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah ketika Rwanda bergabung dengan Uganda untuk mengirimkan pasukan dan perlengkapan persenjataan dengan tujuan mendukung pemberontakan Laurent Kabila untuk menjatuhkan kepemimpinan Mobutu Sese Seko sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) pada saat itu. Pemberontakan Laurent Kabila tersebut tidak hanya mendapat dukungan dari Uganda dan Rwanda, tetapi juga mendapat dukungan dari Burundi dan Angola.

A.4 Masuknya Uganda ke dalam Konflik Internal di Republik Demokratik Kongo (RDK)

Konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang belum dapat terselesaikan pada masa Pemerintahan Mobutu Sese Seko membuat Laurent kabila melakukan kudeta yang akhirnya menumbangkan pemerintahan Mobutu. Laurent Kabila dibantu oleh Uganda dalam menumbangkan pemerintahan Mobutu yang terkenal diktator. Uganda melakukan hal tersebut dengan melihat kegagalan Mobutu menghentikan permasalahan yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) akan memberi dampak bagi wilayahnya. Banyaknya pengungsi yang menjadi dampak atas konflik etnis di Republik Demokratik Kongo (RDK) memberikan respon keras terhadap kedaulatan wilayah Uganda yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Uganda merasakan hal tersebut akan menghilangkan sebuah identitas bangsa dan negara seperti etnis, bahasa, agama maupun kepercayaan masyarakat Uganda. Inilah yang membawa Uganda untuk ikut campur tangan dalam permasalahan yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK). Uganda membantu Laurent Kabila yang merupakan lawan politik Mobutu. Laurent Kabila membentuk kelompok pemberontakan untuk menumbangkan Mobutu yang anggotanya terdiri dari etnis Tutsi Rwanda. Brigadir Jenderal James Kazini yang merupakan komandan dari *Ugandan People's Defence Force* (UPDF) melatih pengungsi menguasai keterampilan

militer dan membentuk milisi sipil.⁸⁰ Pasukan ini mendapat dukungan penuh dari Uganda untuk menyerang Republik Demokratik Kongo (RDK) membantu Laurent Kabila menjatuhkan kekuasaan Mobutu Sese Seko. Kondisi negara yang dilemahkan secara ekonomis, sosial dan militer, kemampuan negara untuk memberi rasa aman kepada rakyatnya, mempertahankan keutuhan negara serta membela diri dari ancaman keamanan dalam dan luar negeri pun semakin susut.

Respon politik Uganda dengan didukung oleh kegagalan dan kediktatoran Mobutu melahirkan sebuah kerjasama politik antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK). Museveni melakukan tawar menawar politik dengan Laurent Kabila sebagai kebijakan luar negeri Uganda atas kepentingan nasionalnya dalam menyelesaikan konflik yang ada di Uganda demi menjaga kestabilan politik dan wilayahnya. Kondisi dalam negeri sebuah negara secara langsung akan mempengaruhi politik luar negerinya dan jika kondisi dalam negeri buruk maka akan membawa negara tersebut menjadi keuntungan bagi pihak yang ingin merusak sebuah kedaulatan negara. Tawar menawar yang dilakukan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) menghasilkan sebuah kesepakatan dimana Museveni harus membantu Laurent Kabila untuk menumbangkan pemerintahan Mobutu dan Laurent Kabila membantu Museveni melawan pasukan Sudan.

Perjuangan Laurent Kabila untuk menumbangkan kekuasaan Mobutu Sese Seko mendapat dukungan penuh dari negara tetangga. Sebagai negara tetangga, Angola, Rwanda, Burundi, dan Uganda bergabung menjadi sekutu Kabila dalam menumbangkan rezim Mobutu. Dengan dukungan yang besar tersebut, Kabila dengan cepat memperluas wilayah kekuasaannya. Perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh Laurent Kabila tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti dari pasukan militer Mobutu. Laurent Kabila menduduki kota yang terkenal dengan tambang berliannya, yaitu kota Shaba dengan Lumbumbashi.⁸¹ Kerjasama yang baik antara Laurent Kabila dengan Uganda berjalan sangat baik dalam menumbangkan Mobutu. Dalam menghadapi konflik yang ada langkah-langkah yang diambil para penguasa Afrika seringkali justru menimbulkan kompleksitas permasalahan seperti mengundang kekuatan asing untuk

⁸⁰ "Situasi Kongo Masih Tegang", *loc. cit.*

⁸¹ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, *loc. cit.*

menyelesaikan masalah internal yang mengakibatkan berbagai masalah baru. Kekuatan asing seringkali muncul jika diminta oleh pihak dalam negeri semisal pemerintahan yang sah untuk membantu menumpas oposan, belum lagi jika para oposan juga memanggil kekuatan asing untuk campur tangan menggulingkan penguasa yang berkoalisi dengan kekuatan asing (biasanya negara penjajah) maka justru permasalahan semakin rumit. Para penguasa Afrika tidak segan mengeluarkan biaya untuk membiayai perang maupun pasukan asing dibanding untuk membangun infrastruktur negara yang sangat penting bagi negara-negara berkembang seperti di Afrika.

Setelah tumbanganya pemerintahan Mobutu, pada tahun 1997 Laurent Kabila menjadi pemimpin Republik Demokratik Kongo (RDK) dan melanjutkan politik Uganda dalam menyelesaikan konflik internalnya. Laurent Kabila gagal dalam menyelesaikan konflik internal yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK). Dia juga telah gagal memberikan jaminan keamanan disepanjang perbatasan. Pada tanggal 2 Agustus 1998 Uganda menyerang Kongo dengan bantuan Rwanda. Banyaknya pemberontak di Republik Demokratik Kongo (RDK) semakin menambah kecewa Uganda terhadap pemerintahan Laurent Kabila. Museveni mengirim pasukannya ke Kongo untuk menghentikan genosida terhadap orang-orang Banyumungele di Republik Demokratik Kongo (RDK). Museveni mengirimkan pasukannya di sebelah barat perbatasan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk mendukung pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK) yaitu *Mouvement de Liberation du Kongo* (MLC) yang berusaha menggulingkan pemerintahan Laurent Kabila. Uganda secara ilegal menyalurkan senjata kepada kelompok tersebut dan melakukan pelanggaran serius di bagian timur Republik Demokratik Kongo (RDK) seperti pemerasan, penganiayaan, pembunuhan, dan melakukan teror terhadap warga sipil di Republik Demokratik Kongo (RDK).⁸²

Laurent Kabila melakukan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam mengelola negara Republik Demokratik Kongo (RDK). Dia juga memerintahkan pasukan asing untuk keluar dari wilayah Republik Demokratik Kongo (RDK), yang membuatnya dalam waktu singkat harus kehilangan dukungan dari negara

⁸² Lihat "Pasukan Uganda Secara Ilegal Menyalurkan Senjata Kepada Pemberontak", http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/HR05_ham.html. Tanggal akses: 10 April 2009.

lain. Neo realis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara menilai keadaan perbatasan semakin rawan dan akan mengancam identitas, kedaulatan negara dan politik pemerintahan Uganda. Uganda merespon konflik yang ada dengan tindakan kejam, militer Uganda melakukan pembunuhan dan menghancurkan desa-desa di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan semakin memicu konflik etnik di Republik Demokratik Kongo (RDK). Uganda terlibat dalam pelatihan prajurit anak-anak. Anak-anak secara aktif dijaring untuk menjadi anggota angkatan perang.⁸³ Anak-anak yang berpotensi direkrut para kelompok pengacau keamanan sebagai tentara atau milisi dan karena usianya yang muda, mereka lebih siap terjun ke dalam kancah perang. Dalam membuat suatu kebijakan politik maupun kebijakan luar negeri, dapat dilakukan dengan memfokuskan pada yang terbaik adalah yang memfokuskan pada struktur sistem, hal ini karena dengan melihat bagaimana suatu sistem itu dapat dibentuk ataupun dihasilkan dengan melihat struktur yang dibentuk untuk sebagai salah satu pembuat kebijakan dan untuk unit-unit yang berinteraksi, dapat diartikan bahwa unit-unit yang melakukan interaksi dapat membantu menyelesaikan konflik atau dapat memperuncing konflik, disini dapat diartikan siapa saja unit yang berinteraksi akan mempengaruhi pola tingkah laku suatu negara.

Dalam masalah yang terjadi antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) secara neo realis yang melibatkan militer bersenjata dapat diartikan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, yang keberadaannya ikut campur tangan kedalam sebuah konflik menyebabkan sebuah konflik yang ada menjadi semakin rumit. Masuknya campur tangan negara lain yang melibatkan tokoh-tokoh sentral memiliki kendali terhadap militer di negara-negara Afrika Tengah yang dengan mudah dapat menggerakkan militer untuk ikut dalam sebuah konflik. Hal ini seperti yang telah dijabarkan bahwa siapa saja yang berinteraksi secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi konflik yang ada beserta kebijakan negara Uganda. Pemberontakan Republik Demokratik Kongo (RDK) tersebut mendapat bantuan dari Uganda dan Rwanda yang tergabung

⁸³ Lihat " *HIV/AIDS Sama Menakutkannya dengan Terorisme*", <http://pusdiknakes.or.id/pdpersi/?show=detailnews&kode=933&tbl=artikel>. Tanggal akses : 10 April 2009.

dalam RCD (*Rassemblement Congolais Pour la Democratie*) dan MLC (*Mouvement Pour la Liberation du Kongo*). Disinilah Uganda masuk dengan memanfaatkan situasi Republik Demokratik Kongo (RDK). Dengan dukungan Presiden Uganda Yoweri Museveni, Bemba yang merupakan seorang mantan pemimpin kelompok pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK) mendirikan gerakan pemberontak MLC (*Mouvement Pour la Liberation du Kongo*) tahun 1998.

Dalam beberapa bulan saja Bemba berhasil menduduki bagian utara Republik Demokratik Kongo (RDK). Dia menguasai penuh wilayah tersebut dan berpeluang mengubah milisinya menjadi satuan militer yang cukup besar.⁸⁴ Bemba mengubah gerakan pemberontaknya menjadi partai politik, dia muncul di arena politik sebagai wakil presiden. Setelah kalah dalam pilihan presiden tahun 2007 Bemba meninggalkan dunia politik.⁸⁵ Konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) di bawah politik Laurent Kabila berakhir dengan terbunuhnya Laurent Kabila oleh pengawalnya pada 16 Januari 2006 menimbulkan anarki di dalam negeri.⁸⁶ Pemerintahan ini kemudian dilanjutkan oleh anak dari Laurent Kabila yang bernama Joseph Kabila. Joseph Kabila yang baru berumur 29 tahun diangkat sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK).

⁸⁴ Sebastiaan Gottlieb, *Pemimpin Milisi Kongo Menghadap ICC: Kasus JeanPierre Bemba*, http://www.ranesi.nl/arsipaktua/hukum/milisi_kongo_icc080704. Tanggal akses: 12 September 2008.

⁸⁵ www.library.ohiou.edu. 2008. *op.cit.*

⁸⁶ Lihat "*Laurent Kabila dikabarkan Tewas*", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/29/TATIM/284610.htm>. Tanggal akses: 29 Maret 2009.

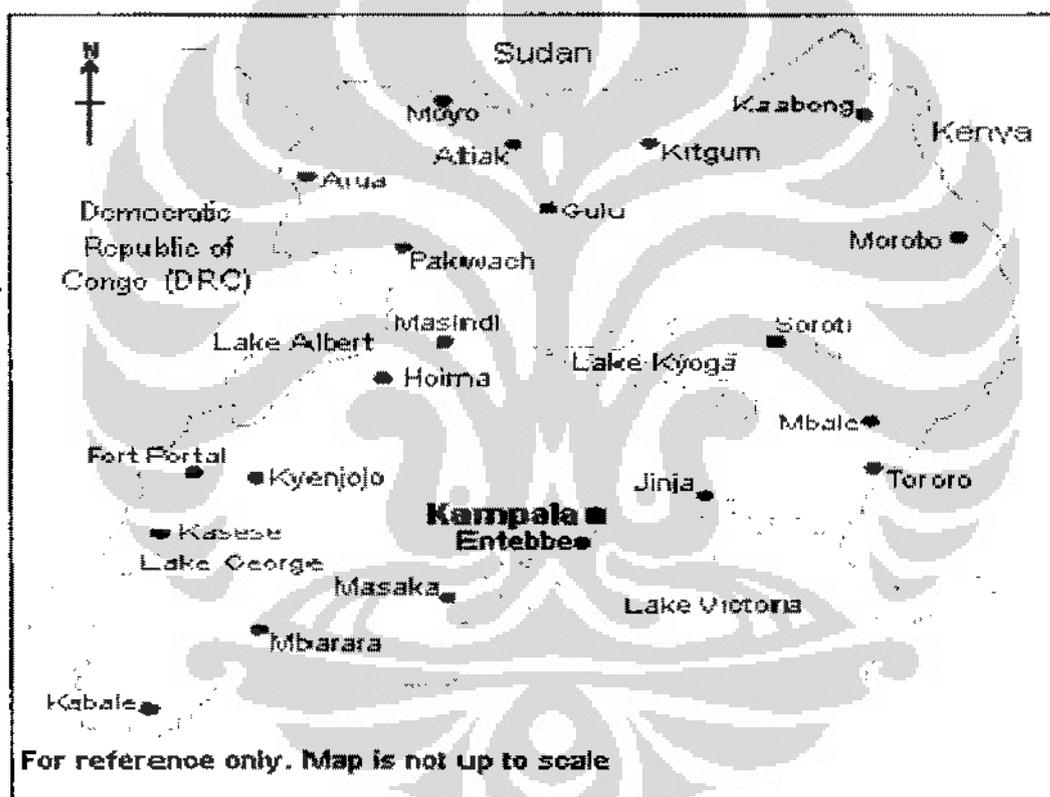
BAB III

KEPENTINGAN NASIONAL UGANDA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)

A. Kepentingan Nasional Uganda

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK), Uganda yang beribu kota Kampala dengan letak geografis memiliki banyak daerah perbatasan, yang salah satunya berada pada bagian Timur Afrika adalah merupakan Negara “*landlock*”.

Berikut peta negara Uganda :



Sumber : http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/uganda_pol_2005.jpg

Populasi Uganda mencapai 27,21 juta orang (menurut penghitungan Tahun 2005).⁸⁷ Uganda adalah suatu negara multi etnis, dan mempunyai sekitar 40 etnis (lihat peta etnis di Afrika pada gambar 2 di halaman lampiran gambar). Bahasa resmi Uganda adalah bahasa Inggris, dan menggunakan bahasa dialek Kiswahili dan Rwanda. Penduduk Uganda terutama menganut agama Katolik,

⁸⁷ Lihat “*Country Profile Uganda*”, Departemen Luar Negeri direktorat Afrika, Jakarta 2003.

Protestan dan Islam. Letak Uganda yang berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) di sebelah barat membuat Uganda merasa perlu menjaga keutuhan wilayahnya baik dari segi geografis maupun politik.

Museveni sebagai Presiden Uganda melakukan perlawanan keras terhadap segala ancaman yang mengancam kedaulatan negaranya juga keutuhan wilayahnya. Hal ini memiliki tujuan agar jika setiap negara selalu menjaga stabilitas keamanannya maka secara langsung hubungan dengan negara lain dapat berjalan dengan baik dan bagi Afrika sendiri dapat menciptakan kerjasama regional untuk menghadapi sebuah kerjasama internasional dengan negara-negara lainnya. Secara etnopolitik, dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi di Uganda dan Kongo dengan adanya konflik etnis menjadikan, etnis sebagai alat politik untuk mencapai tujuan negaranya. Perpecahan yang ada dengan berawal dari etnis melahirkan kelompok-kelompok pemberontak yang merasa kurang puas dengan suatu pemerintahan. Pecahnya suatu etnis dapat pula dikarenakan kesenjangan yang ada dan diskriminasi antar etnis. Kesenjangan tersebutlah yang melahirkan dorongan suatu kelompok etnis bekerjasama dengan kelompok yang terkucilkan dengan membentuk suatu aliansi untuk melawan pemerintahan. Bila dilihat dari aspek keutuhan negara, kondisi sosol budaya yang bermasalah telah membawa keutuhan wilayah menjadi terancam. Museveni melihat apa yang terjadi sebagai sebuah ancaman bagi negaranya yang harus diselesaikan dengan segera.

Konflik internal yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) memberi dampak langsung terhadap Uganda dengan adanya pengungsian besar-besaran masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK) ke Uganda. Kondisi internal Uganda sendiri juga tidak dalam keadaan stabil. Perang diambil Uganda sebagai langkah terakhir setelah mencoba merespon konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan cara bekerjasama menyelesaikan konflik yang melibatkan etnis tersebut. Museveni mengambil kebijakan pertama dengan membantu Laurent kabila menjatuhkan Mobutu Sese Seko. Museveni berharap tawaran serta tujuan Laurent Kabila menjatuhkan Mobutu dapat membawa kondisi Kongo membaik dan perbatasan menjadi terkendali. Namun setelah tumbanganya Mobutu yang membawa Laurent Kabila menjadi Presiden yang berkuasa di Kongo tidak membawa kepuasan untuk Uganda. Kondisi Republik Demokratik Kongo (RDK)

yang semakin buruk dengan adanya tuduhan korupsi dan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan Laurent Kabila setelah menjabat sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) menjadikan Uganda merasa semakin terancam dan menambah rasa tidak yakin dengan pemerintahan Laurent Kabila. Uganda merasa kecewa dan tidak dapat menerima kegagalan jaminan keamanan wilayah perbatasan yang telah dijanjikan oleh Laurent Kabila sewaktu meminta bantuan kepada negara-negara tetangganya seperti Uganda dan Rwanda. Kepentingan nasional Uganda untuk mendapatkan dan menciptakan stabilitas keamanan negaranya terutama di wilayah perbatasan tidak kunjung tercapai. Kegagalan yang dilakukan Republik Demokratik Kongo (RDK) masa pemerintahan Laurent Kabila semakin membawa konflik internal di Republik Demokratik Kongo (RDK) sendiri menjadi tidak terselesaikan dan dampak terhadap Uganda sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) menjadi semakin terancam keamanan wilayahnya.

Penciptaan keamanan wilayah yang baik antar negara di Afrika seharusnya dapat terlaksana dengan baik jika masing-masing negara sadar akan keutuhan sebuah wilayah Afrika secara menyeluruh. Hal yang terjadi pada kenyataannya adalah, masing-masing negara berusaha untuk menjaga keutuhan dan keamanan wilayahnya sendiri. Kerjasama untuk menyelesaikan konflik hanya dipandang sebagai langkah politik untuk memberikan dampak yang baik bagi kepentingan nasional negara itu sendiri. Seperti halnya Uganda yang menciptakan keamanan wilayah hanya untuk menjaga keamanan, kestabilan politik dan keutuhan wilayah Uganda sendiri. Kesenjangan antar etnis dan antar kawasan yang ada adalah salah satu penyebab dan sumber permasalahan yang dapat menjelaskan berbagai pergolakan yang menuju pada disintegrasi bangsa. Berkaitan dengan apa yang terjadi di Uganda, timbulnya suatu etnopolitik dimana etnis sebagai media politik untuk mencapai sebuah kekuasaan dan kepentingan nasional membawa keberadaan etnonasionalis sebagai anak pemikiran politik dari etnopolitik menjadi ikut berperan. Dalam sebuah etnonasionalis kesatuan suatu wilayah menjadi terpisahkan kedalam sebuah kelompok-kelompok yang menghendaki pemisahan diri dari pemerintahan mereka.

Merespon kalangan institusionalis yang beranggapan bahwa institusi internasional memungkinkan negara meninggalkan keuntungan jangka pendek untuk meraih keuntungan jangka panjang. Uganda ingin keadaan perbatasan yang aman dan itu untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan jangka panjang yang dimaksud adalah Uganda memiliki kondisi yang aman di wilayah perbatasan sehingga Uganda dapat menyelesaikan permasalahan internal Uganda dengan tidak ada indikasi dari konflik diluar perbatasan Uganda. Menjaga sumber daya alam yang dimiliki Uganda dari ancaman pihak lain juga merupakan kepentingan nasional Uganda untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Uganda. Dalam geopolitik, faktor geografis menjadi hal penting yang sangat berperan dalam sebuah kebijakan politik. Kebijakan politik yang berdasarkan kondisi alam atau geografis di sebuah negara berdasarkan tujuan untuk memperluas wilayah dengan menguasai sumber daya alam suatu negara yang potensial sumber daya alamnya.

Konflik bersenjata yang terjadi antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) telah membuat ketergantungan pada bantuan luar negeri menjadi meningkat. Investasi asing dalam bidang perekonomian telah banyak meninggalkan Republik Demokratik Kongo (RDK) menyusul terjadinya ketidakpastian stabilitas keamanan dan minimnya infrastruktur di Republik Demokratik Kongo (RDK). Kelompok-kelompok pemberontakan dan elit militer Uganda menjual hampir 30% dari total nilai eksport formal pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK). Mereka secara teratur menjual permata dan emas yang ditambang di propinsi timur Republik Demokratik Kongo (RDK).⁸⁸ Kelompok pemberontak memanfaatkan pertikaian etnis sebagai alat untuk menguasai kekayaan alam yang dimiliki Republik Demokratik Kongo (RDK).

Uganda yang semula melibatkan diri dalam perang di Republik Demokratik Kongo (RDK) sudah tidak lagi atas kepentingan-kepentingan keamanan bagi masing-masing negara. Konflik bersenjata yang berkembang menjadi kepentingan-kepentingan penumpukan kekayaan pribadi para elite militer dan pelaku perekonomian perang. Eksploitasi ilegal yang dilakukan Uganda di bawah pasukan Bemba dilakukan dengan cara Uganda mengontrol area

⁸⁸ Dario Azzelini, *Kanzleiter*, 2005, *op.cit.*. Hal: 168.

di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan memonopoli wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, melakukan perdagangan sebagai tujuan untuk memperkaya jaringan Uganda juga memperluas wilayah kekuasaan Uganda.⁸⁹ Sesuai dengan laporan PBB tanggal 16 Oktober 2002 Uganda telah secara ilegal mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di Republik Demokratik Kongo (RDK).⁹⁰ Kekayaan alam yang terus terkikis memberi dampak pada warga sipil Republik Demokratik Kongo (RDK) menderita kelaparan, kekurangan gizi, dan tindak asusila akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh militer Uganda.

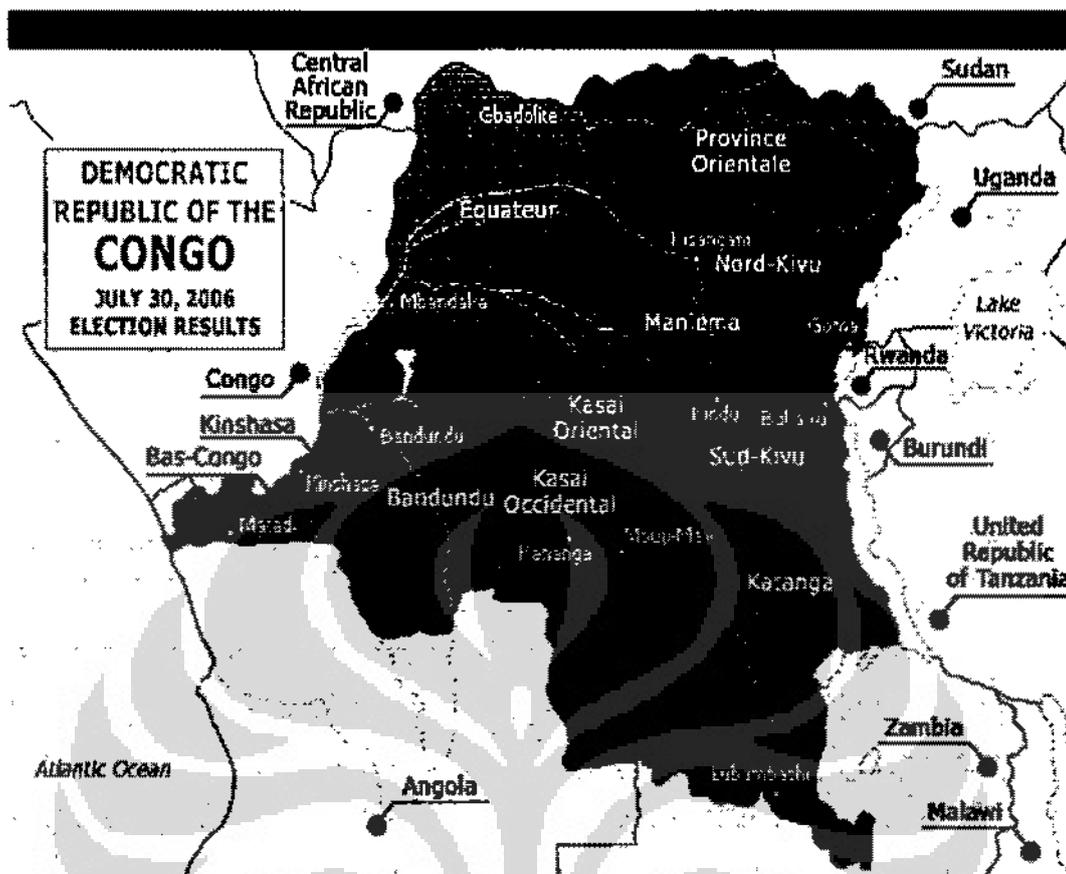
A.1 Arti Penting Sumber Daya Alam Bagi Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Uganda

Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah negara di kawasan Afrika Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, namun penerimaan negara tidak dapat meningkatkan kondisi perekonomiannya. Kondisi ini dikarenakan korupsi yang merajalela di Republik Demokratik Kongo (RDK) puncaknya masa pemerintahan Laurent Kabila. Sumber daya alam yang dimiliki kongo seperti cobalt, tembaga, cadmium, minyak bumi, industri batu mulia, emas, perak, seng, timah, dan lain-lain.⁹¹ Sektor perindustrian yang dimiliki Republik Demokratik Kongo (RDK) memiliki pertambangan seperti batu mulia, perkayuan, pembuatan bir, tekstil, sepatu, assembling sepeda dan sepeda motor juga ikut menjadi daya tarik bagi negara lain untuk berinvestasi ataupun menjadikan hal tersebut sebagai sasaran untuk memperluas atau menguasai sumber daya alam yang potensial. Republik Demokratik Kongo (RDK) memiliki tambang permata yang terdapat di propinsi Kasai dan Bandundu, ekspor permata ini merupakan hampir dari 30% dari total nilai ekspor formal yang dilakukan pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK). Berikut adalah peta Republik Demokratik Kongo (RDK) :

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Lihat "Uganda's Illegal Resource Exploitation In The Democratic Republic of The Congo (Part of UN Report)", http://www.afrol.com/countries/DRC/documents/un_resources_2002_uganda.htm. Tanggal akses : 18 April 2009.

⁹¹ Departemen Luar Negeri Indonesia, 2005, *op.cit*, Hal: 5



Sumber : <http://www.wtc.pbs.org/wnet/wpcontent/blogs.dir/2/files/2008/07/map2.gif>

Konflik yang berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (RDK) telah meningkatkan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Intervensi asing telah banyak meninggalkan Republik Demokratik Kongo (RDK) karena ketidakpastian stabilitas keamanan dan minimnya infrastruktur yang habis karena hancur oleh konflik bersenjata antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK). Kelompok-kelompok pemberontak MLC (*Mouvement Pour la Liberation du Kongo*) yang dipimpin oleh Bemba, mantan pemimpin kelompok pemberontak Republik Demokratik Kongo dan RCD (*Rassemblement Congolais Pour la Democratie*) beserta elit-elit politik militer Uganda menjual secara teratur permata dan emas yang di tambang di propinsi-propinsi timur Republik Demokratik Kongo (RDK).⁹² Kandungan alam yang menguntungkan di Republik Demokratik Kongo (RDK) memberikan sumbangan amat besar bagi perekonomian yang akhirnya juga sebagai pemicu perang, eksploitasi dan kekerasan. Meskipun situasi

⁹² Dario Azzellini, Kanzleiter, 2005, *op.cit.*, Hal: 168

Republik Demokratik Kongo (RDK) belum pulih perekonomiannya, tindakan eksploitasi masih terus terjadi. Para elit politik dari seluruh pihak yang terlibat konflik mulai menggunakan strategi baru untuk memelihara secara ketat arus sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK), sebagai akibat dari mundurnya kekuatan-kekuatan tempur mereka.⁹³

Kondisi geografis Uganda yang merupakan daerah *landlock* yang dikelilingi beberapa negara. Disebelah utara Uganda berbatasan dengan Sudan, sebelah selatan dengan Rwanda, timur dengan Kenya dan di sebelah barat dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Wilayah Uganda sendiri terbagi atas beberapa distrik, yang pada tahun 2002 terdapat 2002 distrik setelah pada tahun 1969 Uganda hanya terdiri dari 21 distrik.⁹⁴ Uganda merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Memiliki potensi pengembangan perlebahan yang sangat luar biasa, terutama di sebelah barat di propinsi Masindi District, Mid Western Uganda. Dari budidaya tersebut, petani Uganda mampu menambah penghasilan. Jika dikelola serius usaha ini dapat membantu pemerintah Uganda memerangi kemiskinan.⁹⁵

Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung ekonomi Uganda dengan hasil utamanya coklat, kopi, teh dan tembakau. Coklat itu sendiri merupakan komoditi ekspor utama Uganda dan dibidang industri non pertanian, Uganda memiliki assembling mobil dan tekstil, baja, semen dan pupuk. Industri tekstil Uganda memiliki kelemahan, yaitu kurangnya sumber daya yang memadai disamping modal serta teknologi Uganda.⁹⁶ Pada tahun 1999 sendiri perekonomian Uganda tidak menunjukkan sesuatu yang berarti. Dapat dilihat dari indikator ekonomi seperti nilai tukar mata uang, inflasi, tingkat suku bunga dan nilai-nilai lainnya yang belum stabil. Yang memberikan kemajuan untuk perekonomian Uganda adalah sumbangan positif dari sektor pertanian. Nilai tukar shilling Uganda terus melemah yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian

⁹³ ICG, Kivu, Hal: 3 dan 9 ; UNSC, final Report, Hal:5

⁹⁴ *The 2002 Uganda Population and Housing Census*,

<http://www.ubos.org/census%20tabulation?centableB1.pdf>. Tanggal akses : 8 Mei 2009.

⁹⁵ Lihat: *Afrika Akan Lebih Menderita Akibat Pemanasan Global*,

[Http://www.geografiana.com/dunia/ekonomi/afrika-akan-lebih-menderita-akibat-pemanasan-global](http://www.geografiana.com/dunia/ekonomi/afrika-akan-lebih-menderita-akibat-pemanasan-global). Tanggal akses: 24 September 2008.

⁹⁶ Departemen Luar Negeri Afrika, 2003, *loc.cit.*

Uganda.

Pada tahun 2002 perekonomian Uganda memburuk. Terlebih jika pemerintah Uganda terus menerus mengalokasikan anggarannya untuk keperluan militer Uganda baik dalam rangka menyelesaikan konflik internal yang ada maupun menumpas pemberontakan dan keterlibatannya dalam konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK). Faktor penentu keberhasilan perekonomian Uganda sendiri adalah perbaikan infrastruktur, terlaksananya program privatisasi dengan baik, pemberontakan korupsi dalam birokrasi serta terlaksananya komitmen negara-negara donor untuk membebaskan sebagian utang Uganda dan memberikan bantuan selama 3 tahun berturut-turut.

Uganda yang bertikai dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) secara ilegal telah mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di RDK. Terbukti dalam laporan *United Nations* (UN) tanggal 16 Oktober 2002, bahwa Uganda melakukan eksploitasi sumber daya alam dan memperoleh kekayaan dari Republik Demokratik Kongo (RDK). Dalam laporan akhir mengenai eksploitasi ilegal dan perolehan kekayaan dari Republik Demokratik Kongo (RDK) oleh Uganda telah melakukan eksploitasi tersebut dengan cara Uganda mengontrol daerah-daerah di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan memonopoli daerah yang memiliki sumber daya alam, melakukan perdagangan lintas perbatasan, dan memanipulasi pendapatan pajak.⁹⁷ Semua ini dilakukan Uganda untuk memperluas jaringan. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa bukanlah kebijakan resmi Uganda untuk mencuri sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK), pemerintah Uganda tetap tidak mampu untuk mencegah tentaranya melakukan penjarahan sumber daya alam di Republik Demokratik Kongo (RDK).

Dilihat dari segi ekonomi, di bidang perdagangan luar negeri (ekspor – impor) Uganda pada tahun 1996 hingga 1997 tercatat sebagai berikut :⁹⁸

- Total ekspor tahun 1996 : US\$ 665 juta (naik 20% dibandingkan tahun 1995)
- Total impor tahun 1996 : US\$ 729 juta (turun 20% dibanding tahun 1995)

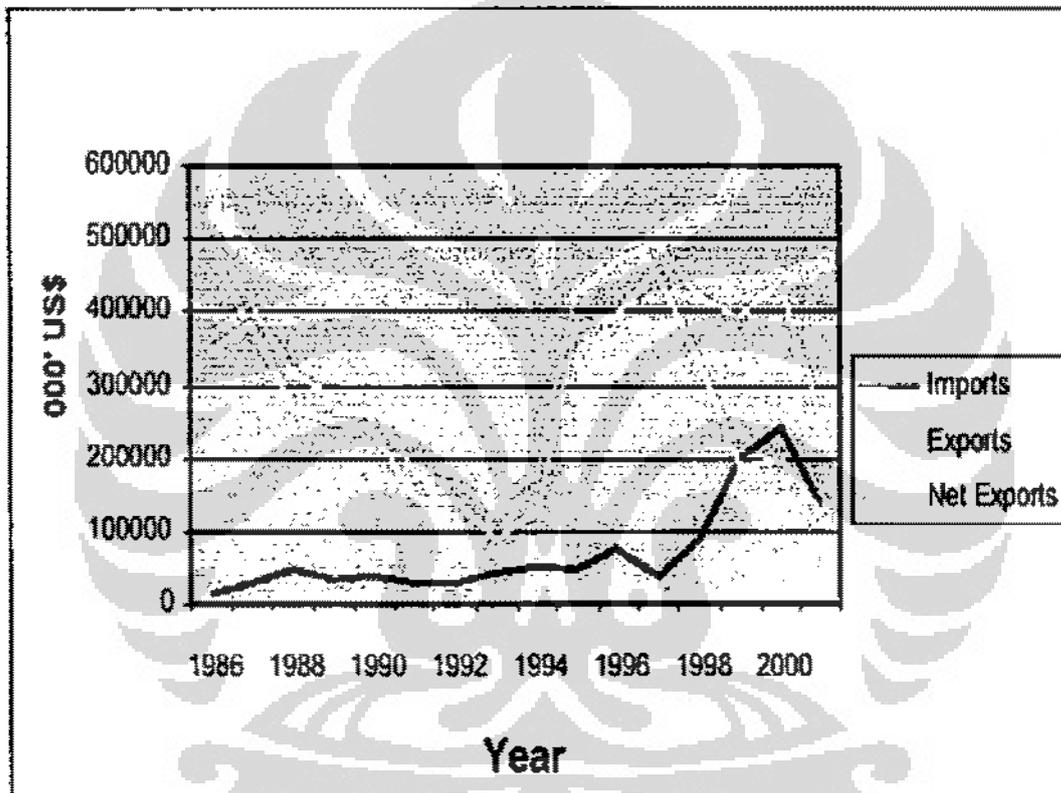
⁹⁷ http://www.afrol.com/countries/DRC/documents/un_resources_2002_uganda.htm. *op.cit.*

⁹⁸ Departemen Luar Negeri direktorat Afrika, Jakarta 2003, *loc.cit.*

1995)

- Komoditi utama ekspor Uganda tahun 1997 antara lain kopi (59%), ikan (5,8%), emas dan compound (7,41%), dan maize (2,68%), sisanya termasuk teh, kapas, dan lain-lain.
- Komoditi impor utama Uganda tahun 1997 antara lain mobil (15,84%), minyak (12,53%), obat-obatan (6,36%) dan emas juga baja (4,8%)

Berikut adalah grafik ekspor impor Uganda :



Sumber : www.fao.org/DOCREP/005/Y4632E/y4632e0t.jpg

Perekonomian Uganda turun tidak hanya pada tahun 2002 perekonomian Uganda pada tahun 1999 juga mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator ekonomi yang ada seperti nilai tukar mata uang seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain yang masih belum stabil. Sedangkan sektor ekonomi lainnya seperti manufaktur, transportasi dan sektor perbankan tidak pula memberikan kemajuan yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Uganda. Satu-satunya sektor ekonomi yang memberikan sumbangan positif bagi

kinerja ekonomi Uganda adalah sektor pertanian. Pada saat itu nilai tukar mata uang Uganda *shilling* terus melemah yang pada akhirnya mengakibatkan terpuruknya perekonomian Uganda. Berdasarkan APBN tahun 1999, ekonomi Uganda hanya sedikit mengalami gangguan akibat kekeringan yang berkepanjangan dan depresi nilai mata uang *shilling*. Ditambah bahwa rata-rata GDP tetap pada angka 7% meskipun ekspor yang dilakukan Uganda lebih kecil dari pada impor. Pendapatan dari sektor pajak tetap baik.⁹⁹

Ditengah buruknya situasi ekonomi, pemerintah Uganda siap menjual 51% saham Uganda Airlines (UA) kepada South Africa Airways (SAA). Faktor penentu keberhasilan ekonomi Uganda terletak pada perbaikan infrastruktur, terlaksananya program privatisasi dengan baik, pemberantasan korupsi dalam birokrasi Uganda serta terlaksananya komitmen negara-negara yang membantu Uganda untuk menyelesaikan sebagian utang Uganda dan memberikan bantuan selama 3 tahun berturut-turut.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK UGANDA DALAM KONFLIK BERSENJATA DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK)

Persetujuan damai bilateral antara Museveni dengan Joseph Kabila yang ditandatangani tanggal 6 September 2002 telah mendapatkan beragam reaksi penilaian politik dari kelompok pemberontakan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang didukung Uganda, antara lain :

- Jean Pierre Bemba, pemimpin "*The Movement de Liberation du Congo (MLC)*" menyatakan bahwa MLC menyambut baik persetujuan tersebut untuk menyambut penarikan mundur tentara asing dari RDK. Sebagai langkah mendukung penarikan mundur pasukan, Bemba mendesak agar Angola, Namibia dan Zimbabwe yang turut serta membantu Republik Demokratik Kongo (RDK) agar menarik mundur pasukannya.
- Honore Kadima dan kelompok *Rassemblement Congolais pour la Democratie – Kisangani Mouvement de Liberation (RCD – K – ML)* merasa pesimis apakah Uganda akan mematuhi perjanjian tersebut mengingat pasukan Uganda yang selama ini sudah terlanjur terlibat dalam penjarahan emas dan intan di Republik Demokratik Kongo (RDK) (daerah Ituri)
- Dewan Keamanan PBB menyambut tercapainya persetujuan tersebut, meskipun begitu PBB tetap menganggap perlu untuk mengirimkan pasukan PBB (MONUC) untuk melucuti senjata pemberontak. Hal ini karena melihat situasi kawasan Timur Republik Demokratik Kongo (RDK) semakin buruk.

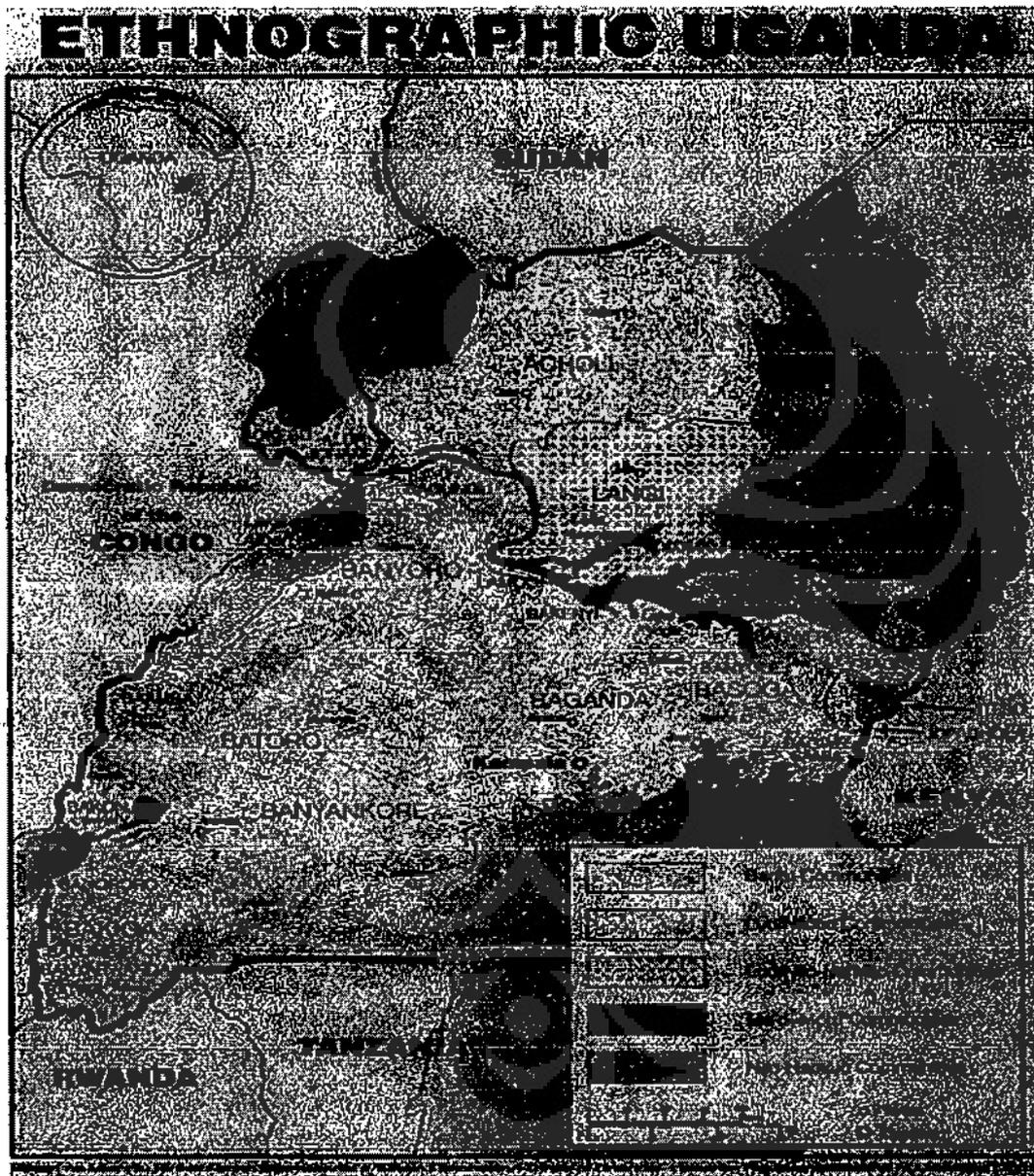
Berangkat dari kesepakatan yang ada antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) , kebijakan luar negeri Uganda selalu menempatkan

kepentingan nasional Uganda sebagai tujuan utama politik luar negeri Uganda. Dengan menjadikan konflik internal yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK), Uganda menggunakan kesempatan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) guna membantu memperbaiki kondisi perekonomian Uganda, menjaga kestabilan wilayah Uganda dengan meminta bantuan negara lainnya seperti Rwanda dan Uganda juga memiliki kepentingan nasionalnya dalam menjaga identitas bangsa dan negaranya. Uganda memperhatikan tentang keselamatan dan kelangsungan hidup negaranya, seperti yang dikemukakan kaum neo realis bahwa untuk menjaga keamanan dan keselamatan negaranya, sebuah aktor yang disini dimaksudkan sebagai pemimpin negara (presiden) membuat segala perilaku politik yang dirumuskan dalam kebijakan politik dipengaruhi oleh karakteristik pemimpin negara tersebut. Gaya dan pola pikir Museveni sebagai pemimpin Uganda akan mempengaruhi jalannya kebijakan politik Uganda.

Kepentingan nasional Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK) dirumuskan dalam kebijakan luar negeri Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK). Karena itulah Uganda yang melihat dampak dari konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) dimasa kepemimpinan Mobutu sebagai suatu ancaman politik dan sosial Uganda. Uganda menilai banyaknya pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang berada di Uganda lambat laun akan menghilangkan identitas bangsa dan negara Uganda. Terjadinya perkawinan antara pengungsi dengan penduduk asli Uganda terlebih dengan disertainya pernikahan antar etnis atau suku yang berbeda dapat menipiskan identitas dan kedaulatan wilayah Uganda. Uganda merasa terancam atas keberadaan pengungsi-pengungsi tersebut. Kedaulatan wilayah Uganda akan terkikis jika para pengungsi tersebut akan membentuk kelompok pemberontak yang melawan Uganda untuk kepentingan kelompok maupun negara Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan berkedok pengungsian. Pada kenyataannya kedua etnis yang bertikai di Republik Demokratik Kongo (RDK) memiliki keluarga yang tinggal di daerah perbatasan dan telah merencanakan untuk saling menyerang. Tidak hanya itu, para pemuda Uganda ada yang tertarik untuk

bergabung dengan salah satu etnis yang sedang bertikai di Republik Demokratik Kongo (RDK).¹⁰¹

Berikut adalah peta etnis Uganda :



Sumber : <http://www.c-r.org/our-work/accord/northern-uganda/images/uganda-political-map.jpg>

¹⁰¹ "Pengungsi Kongo Jadi Ancaman Keamanan Bagi Uganda Barat", <http://www.hupelita.com/cetakartikel.php>. Tanggal Akses : 1 Mei 2009

Dalam suatu konflik yang terjadi, pihak yang paling merasakan dampaknya bukanlah mereka yang terlibat langsung dengan konflik tersebut melainkan masyarakat sipil yang tidak bersalah dan tidak tahu mengapa perang harus terjadi. Banyaknya anak-anak yang dirampas masa kanak-kanaknya untuk bermain harus hilang oleh perang dan kekerasan. Anak-anak kerap dieksploitasi sehingga mengalami trauma psikologi, mental dan fisik karena kurang gizi, kekerasan fisik seperti penyiksaan. Perempuan-perempuan mengalami kekerasan seksual. Konflik yang tidak hanya melibatkan pemberontak dan pemerintah yang sedang berkuasa juga negara-negara tetangga ini telah menghabiskan banyak korban sipil. Pada dasarnya permasalahan yang ada baik dari internal Uganda maupun Republik Demokratik Kongo (RDK) sendiri dan terlebih konflik Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak dapat diselesaikan selama bantuan dari para pemberontak untuk saling membantu masih ada. Seperti yang terjadi pada tahun 1997, terjadi pemberontakan di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang mendapat bantuan negara Uganda dan Rwanda. Kemudian kedua negara ini (Uganda dan Rwanda) yang semula mendukung perjuangan Laurent Kabila berbalik menyerang Republik Demokratik Kongo (RDK) karena Republik Demokratik Kongo (RDK) yang pada saat itu dibawah kepemimpinan Laurent Kabila tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. MLC yang merupakan sebuah kelompok pemberontak lahir dari gabungan Uganda dan Rwanda (RCD) (*Rassemblement Congolais Pour la Democratie*). Uganda berusaha menyerang Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan memanfaatkan situasi yang sedang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK). Uganda melakukan tembak-menembak di Republik Demokratik Kongo (RDK), pasukan Uganda mengambil cadangan mineral dan kayu yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan.

Uganda mengambil kebijakan untuk mengirimkan pasukannya ke Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk menghentikan genosida di Republik Demokratik Kongo (RDK). Langkah Uganda tersebut sedikit berbelok, Uganda mengirimkan pasukannya tidak pada daerah perbatasan melainkan lebih dari 1000 km di sebelah barat perbatasan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk mendukung para pemberontak di Republik Demokratik Kongo

(RDK) yang tergabung dalam MLC untuk menggulingkan Laurent Kabila. Gelombang pengungsian tidak dapat dicegah selama kondisi Republik Demokratik Kongo (RDK) sendiri tidak aman bagi warga Republik Demokratik Kongo (RDK). Kondisi yang tidak aman tersebut adalah masih terjadinya beragam konflik, seperti konflik antar penguasa dengan pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK) sendiri dan konflik antar etnis. Penilaian Uganda terhadap para pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang mengancam perbatasan negara Uganda dibuktikan dengan adanya pertempuran yang terjadi di wilayah perbatasan yaitu bom yang ditembakkan pasukan Republik Demokratik Kongo (RDK) jatuh di daerah perbatasan. Kejadian tersebut menewaskan 7 orang pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) dan 4 orang warga sipil Uganda.¹⁰²

A. Peningkatan Ketegangan Antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK)

Presiden Kongo, Joseph Kabila, berhadapan dengan mantan kepala pemberontak, Jean-Pierre Bemba yang mendapat dukungan dan bantuan dari Uganda, dalam pemilihan presiden putaran kedua. Ini menjadi klimaks dari transisi demokrasi yang keras di negara yang hancur karena perang dan kediktatoran penguasa. Pada putaran kedua tersebut, Joseph Kabila yang memiliki lawan politik Jean Pierre Bemba¹⁰³ pada akhirnya menghasilkan sebuah keputusan Joseph Kabila menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) sedangkan Bemba menjadi Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK). Namun hal ini ternyata justru menghadirkan konflik bersenjata. Kediaman Wakil Presiden Republik Demokrasi Kongo Jean-Pierre Bemba di Kinshasa telah dijadikan sasaran tembak oleh sekelompok pasukan yang diduga berasal dari Joseph Kabila. Sebanyak 14 duta besar negara asing terjebak dalamnya. Lima di

¹⁰² "Bom nyasar tewaskan 7 pengungsi Kongo", Bernas Jogja 8 Desember 2006, Hal : 6.

¹⁰³ Mantan pemberontak yang pada pemilu Republik Demokratik Kongo putaran kedua menjadi lawan politik Joseph Kabila.

antaranya merupakan wakil dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis, dan Rusia.¹⁰⁴

Sumber di pasukan perdamaian PBB mengatakan "hujan mortir itu berasal dari tentara yang loyal kepada Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) Joseph Kabila".¹⁰⁵ Namun berbeda dengan yang diperkirakan oleh para pendukung Joseph Kabila, mereka justru menuding pendukung Bemba yang menyulut perang itu. Kediaman Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) itu menjadi sasaran tembak setelah terjadi kontak senjata antara pendukung Kabila dan Bemba selama sepuluh menit di sekitar rumah itu. Pertempuran juga terjadi di tempat tinggal Bemba dan markas besar partai yang mengusung Bemba.

Kubu pendukung setia Bemba diyakini menjadi pihak yang memulai baku tembak. Hal itu disebabkan pendukung setia Bemba kecewa dengan hasil sementara pemilihan umum presiden. Kedua kandidat calon presiden Kabila dan Bemba harus maju ke putaran kedua, karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapat dukungan suara lebih dari 50 persen. Kabila mendapat 44,8 persen dan Bemba yang memiliki latar belakang sebagai mantan pemimpin gerilyawan.¹⁰⁶

Kondisi ketidakpuasan yang dirasakan Bemba memunculkan tindakan anarkis yang dilakukan sekutu Bemba. Mereka melakukan terror seperti melakukan tembakan-tembakan yang terselubung. Hal ini berdampak buruk bagi masyarakat maupun kondisi Republik Demokratik Kongo (RDK) itu sendiri. Terror bersenjata dilakukan oleh pihak-pihak yang merasakan ketidakpuasan atas hasil pemilu Republik Demokratik Kongo (RDK). Tindakan yang dilahirkan dari rasa ketidakpuasan tersebut dapat dikatakan sebagai rasa yang memicu karena kepentingan kelompok maupun kepentingan nasional dari pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang pada saat itu dibawah pimpinan Joseph Kabila sebagai Presiden dan Bemba sebagai wakilnya tidak tercapai. Warga maupun masyarakat yang merasakan hal itu kemudian kembali membentuk suatu koalisi

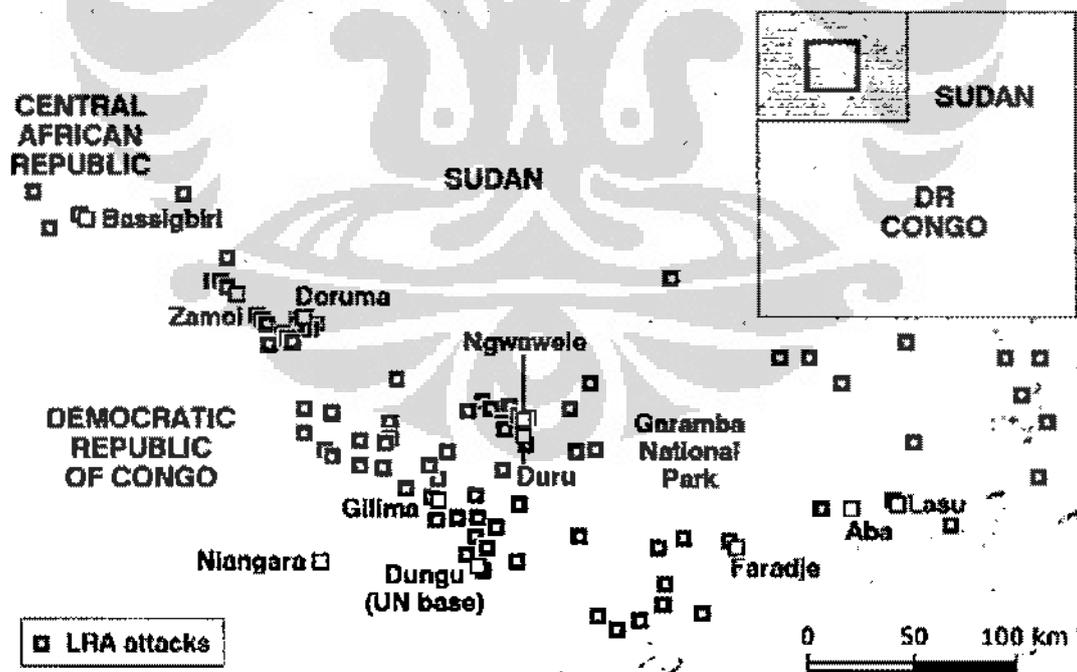
¹⁰⁴ Lihat "Kongo Membara, 14 Duta Besar Terjebak", <http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2006/08/23/brk.20060823-82394.id.html>. Tanggal akses : 14 Mei 2009.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0608/24/ln/2901599.htm> . *op.cit.*

dan kelompok pemberontak yang berusaha mengaspirasikan kekecewaan mereka atas kegagalan negara dalam menyelesaikan konflik yang telah lama ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK). Jika kita melihat lagi kebelakang, terjadinya konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) ini dipicu juga dengan keberadaan LRA (*Lord Resistance Army*) pimpinan Joseph Kony yang dalam gerakan pemberontakannya melawan Uganda didukung oleh Republik Demokratik Kongo (RDK).

LRA (*Lord Resistance Army*) terus melakukan pembunuhan, melakukan penyiksaan, memeperkosa, melakukan pembudakan terhadap anak-anak dan melarikan sejumlah besar warga sipil. Target LRA (*Lord Resistance Army*) berkembang, LRA (*Lord Resistance Army*) yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah Uganda dengan menggunakan kekerasan terhadap penduduk di utara Uganda. LRA (*Lord Resistance Army*) telah menguasai daerah di Republik Demokratik Kongo (RDK) seperti Doruma, Zamoi, Duru, Dungu yang menjadi markas *United Nation* (UN), dan lain sebagainya. Berikut adalah peta daerah yang telah dikuasai LRA (*Lord Resistance Army*):¹⁰⁷



Number of villages attacked: 74 Attacked once: 47
 Attacked twice: 9 Attacked three times: 5 Attacked eight times: 1 (Duru)

¹⁰⁷ <http://www.diaryof1.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/massacredrc.jpg>

Konflik antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan Uganda sulit diredam sehingga melibatkan juga pasukan-pasukan keamanan multinasional ke daerah konflik. Upaya meredam konflik tersebut tidak hanya dilakukan di darat, tetapi juga melalui udara. Konflik ini mengundang perhatian dunia internasional karena konflik ini sering dibanding-bandingkan dengan konflik yang terjadi antara etnis Hutu dan Tutsi yang menjadi konflik internal di Republik Demokratik Kongo (RDK) .

Di tengah situasi keamanan yang memburuk, *International Rescue Committee (IRC)* mengumumkan hasil penelitian mengejutkan. Konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) itu, menghasilkan angka kematian mencapai 3,8 juta jiwa sejak Agustus 1998 atau rata-rata 1.000 rakyat sipil tewas per hari.¹⁰⁸ Enam tahun bertikai, dunia kehilangan populasi setara jumlah penduduk Irlandia atau Los Angeles, Amerika. Kerjasama *International Rescue Committee (IRC)* dan Institut Burnet Australia itu mengklaim penelitiannya akurat. Untuk pendataan periode Januari 2003 sampai dengan April 2004, ditemukan, sebagian besar korban anak-anak balita lantaran penyakit dan kekurangan gizi akibat perang. Semua layanan kesehatan dan ekonomi habis sehingga mempercepat kematian. Perang membuat warga wilayah Timur Republik Demokratik Kongo (RDK) takut keluar rumah atau mengungsi, dan akses izin bantuan kemanusiaan terhambat. Mereka pasrah menderita berbagai penyakit dan kelaparan sebelum bantuan tiba.

PBB telah dinilai gagal menjadi penengah dalam perang di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang untuk ke-2 kalinya. Pada Februari 2000, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1291, seluruh pasukan tentara penjaga perdamaian dikirim untuk memantau proses perdamaian. Namun kegagalan pasukan perdamaian tersebut dalam mengintervensi pasukan perdamaian sepanjang perang saudara harus dibayar oleh tewasnya hampir lima juta orang.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Lihat "Perang Paling Mematikan", Duardus Karel Dewanto (*IRC, Reuters, BBC*), <http://majalah.tempointeraktif.com/id/email/2004/12/27/LN/mbm.20041227.LN95380.id.html>. Tanggal akses : 19 April 2009.

¹⁰⁹ *Ibid*.

B. Keberadaan Militer Dalam Sebuah Kebijakan Politik

Perkembangan keamanan saat ini mulai meluas namun tugas dasar militer untuk mempertahankan negara terhadap serangan militer asing. Tugas yang meliputi perlindungan wilayah negara dan kedaulatan politik suatu negara serta melindungi masyarakat umum. Sejak berakhirnya perang dingin, para pemimpin politik dan militer telah semakin menyadari bahwa kedaulatan nasional terancam tidak saja oleh pihak militer asing, tetapi juga ancaman-ancaman baru non militer seperti terorisme, perang saudara, kejahatan terorganisir, *cyber-attacks*, dan korupsi seperti yang dikatakan oleh Buzan mengenai kategori ancaman. Keberadaan pihak militer dalam sebuah kebijakan politik yang diambil sebuah negara seharusnya tidak menambah dampak yang negatif dalam sebuah konflik yang akhirnya meruncingkan konflik tersebut. Banyaknya penyimpangan tugas dan tanggung jawab para elit militer menyebabkan tindakan yang anarki dan mengesampingkan nilai moral serta norma. Jika dilihat lebih mendasar mengenai fungsi militer itu sendiri adalah :

1. sebagai kekuatan untuk menjaga kedaulatan suatu negara
2. menjaga keamanan bangsa dan negara
3. menjaga garis teritorial bangsa

Namun tidak begitu yang terjadi dengan militer Uganda di Republik Demokratik Kongo (RDK). Militer telah campur tangan dalam politik dan mengancam pemerintah. Militer Uganda telah melakukan tindak asusila terhadap rakyat sipil Republik Demokratik Kongo (RDK). Militer Uganda melakukan pelanggaran HAM yang berat di Republik Demokratik Kongo (RDK) hingga mendapat respon PBB yang keras. Hak asasi dan demokrasi terkait erat, dan keduanya penting bagi stabilitas dan keamanan jangka panjang. Fungsi sosial militer harusnya berjalan dengan baik pada kenyataannya. Fungsi sosial yang membawa militer seharusnya membantu atau mendukung administrasi sipil. Militer seharusnya dapat memberikan hal positif dalam masyarakat sipil.

Negara-negara bebas dan demokratik yang menghormati hak-hak rakyatnya membantu meletakkan landasan bagi perdamaian yang langgeng.

Sebaliknya, negara-negara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi rakyatnya sendiri kemungkinan besar menimbulkan ancaman terhadap negara tetangga dan masyarakat internasional. Birma merupakan salah satu yang memiliki kasus seperti ini. Hanya dengan kembalinya Birma ke jalur demokratik maka hak-hak dasar rakyat Birma bisa diselenggarakan. Junta militer menolak mengakui hasil pemilihan badan legislatif bersejarah pada tahun 1990 yang bebas dan jujur. Kesalahan memerintah dari rejim yang kejam dan merusak ini telah mengakibatkan penderitaan berat bagi rakyat Birma, dan menyebabkan atau memperburuk sejumlah kesulitan untuk tetangga-tetangganya, mulai dari membanjirnya pengungsi sampai ke penyebaran penyakit-penyakit menular serta perdagangan narkoba dan manusia.

Kebijakan keamanan nasional mempengaruhi hidup, nilai-nilai moral dan kesejahteraan rakyat, dan tidak bisa diserahkan pada kebijakan eksekutif atau militer sendiri.¹¹⁰ Kebijakan keamanan nasional mempunyai konsekuensi penting bagi masa depan militer dan pasukannya. Karena itulah penting untuk pemerintah menjamin langkah-langkah keamanan harus selalu konsisten dengan keberadaan HAM sendiri.

Kebijakan Uganda dengan mengirimkan pasukan militernya 1000 km dari perbatasan Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, di mana Uganda menempatkan pasukan di wilayah perbatasan Republik Demokratik Kongo (RDK). Pasukan Uganda secara ilegal menyalurkan senjata kepada kelompok bersenjata dan melakukan pelanggaran serius di bagian timur Republik Demokratik Kongo (RDK).¹¹¹ Pasukan militer Uganda melakukan penganiayaan terhadap warga sipil, pembunuhan, pemerasan dan melakukan teror di Republik Demokratik Kongo (RDK). Pasukan Uganda juga melakukan pemerkosaan terhadap wanita Republik Demokratik Kongo sehingga banyak wanita di Republik Demokratik Kongo (RDK) mengidap penyakit seperti AIDS. Penyelewengan tanggung jawab kerja seorang pasukan militer sangat terlihat di konflik Uganda dan Republik

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ "Pasukan Uganda Secara Ilegal Menyalurkan Senjata Kepada Pemberontak", http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/HR05_ham.html. Tanggal akses : 19 April 2009.

Demokratik Kongo (RDK) ini. Tugas dan tanggung jawab untuk melindungi warga sipil berbalik menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM di konflik antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo. *International Rescue Committee (IRC)* menyimpulkan korban yang meninggal akibat konflik bersenjata antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) tiap bulan adalah 77.000 orang. Diperkirakan 34% jiwa yang meninggal tiap bulannya adalah anak-anak dibawah umur 5 tahun.¹¹² Upaya meredam konflik bersenjata yang ada tidak hanya dilakukan di darat tetapi juga di udara.

C. Menjaga Kestabilan Perdamaian Bangsa dan Negara

Pentingnya pembatasan pada tindakan para aktor politik akan membawa struktur anarki yang minimal. Seperti yang dikatakan Waltz tentang pentingnya struktur anarki yang memberikan pembatasan pada tindakan para aktor politik. Kekuatan setiap negara memang tidak sama, namun besar kecilnya kekuatan negara dibedakan dari besar kecilnya kapabilitas yang dimiliki dan struktur akan dapat berubah sesuai dengan distribusi kapabilitas antar unit-sistem. Jadi jika sebuah negara memiliki kapabilitas yang besar dibanding negara lainnya maka secara langsung struktur akan berpengaruh sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki negara tersebut.

Uganda yang memiliki kapabilitas tinggi dibanding Kongo di mata negara-negara lainnya akhirnya memberi dampak pada struktur dari negara Uganda tersebut, di mana struktur negara Uganda memiliki nilai tinggi di mata negara-negara lain yang memandang Republik Demokratik Kongo (RDK) gagal dalam menyelesaikan konflik negaranya. Struktur tersebut akhirnya berkuasa penuh terhadap tindakan politik yang berkaitan langsung dengan kebijakan luar negeri Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK). Dengan keadaan yang sedemikian rupa akhirnya para elit militer melakukan peran dan tugasnya seperti tidak ada batasan. Di sini pentingnya pembatasan suatu struktur seperti yang dikemukakan oleh Waltz. Bahwa penting untuk memberikan batasan-batasan para pemimpin negara dalam menentukan arah kebijakannya. Perubahan ini merupakan bentuk pergeseran posisi kapabilitas dan kekuatan negara-negara besar yang

¹¹² *The Congo : Solving The FDLR Program Once and All*,
<http://www.Crisisgroup.org/home/index>. Tanggal akses: 2 Mei 2009.

mendominasi.

Kesadaran akan pentingnya sebuah pembatasan dalam sebuah tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam struktur sebuah negara didasarkan dari:

1. Keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan pada akhirnya diselesaikan melalui perang
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara
3. Skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik
4. Sifat alamiah suatu negara adalah anarki.

Dalam masalah yang terjadi antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK), di mana perlunya pembatasan tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam sebuah struktur negara, khususnya militer penting untuk diperhatikan implementasinya. Hal ini mengingat banyak pihak tentara militer Uganda yang melakukan pelanggaran HAM di dalam konflik Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Dalam hal kinerja tentara, komandan militer sebagai ketua ataupun pimpinan dari kaum militer harus bertanggungjawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di bawah komando dan pengawasan efektifnya, atau otoritas dan kontrol efektifnya, jika :

- (1) Komandan militer mengetahui atau menyadari keadaan-keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut
- (2) Komandan militer gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan. Demikian pula seorang atasan harus bertanggungjawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan otoritas yang dimilikinya secara efektif

sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengawasan secara tepat, di mana :

- a). Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut
- b). Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggungjawab efektif dan pengendalian atasan tersebut
- c). Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.

Dalam hubungan internasional yang didalamnya terdapat interaksi antar negara-negara didunia, dalam konflik yang terjadi antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak dapat terselesaikan meskipun dengan jalan perang. Keinginan masing-masing pihak dalam mencapai kepentingan nasionalnya tidak menghasilkan suatu titik temu meskipun telah ada perjanjian damai antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Tindakan Uganda yang anarkis memperlihatkan lepasnya Uganda dari kendali Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dunia. Pembatasan tindakan politik Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK) diperlukan agar tidak semakin menambah jumlah korban rakyat sipil sebagai korban konflik bersenjata antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK). Pentingnya menyadarkan berbagai pihak untuk tidak selalu menyelesaikan sebuah konflik dengan jalan perang juga sebagai upaya untuk membatasi tindakan politik Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK). Pentingnya selalu mengingat sebuah nilai keamanan nasional demi stabilitas keamanan internasional seharusnya dapat membatasi Uganda mengintervensi Republik Demokratik Kongo (RDK). Keamanan nasional yang stabil akan berpengaruh terhadap keamanan internasional yang akhirnya

dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar negara. Meskipun sifat dasar sebuah negara anarki tetapi perlu untuk menumbuhkan jalan lain selain perang untuk menyelesaikan sebuah konflik. Dalam hubungan internasional hal itu dapat disebut dengan *soft power* yang salah satunya adalah penyelesaian konflik secara negosiasi diplomasi.

Ketertiban nasional demi menjaga keamanan nasional suatu negara dapat dihubungkan dengan sistem internasional yang mengaturnya. Seorang pemimpin negara dapat dikritik apabila pemimpin negara tersebut melakukan kegagalan dalam menjalankan sistem internasional terutama saat gagal memelihara ketertiban internasional. Seperti layaknya Republik Demokratik Kongo (RDK) yang sejak dari masa pemerintahan Mobutu Sese Seko hingga masa pemerintahan Joseph Kabila tidak dapat menyelesaikan masalah dalam negerinya. Masalah yang pada akhirnya berdampak pada lingkup internasional. Konflik yang membawa daerah perbatasan menjadi rawan. Melihat kenyataan tersebut penting untuk menjaga sebuah sistem yang ada dalam negara. Sistem yang dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan-tindakan politik. Kesadaran akan kepentingan besar dalam sistem dan manajemen bukan saja sesuatu yang menjanjikan tetapi juga sesuatu yang bermanfaat.

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, "good governance" dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme dan lain-lain. Fenomena tersebut diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas, dimana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki

dampak yang merugikan, khususnya bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri yang baik dapat menjaga kestabilan negara menjadi lebih baik dalam segala hal. Dengan cara memelihara dan meningkatkan dukungan internasional akan membawa suatu negara pada posisi yang baik. Dari cara tersebut kemudian akan timbul suatu kepercayaan dari negara lain untuk menjalin hubungan kerjasama. Namun karena tidak tercapainya suatu stabilitas negara dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik dalam negerinya, menjadikan kondisi kehidupan sosial politik di Republik Demokratik Kongo (RDK) semakin runyam. Terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme menambah kondisi internal pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK) kearah yang tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah internal negaranya.

Upaya pemerintahan Presiden Laurent Kabila untuk menghentikan gerakan pemberontakan di kawasan timur, menghadapi jalan buntu. Kekacauan terus meluas, hal ini dilihat berdasar banyak muncul kelompok pemberontak yang berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintah karena rasa ketidakpuasan mereka terhadap hasil dari model pemerintahan yang sedang berlangsung. Tidak hanya banyak muncul gerakan kelompok pemberontak, tetapi juga perang saudara telah menjadi semakin kompleks, karena Rwanda dan Uganda membantu gerakan kaum pemberontak, yang ingin menggulingkan pemerintahan Kabila. Kehadiran pasukan Rwanda dan Uganda tentu saja menimbulkan pertanyaan. Akan tetapi penguasa Rwanda maupun Uganda beralih, keterlibatan pasukannya di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang dulu dikenal dengan nama Zaire untuk kepentingan keamanan dalam negeri. Ancaman keamanan bagi Rwanda dan Uganda dipersepsikan akan datang dari golongan Hutu asal Rwanda, yang kini membantu kaum pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK). Jika golongan Hutu di Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak dibantu, maka golongan itu akan melakukan pemberontakan di Rwanda atau mendukung gerakan pemberontakan di Uganda.

Meski telah dibantu oleh pasukan Angola, Namibia dan Zimbabwe tetap saja tidak mampu menyelesaikan pertikaian yang ada. Sebaliknya ruang gerak

kaum pemberontak terus meluas di kawasan timur, bahkan sudah meliputi setengah wilayah negeri terluas di Afrika Tengah itu. Kerawanan sosial di Republik Demokratik Kongo (RDK) telah diperparah oleh kehadiran jutaan pengungsi Hutu, yang meninggalkan Rwanda ketika pecah konflik berdarah dengan etnik Tutsi tahun 1994.

Para pengungsi umumnya mendukung gerakan kaum pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK). Sampai kini pemerintahan Kabila tetap kewalahan menghadapi tekanan kaum pemberontak. Meski pernah puluhan tahun menjadi pemimpin gerilya, Kabila menjadi tidak berdaya menghadapi aksi pemberontakan terhadap pemerintahannya. Kekuatan pasukan pemberontak cukup kuat. Sekadar contoh, setelah bertempur enam bulan, pasukan pemerintah dengan dukungan ribuan anggota pasukan bantuan asing baru dapat mengakhiri aksi pendudukan kaum pemberontak di Ikela, salah satu kota besar Republik Demokratik Kongo (RDK) di wilayah timur. Tanda-tanda meredanya kekacauan politik di Republik Demokratik Kongo (RDK) belum kelihatan. Kesepakatan gencatan senjata Juli 1999 di Zambia, yang ditandatangani Presiden Kabila bersama mitranya dari Angola, Namibia, Zimbabwe, Rwanda dan Uganda, tidak mampu menghentikan perang saudara. Sebaliknya pemberontakan yang dimulai Agustus 1998 cenderung meningkat dan meluas. Korban jiwa dan harta benda tidak sedikit. Ratusan ribu orang menjadi pengungsi, yang semakin memperlihatkan tragisnya konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK). Dampak dari gerakan pemberontakan itu bertambah runyam karena diperburuk oleh kasus pertikaian etnis.

Di tengah memanasnya aksi pemberontakan di Republik Demokratik Kongo (RDK) melawan pemerintahan Kabila, kondisi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang terus memburuk menimbulkan keprihatinan luas. Dewan Keamanan PBB yang diketuai Richard Holbrooke, Dubes AS di PBB, mengundang Presiden Kabila dan para pemimpin negara yang terlibat dalam kemelut di Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk duduk bersama mencari jalan tengah untuk solusi konflik yang telah lama berlangsung ini. Dengan situasi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang terus memburuk, Dewan Keamanan PBB menilai perlu untuk mempertimbangkan pengiriman pasukan perdamaian.

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengusulkan mengirim 500 pengamat militer, yang harus dikawal 5.000 tentara multinasional untuk menilai situasi perang.

Meskipun Dewan Keamanan PBB telah menugaskan beberapa pengamat militer untuk melihat kondisi konflik antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) namun negara Barat masih tidak merespon untuk mengirim pasukan perdamaian multinasional ke Republik Demokratik Kongo (RDK). PBB sudah mengusulkan pengiriman pasukan perdamaian ke bekas koloni Belgia itu, tetapi Amerika Serikat masih ragu, dengan alasan bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di Zambia belum dilaksanakan dengan baik. Berbeda dengan Amerika Serikat, Perancis telah mengirimkan 10.000 anggota pasukan multinasional ke Republik Demokratik Kongo (RDK). Pertemuan yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB menghasilkan sesuatu yang belum maksimal untuk menyelesaikan konflik Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK). Zimbabwe maupun pasukan Rwanda dan Uganda di Kongo justru menambah masalah semakin runyam. Munculnya kekuatan asing dalam konflik ini seharusnya akan ikut campur tangan jika sebuah bangsa atau negara gagal mengatasi persoalannya sendiri. Namun dalam kenyataannya, bangsa Republik Demokratik Kongo (RDK) yang pluralistik tidak mampu mengelola konflik vertikal maupun horizontal yang dihadapinya. Sebagai dampaknya, Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak hanya terjebak dalam perang saudara, tetapi telah mengundang campur tangan pihak asing.

D. Keberadaan Kaum Perempuan dan Penduduk Sipil

Sejak akhir perang dingin, intensitas konflik kekerasan antar negara telah jauh berkurang. Sebaliknya, konflik internal negara justru semakin meluas. Isu-isu keamanan non militer yang terkait dengan ekonomi, lingkungan dan hak asasi manusia makin menjadi sebuah komponen penting menjadi agenda keamanan. Oleh karena itu, masyarakat internasional mengakui bahwa individu setiap masyarakat dan kelompok sosial perlu mendapatkan perlindungan bukan hanya negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan akan mengusut dugaan eksploitasi seksual perempuan Republik Demokratik Kongo (RDK) oleh personel pasukan penjaga perdamaian. Badan dunia itu menerima laporan adanya lingkaran

prostitusi di luar pangkalan militer di Provinsi Kivu Selatan. Sebagian perempuan yang dieksploitasi sudah melaporkan bahwa di antara klien mereka adalah staf PBB.¹¹³

Kekerasan pada konflik bersenjata yang dilakukan oleh militer Uganda di Republik Demokratik Kongo (RDK) membawa dampak buruk pada rakyat Republik Demokratik Kongo (RDK). Banyak penduduk sipil Republik Demokratik Kongo (RDK) terutama perempuan menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan militer Uganda. Militer Uganda yang telah banyak melakukan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan di Republik Demokratik Kongo. Mereka tetap melakukan pemerkosaan dan kekerasan fisik. Hal ini memperlihatkan kegagalan pelaksanaan fungsi sesungguhnya militer. Tidak hanya itu tapi juga hal tersebut memperlihatkan bahwa pentingnya suatu pembatasan atas sikap politik di dunia militer sangat dibutuhkan, mengingat fungsi militer sesungguhnya adalah melindungi masyarakat sipil. Beberapa dari mereka (kaum perempuan) diculik dan diperkosa pada saat mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari, sedangkan yang lain diculik pada malam hari dari rumah mereka selama razia.¹¹⁴ Banyak juga dari perempuan-perempuan yang dijadikan bahan taruhan para militer Uganda. Bagi mereka yang menang taruhan, mereka dapat menikmati tubuh perempuan yang ditahan mereka sebagai media taruhan. Melihat kenyataan yang ada, negara seharusnya menjamin kapasitas hukum perempuan, untuk memberdayakan mereka.

Kaum perempuan sebaiknya diberikan akses ke layanan kesehatan seksual dan perlindungan perempuan dari perkawinan paksa dan praktek merugikan lainnya. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, bukan karena tidak ada kerangka hukum, namun karena kurangnya kemauan politik untuk menerapkan hukum. Kenyataan ini melihat terlalu banyak kasus perempuan yang disebabkan oleh tekanan atau bahkan ancaman oleh keluarga atau agen penegakan hukum, yang akhirnya menjadikan proses perlindungan terhadap diri mereka (perempuan dan rakyat sipil) menjadi terbatas.

¹¹³ "Personel PBB Diduga Eksploitasi Perempuan Kongo", http://memobisnis.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/17/trk_20060817-82130,id.html
Tanggal akses : 28 Mei 2009.

¹¹⁴ Lihat "Kekerasan terhadap perempuan di Afrika: Dari diskriminasi ke impunitas", <http://pambazuka.org/en/category/wgender/49903>. Tanggal akses : 29 Mei 2009.

Diskriminasi gender baik adalah salah satu penyebab dan faktor yang mengganggu konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan, sehingga kontribusi dari kekebalan hukum dari kasus tersebut menjadi lemah. Di tangan organisasi negara Afrika yang mengesahkan Protokol ke Afrika *Charter on Human dan Peoples' Rights*, mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, menanggulangi hal yang mendorong diskriminasi dan pelanggaran seperti yang marginalisasi kaum perempuan, terutama tentang akses mereka untuk mendapatkan keadilan. Perjanjian internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang dibentuk di PBB, menyediakan prosedur yang meski kenyataannya lebih lemah dari pada prosedur dalam Konvensi Eropa bagi perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia. Perjanjian ini menciptakan Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) untuk mengawasi kepatuhan, dalam konteks ini, tangan organisasi mengambil perhatian untuk menghadapi masalah diskriminasi, yang mengarah kepada kekerasan terhadap perempuan, seksual, tidak hanya di dalam masyarakat tapi juga di bidang swasta.

Pasukan PBB di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang beranggotakan 17 ribu personel menangani tuduhan ini dengan sangat serius dan sangat terguncang oleh kesaksian para korban aktivitas ilegal ini. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberlakukan kode etik baru setelah terungkap melalui investigasi bahwa para anggota pasukan di Republik Demokratik Kongo (RDK) melakukan seks dengan perempuan Republik Demokratik Kongo (RDK), biasanya dengan imbalan makanan atau sedikit uang. Kasus pelanggaran seksual juga dilaporkan terjadi di misi-misi penjagaan perdamaian lain PBB, seperti di Bosnia, Kosovo, Kamboja, Timor Leste dan Afrika Barat.¹¹⁵

Otoritas sipil umumnya dikelola efektif dari aparat keamanan, yang pada akhirnya terdapat beberapa kasus di mana elemen-elemen aparat keamanan bertindak secara independen dari otoritas pemerintah. Walaupun ada perbaikan di beberapa daerah, tetap masih menjadi masalah serius, seperti masih banyaknya pembunuhan oleh aparat keamanan; pasukan keamanan yang melakukan penyiksaan dan penyalahgunaan para tersangka; penangkapan yang dilakukan

¹¹⁵ Lihat : <http://memobisnis.tempointeraktif.com>, *op.cit*.

dengan sewenang-wenang; membatasi hak untuk keadilan dan kebebasan berbicara; penyalahgunaan internal terhadap para pengungsi; membatasi pihak oposisi; kekerasan dan penyimpangan; pemerintah yang korupsi; kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan; kekerasan dan penyalahgunaan anak-anak, terutama seksual; perdagangan orang, kekerasan dan diskriminasi terhadap orang cacat, kerja paksa, termasuk oleh anak-anak, dan pekerja anak.¹¹⁶ LRA (*Lord Resistance Army*) sebagian besar menjadikan anak-anak dan remaja menjadi budak, buruh, prajurit, penjaga dan budak seks.

Masyarakat Afrika menghadapi ketakutan yang sangat besar. Kelaparan, perang, pemusnahan suku yang dilakukan secara terus menerus, dan wabah AIDS¹¹⁷ ke seluruh wilayah Afrika. Konflik yang terjadi disetiap bangsa/negara di Afrika selalu menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia yang akhirnya saling berinteraksi dan menyebarkan virus HIV AIDS di wilayah Afrika. Melihat kenyataan yang terjadi, Organisasi Persatuan Afrika OAU (*Organization of African*) mengesahkan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat (*African Charter on Human and Peoples' Rights*). Piagam ini dibuat untuk dapat membantu menyelesaikan konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang telah banyak menghasilkan pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, penjualan kaum perempuan ke pemberontak, pertukaran antara kaum perempuan dengan senjata, penculikan anak-anak untuk tentara perang dan melakukan pembunuhan, pengusiran penduduk dan lain sebagainya. Kenyataannya piagam yang dibuat oleh seluruh negara-negara di Afrika ini yang memiliki tujuan untuk melindungi hak penduduk sipil ini ternyata tidak dapat mengatasi pelanggaran HAM yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) .

¹¹⁶ Lihat "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh",

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78763.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Ddat a%2Bpelanggaran%2BHAM%2BUganda%26tq%3Ddata%2Bof%2Bhuman%2Brights%2Bviolati ons%2BUganda%26sl%3Did%26t%3Den. Tanggal Akses: 15 Mei 2009.

¹¹⁷ Wabah AIDS yang akhirnya menyebar diseluruh Afrika adalah merupakan dampak dari interaksi individu yang telah terjangkit berinteraksi dengan individu lainnya yang belum terinfeksi. Hal ini terjadi disetiap bagian wilayah Afrika. Semisal : pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang telah terjangkit virus HIV AIDS berinteraksi dengan masyarakat Uganda yang belum terinfeksi, pada akhirnya virus tersebut akan menyebar dan merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Uganda.

Konflik antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan Uganda yang berawal dari kegagalan pemerintah Uganda yang dipimpin oleh Mobutu Sese Seko dalam menyelesaikan permasalahan etnis di dalam negerinya. Persengketaan tanah antara suku Hutu dan Tutsi yang kemudian direspon secara diktator oleh Mobutu menghasilkan kelompok pemberontak yang memiliki tujuan menggulingkan pemerintahannya. Konflik antara penguasa dan pemberontak ini menyebabkan rawannya keamanan masyarakat Republik Demokratik Kongo. Dampak dari hal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah banyak pengungsi yang lari ke perbatasan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Melihat hal tersebut Uganda sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) merasa perlu mengambil sikap. Hal ini menjadikan kepentingan nasional Uganda untuk masuk kedalam konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah Uganda ingin menjaga keamanan wilayahnya. Banyak hal yang masuk kedalam aspek keamanan wilayah Uganda. Salah satunya adalah Uganda tidak ingin wilayahnya menjadi tempat berkumpulnya para pengungsi yang merupakan hasil dari sebuah konflik. Hal tersebut karena akan menimbulkan kelompok pemberontak yang merupakan wujud dari ketidakpuasan masyarakat atau kelompok tersebut terhadap pemerintah.

Dengan dukungan luar negeri, Uganda untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya tersebut mendukung Laurent Kabila untuk menggulingkan Mobutu Sese Seko. Hal tersebut akan dilakukan Uganda jika Laurent Kabila dapat menjamin sebuah keamanan di wilayah perbatasan dan wilayah masing-masing. Setelah Mobutu berhasil diturunkan kepemimpinannya, Laurent Kabila menjadi Presiden dari Republik Demokratik Kongo (RDK). Namun pada kenyataannya Laurent Kabila gagal memberikan jaminan keamanan tersebut dan dia justru melakukan hal seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dari sinilah Uganda terlibat lebih jauh dalam konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK).

Konflik bersenjata yang telah mengakibatkan banyak hal seperti pelanggaran hak asasi manusia ini juga telah merugikan perekonomian Republik Demokratik Kongo (RDK). Penguasaan Uganda atas sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK) membawa masyarakat Republik Demokratik Kongo

(RDK) menjadi kehilangan sumber pencaharian dan bahan makanan untuk hidup yang pada akhirnya masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK) terjangkit busung lapar. Uganda yang juga tidak memiliki kondisi perekonomian yang bagus menjadikan upaya untuk menguasai sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK) menjadi sebuah kepentingan nasional Uganda. Pada akhirnya kepentingan nasional Uganda bukan hanya sekedar wilayah perbatasan yang aman tetapi juga ingin menguasai sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK) yang terkenal dengan kaya akan sumber mineral untuk membawa kondisi ekonomi pemerintahan Uganda menjadi selangkah lebih baik.

Menurut sumber yang didapatkan melalui lembaga penelitian tentang Afrika di Inggris,¹¹⁸ bahwa wilayah Uganda yang sebagian besar merupakan hutan terbuka dan tertutup, memiliki populasi penduduk terutama didaerah Kampala berusia antara 19-41 tahun. Sedangkan di wilayah Gulu, Atiak, Arua, Moroto dan Kaabong yang paling banyak populasi penduduknya yang berusia 0 hingga 19 tahun. Terlihat pada peta ke tiga (kiri bawah) bahwa di Uganda tingkat kemiskinan sangat tinggi sedangkan sumber daya alam yang dikelola untuk pemasukan tidak memadai.

Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) sangat beragam, seperti konflik antara penguasa dan pemberontak yang ada di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan adanya konflik antar etnis yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK). Banyak dari warga Republik Demokratik Kongo (RDK) yang menjadi korban dalam perang ini. Sejak tahun 1998, perang telah mendatangkan kesengsaraan bagi sekitar 2,5 hingga 3,5 juta manusia dan menyebabkan 2,7 juta penduduk Republik Demokratik Kongo (RDK) kehilangan tempat tinggal yang layak. Mereka kebanyakan meninggal dalam pengungsian, menjadi korban kejahatan kelompok bersenjata dan kelaparan. Hanya sekitar 35 ribu orang yang kehilangan nyawa mereka didalam berbagai pertempuran yang terjadi. Pertikaian ini sangat mempengaruhi kehidupan warga Republik Demokratik Kongo (RDK). Kondisi di Republik Demokratik Kongo (RDK) menjadi tidak aman sehingga banyak dari warga Republik Demokratik Kongo

¹¹⁸ Sumber Lihat dari peta populasi penduduk miskin dan sumber daya alam di : <http://www.fokh.org.uk/images/population.gif>. Tanggal akses : 1 Juni 2009.

(RDK) yang berusaha menghindari dari konflik demi keselamatan mereka dengan cara mengungsi ke daerah yang lebih aman.

Perang, penyakit dan kekurangan gizi telah menewaskan sekitar 5,4 juta orang di Republik Demokratik Kongo (RDK) sejak 1998, dan itu merupakan angka kematian tertinggi yang berkaitan dengan konflik sejak Perang Dunia II. Lebih dari 700.000 orang tewas akibat krisis kemanusiaan atau konflik bersenjata. Dari survey yang dilakukan oleh Agensi Statistik Pusat Ethiopia UNICEF pada tahun 2005 menunjukkan bahwa populasi penduduk Republik Demokratik Kongo (RDK) yang merupakan orang dewasa berusia 15 sampai 49 tahun adalah 1,4% dan populasi kaum perempuan adalah sebesar 1,9 % diantara populasi kaum laki-laki yang hanya sebesar 0,9%.¹¹⁹

E. Pencapaian Perdamaian Antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK)

Pada tahun 2001 pemerintah Uganda mengajukan klaim ke Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan bahwa Uganda mencuri dan menjarah sumber daya alam yang dimiliki Republik Demokratik Kongo (RDK). Uganda menegaskan bahwa apapun tindakan mereka selama konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) itu berlangsung adalah sebagai bagian dari upaya mereka (Uganda) untuk membela diri dari serbuan para pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK). Namun klaim Uganda tersebut mendapat penolakan dari tim hakim PBB karena Uganda tidak memiliki hak untuk menyerbu Republik Demokratik Kongo (RDK) dan memasuki negeri tersebut sampai ratusan kilometer, termasuk menyerbu wilayah kota dan bandara. Tidak semua klaim Uganda ditolak. Mahkamah Pidana Internasional membenarkan satu klaim Uganda bahwa Republik Demokratik Kongo (RDK) harus membayar ganti rugi karena Republik Demokratik Kongo (RDK) telah menyerbu Duta Besar Uganda pada tahun 1998. Pada saat itu banyak diplomat Uganda yang menjadi korban. Mereka dianiaya dan sebagian besar gedung kedutaan dirusak beserta isi gedung tersebut.

¹¹⁹ *HIV/AIDS Data from the 2005 Ethiopia Demographic and Health Survey. United Nations Childrens Fund (UNICEF) dikutip dari : www.unaids.org. Tanggal akses : 18 Mei 2009.*

Mahkamah Pidana Internasional menjatuhkan vonis meskipun belum memastikan besarnya angka ganti rugi yang akan dikenakan kepada kedua belah pihak (Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Uganda) namun Mahkamah Pidana Internasional memastikan bahwa Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) harus membayar ganti rugi. Meskipun demikian lembaga PBB tidak berhak untuk memaksakan pembayaran ganti rugi kepada kedua belah pihak (Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK)), karena itulah bukan suatu jaminan ganti rugi itu dapat menyelesaikan klaim yang diajukan kedua belah pihak tersebut. Namun apabila kedua negara tersebut tidak mencapai kesepakatan maka Mahkamah Pidana Internasional akan mengeluarkan vonis yang bersifat mengikat keduanya. Pada bulan Desember 2005 akhirnya Mahkamah Pidana Internasional memberikan vonisnya, bahwa Uganda dinyatakan bersalah atas penyerbuannya ke Republik Demokratik Kongo (RDK), atas pelanggaran hak-hak asasi manusia serta atas penjarahan sumber daya alam yang dimiliki oleh Republik Demokratik Kongo (RDK).

Upaya pemerintah Uganda sendiri untuk menjaga keamanan di wilayahnya yaitu dengan memperketat pengamanan di daerah perbatasan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Hal ini karena banyaknya jumlah pengungsi yang ingin memasuki wilayah perbatasan dapat menjadikan ancaman bagi Uganda. Proses perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri delapan belas tahun konflik di Uganda dalam kondisi kritis karena Uganda baik pemerintah maupun pemberontak *Lord's Resistance Army* (LRA) berkomitmen untuk merundingkan sebuah solusi. Setelah LRA mengabaikan permintaan untuk menunjukkan sikap yang baik, pemerintah memutuskan untuk tidak meneruskan perundingan tersebut secara sepihak, dan kembali fokus pada solusi militer.¹²⁰ Konflik antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) ini tidak mudah diselesaikan karena telah banyak mengikut sertakan pihak asing. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) siap untuk menindak tegas *Lord's Resistance Army* (LRA) menjamin untuk mengadili pemimpin yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan, sebuah langkah yang jika tidak ditangani

¹²⁰ "Shock Therapy for Northern Uganda's Peace Process", <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3366&l=5>. Tanggal akses : 28 Mei 2009.

dengan hati-hati dapat mendorong pemberontak lainnya menggagalkan langkah *Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)* tersebut. Para pemimpin *Lord's Resistance Army (LRA)* sendiri lari ke timur laut Republik Demokratik Kongo pada akhir 2004 setelah diusir dari pangkalan-pangkalan mereka di Sudan selatan.

Bertahannya status quo di Republik Demokratik Kongo (RDK) maupun imbatnya penyelesaian secara diplomatik mengakibatkan berlanjutnya perang dan angka kematian yang menjadi korban perang. Tindakan Uganda yang sangat merugikan Republik Demokratik Kongo (RDK) ini mendapat balasan dari Republik Demokratik Kongo (RDK), yaitu dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) menyerbu Duta besar Uganda tahun 1998. Puluhan diplomat Uganda dianiaya dan sebagian besar gedung beserta isinya dirusakkan. Permasalahan antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) ini berujung pada keputusan Mahkamah Internasional.

Pada awalnya Uganda rakyat sangat menggantungkan harapannya pada Museveni. Ia diyakini sebagai tokoh yang akan membawa Uganda memasuki dunia baru yang lebih cerah, yang jauh dari segala bentuk teror dan represi dan paksaan politik. Harapan rakyat, sebagian terpenuhi. Perekonomian negeri itu mulai bangkit. Barat percaya pada Museveni dan mengucurkan bantuan. Akan tetapi di sisi lain, Museveni dinilai terutama oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia-kurang atau malahan tidak menghormati kebebasan demokratik.

Pengalaman pahit masa lalu, di zaman Idi Amin dan Obote, membekas dalam benak Museveni. Ia berpendapat, Uganda terjat dalam konflik, kerusuhan, dan percekcoakan karena adanya begitu banyak partai politik dan persaingan suku. Karena itu, sejak berkuasa, ia mengembangkan apa yang disebut sistem "Gerakan" (Gerakan Perlawanan Nasional) yang secara teoritis beranggotakan seluruh rakyat. Berdasarkan sistem itu, partai-partai politik tetap diperbolehkan hidup tetapi tidak boleh giat berorganisasi, tidak boleh mengadakan rapat-rapat, tidak boleh kongres, tidak boleh membuka cabang, dan tidak boleh ikut pemilu.¹²¹

¹²¹ Dikutip dari *The Economist, The Washington Post, BBC*,
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/06/02/LN/mbm.20030602.LN88103.id.html>.
 Tanggal akses : 18 Mei 2009.

E.1 Perkembangan Perdamaian antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) pada Tahun 2005

Pemimpin kelompok pemberontak terbesar Uganda tidak muncul dalam upacara penandatanganan gencatan senjata yang sudah lama ditunggu, untuk mengakhiri perang selama lebih dari dua dasawarsa di bagian utara negara tersebut. Perundingan-perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik, yang telah menyebabkan hilangnya ribuan jiwa dan hampir dua juta orang lainnya terlantar. Suatu perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani Agustus pada tahun yang sama. Namun demikian, para pemberontak menandatangani bahwa mereka hanya menandatangani rancangan perjanjian perdamaian jika *Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)* mencabut perintah penahanan yang dikeluarkan pada akhir 2005 terhadap lima pemimpin pemberontak, termasuk Kony, dengan tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan memaksa anak-anak untuk berperang. Ini adalah kedua kalinya para pemberontak menolak menandatangani kesepakatan perjanjian perdamaian terakhir. Pemerintah Uganda menetapkan batas waktu terakhir bagi *Lord's Resistance Army (LRA)* untuk menandatangani gencatan senjata.

Uganda mengatakan bahwa pihaknya akan meminta *Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)* untuk memberikan perintah terhadap *Lord's Resistance Army (LRA)* agar menandatangani Keputusan Kabila untuk membolehkan tentara asing beroperasi di Republik Demokratik Kongo (RDK), hanya lima tahun setelah berakhirnya perang itu, menandai perubahan hubungannya dengan Uganda dan Rwanda. Sekitar 1.300 tentara Uganda mulai menyerang markas *Lord's Resistance Army (LRA)* di provinsi Orientale di bagian timur laut Republik Demokratik Kongo (RDK) pada 14 Desember, yang ditujukan untuk membasmi pemberontak Uganda itu setelah pemimpin mereka, Joseph Kony, kembali menolak menandatangani perjanjian damai.¹²²

Sebanyak 15 presiden Afrika dan Sekjen PBB Kofi Annan Sabtu menandatangani deklarasi bersama yang menjanjikan untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan. Deklarasi yang menyerukan perubahan wilayah itu menjadi kawasan "pembangunan dan pertumbuhan bersama, stabilitas sosial dan

¹²² Lihat "15 Presiden Afrika Janjikan Perdamaian", <http://www.gatra.com/2004-12-19/artikel.php?id=49268>. Tanggal akses : 8 Mei 2009.

politik, keamanan dan perdamaian yang berkelanjutan" itu ditandatangani pada konferensi penting di Dar Es Salaam, ibukota Tanzania.¹²³

Tentara perdamaian PBB yang mayoritas adalah Uruguay, yang ditugasi untuk menjaga perdamaian tidak mampu lagi melakukannya. Pasukan PBB itu hanya mampu melihat pembantaian di depan mata mereka. Dua tentara asal Yordania dan Malawi dibantai oleh milisi bersenjata. Tubuh mereka tidak lengkap lagi. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan sudah memohon agar Dewan Keamanan PBB dapat mengirim bantuan tentara, tapi kurang mendapat tanggapan. Amerika Serikat menolak, sedangkan Inggris menyatakan sudah telanjur bertugas di Irak.¹²⁴

Dewan Keamanan PBB mengirimkan 5.500 tentara perdamaian untuk mengawasi gencatan senjata. Pada saat yang bersamaan, Uganda dan Rwanda mulai menarik pasukan mereka dari garis utama medan pertempuran. Konflik bersenjata dengan korban jiwa kembali terjadi beberapa kali di bagian timur Republik Demokratik Kongo (RDK). Setiap konflik disusul dengan kesepakatan damai baru namun tidak akan berlangsung lama. Sampai saat ini, PBB belum dapat menyelesaikan konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK). Setiap langkah damai seperti sia-sia saja karena Uganda dan Rwanda tetap campur tangan dengan cara mendukung milisi. Meskipun dalam perjanjian yang ada tentara asing sudah harus mundur dari Republik Demokratik Kongo (RDK), kenyataannya masih ada 15 ribu-40 ribu tentara Rwanda di daerah hutan Republik Demokratik Kongo (RDK). Mereka adalah veteran Hutu yang membantai etnis Tutsi di Rwanda pada 1994.

Tentara Uganda dan Rwanda yang masih tinggal di kawasan Republik Demokratik Kongo (RDK) inilah yang terus-menerus melatih milisi. Bahkan mereka melatih anak-anak yang masih berusia 10 tahun untuk menggunakan senjata AK-47 dan menyerang orang. Presiden Joseph Kabila, anak Laurent Kabila yang menggantikan ayahnya pada Januari 2001, tak mampu melakukan langkah yang lebih baik untuk mengakhiri konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK).¹²⁵

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

PBB memberitahu kepada Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi di bagian barat negara itu. Para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran tersebut berawal dari operasi yang dijalankan oleh pemberontak di Provinsi Bas, pada bulan february dan Maret tahun ini. Para pejabat PBB mengatakan lebih dari 100 pemberontak tewas, dan 150 lainnya ditangkap. Namun mereka mengatakan beberapa pemberontak disiksa. Mereka juga mengatakan pasukan polisi menghancurkan gereja-gereja dan rumah-rumah milik penduduk.¹²⁶ Sekitar 3.000 tentara Uganda mulai ditarik dari Kongo timur laut setelah upaya ofensif selama tiga bulan terhadap LRA (*Lord Resistant Army*). Satu serangan yang dipimpin Uganda yang dimulai pertengahan Desember sejauh ini gagal menangkap pemimpin LRA (*Lord Resistant Army*) Joseph Kony atau dua deputinya, yang dicari Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) karena terlibat kejahatan perang. Pemberontak yang membunuh lebih dari 900 orang. Dua Brigade Uganda atau sekitar 3.000 tentara akan selesai ditarik seluruhnya dalam delapan hari dan pasukan Uganda tidak akan masuk ke Republik Demokratik Kongo (RDK) lagi untuk membantu tentara Kinshasa memerangi Kony.¹²⁷

Para pemberontak terkenal dengan aksi mereka memotong bibir dan anggota badan dalam perang yang menewaskan puluhan ribu orang dan menggoyahkan negara di Afrika tengah yang cukup luas itu. Kampala mengatakan, pihaknya mengirim pasukan ke Republik Demokratik Kongo (RDK) hanya setelah Kony dilaporkan menolak menandatangani satu perjanjian perdamaian yang disusun di Sudan selatan. Operasi itu cukup sensitif di Republik Demokratik Kongo (RDK) karena Uganda pernah menduduki negara itu tahun 1990-an dan dituduh mendukung pemberontak juga merampas sumber-sumber alam di sana. Namun dalam satu tanda hubungan yang membaik, Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) Joseph Kabila dan Uganda melakukan pertemuan di perbatasan untuk membicarakan tentang keamanan dan prospek minyak di Danau Albert, yang diperkirakan memiliki cadangan satu miliar barrel.¹²⁸

¹²⁶ www.kompas.com, *loc.cit*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Mahkamah Internasional PBB tetap memutuskan bahwa Uganda melanggar kedaulatan tetangganya, Republik Demokratik Kongo (RDK). Mahkamah itu juga menyatakan Uganda bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kongo selama perang 1998-2003. Pengadilan PBB itu menambahkan bahwa Uganda bertanggung jawab atas aksi-aksi penjarahan di Republik Demokratik Kongo (RDK). Sebab, militer Uganda tidak menghormati sumber daya alam milik Republik Demokratik Kongo (RDK). Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan negara kaya emas, berlian, dan kayu hutan. Negeri itu dilanda berbagai konflik. Mulai dari aksi pemberontakan, peperangan antar daerah, konflik etnis, sampai intervensi negara-negara tetangga, seperti Uganda dalam perang 1998-2003. Selama periode perang itu, empat juta orang tewas, terutama karena kelaparan dan wabah penyakit. Republik Demokratik Kongo (RDK) menggugat Uganda ke Mahkamah Internasional pada 1999. Republik Demokratik Kongo (RDK) menuduh Uganda bersalah atas pelanggaran HAM dan agresi militer. Kongo menuntut kompensasi atas aksi-aksi penjarahan, perusakan, dan perampasan harta benda.¹²⁹ Berdasarkan peraturan Mahkamah Internasional, negara-negara yang bersengketa dapat merundingkan kompensasi di antara mereka sendiri. Namun hakim menegaskan bahwa jumlah kompensasi yang dituntut Republik Demokratik Kongo (RDK) sudah layak. Keputusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.¹³⁰ Mahkamah Internasional diresmikan pada 1946 untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara anggota. Rwanda dan Uganda menginvasi Kongo setelah beberapa kelompok pemberontak melakukan pemberontakan untuk menggulingkan Presiden Laurent Kabila pada 1998. Kelompok pemberontak itu didukung oleh Rwanda dan Uganda, sedangkan Kabila mendapat dukungan dari Namibia, Angola, dan Zimbabwe.¹³¹

Pasukan pemerintah memerangi pemberontak Tutsi dalam bentrokan tersengit selama beberapa bulan di Republik Demokratik Kongo (RDK) timur, yang mengancam proses perjanjian yang sedang diperjuangkan. Tembakan

¹²⁹ "Mahkamah PBB: Uganda Langgar Kedaulatan Kongo", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/20/int3.htm>. Tanggal akses : 8 Mei 2009.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

mortir antara pemberontak yang setia pada Jenderal Tutsi Laurent Nkunda dan tentara pemerintah di provinsi Kivu itu terjadi di antara pecahnya pertempuran langsung.¹³² Bentrokan yang terburuk antara pemberontak dan militer sejak Republik Demokratik Kongo (RDK) menandatangani perjanjian damai dengan lebih dari 12 kelompok bersenjata di provinsi Kivu Utara dan Selatan.¹³³ Perjanjian damai antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) sebagai upaya yang didukung Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk membatasi konflik yang berlanjut meskipun telah berakhir perang 1998-2003 meluas di Kongo.

Konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Uganda mengakibatkan banyak kerugian bagi Republik Demokratik Kongo (RDK), salah satunya adalah kemiskinan, busung lapar dan lain sebagainya. Konflik ini tidak kunjung terselesaikan hingga pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Republik Demokratik Kongo (RDK) meningkat.

Berdasar dari informasi yang diolah oleh UNDP¹³⁴, Republik Demokratik Kongo (RDK) berada pada posisi tengah dibandingkan dengan negara lainnya. Indeks pembangunan masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak terlalu buruk pada tahun 2006. Republik Demokratik Kongo (RDK) berada pada posisi tengah jika dibandingkan negara lainnya. Hal ini berarti masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak terlalu tertinggal untuk memajukan sumber daya manusia masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK). Karena konflik bersenjata antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan Uganda yang tidak kunjung selesai dan diarahnya sumber daya alam yang dimiliki Republik Demokratik Kongo (RDK) maka kemiskinan dan kelaparan dirasakan oleh penduduk Republik Demokratik Kongo (RDK). Para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya menjadi sulit untuk menjalani kehidupan dan interaksi sosial sehari-hari.

¹³² "Perjanjian Damai Kongo Terancam Gagal", <http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/11/14/Internasional/krn.20081114.147984.id.html>. Tanggal akses : 18 Mei 2009.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Lihat : "Data Penduduk miskin Republik Demokratik Kongo tahun 2006", http://www.undp.org/es/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_COD.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Dtabel%2Bkemiskinan%2Bdi%2BKongo%26tq%3Dthe%2Btable%2Bof%2Bpoverty%2Bin%2BCongo%26sl%3Did%26tl%3Den. Tanggal Akses : 8 Mei 2009.

Demi menyelesaikan konflik yang berlangsung sudah cukup lama dan telah member dampak yang luas diantara negara-negara tetangganya, PBB khususnya Dewan Keamanan PBB membuat satu solusi diplomasi. PBB mengadakan pertemuan antara pihak Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan Rwandayang dalam invasinya membantu Uganda menyerang Republik Demokratik Kongo (RDK). Pertemuan Sekjen PBB Ban Ki Moon berakhir tanpa solusi dari Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) Joseph Kabila dan Presiden Rwanda Paul Kagame yang bersitegang dalam perang. Tanpa kesepakatan untuk mencari jalan damai guna menyelesaikan konflik bersenjata di kawasan timur Republik Demokratik Kongo (RDK). Ada tiga butir terpenting KTT yang dihadiri 7 pemimpin Afrika dan PBB. Pertama, menyerukan diperluasnya mandat pasukan penjaga keamanan PBB, agar memiliki kemampuan mengambil tindakan untuk menjamin terciptanya perdamaian, jika ada ketentuan perlucutan senjata.¹³⁵

KTT darurat itu digelar di Nairobi, Kenya, setelah munculnya bentrokan antara pasukan pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK) pimpinan Jenderal Laurent Nkunda dan pasukan pemerintah serta milisi Mai-Mai pro pemerintah. Namun bentrokan terjadi lagi, mengakibatkan ratusan ribu warga sipil kembali lari menyelamatkan diri. Namun tujuan utama pertemuan itu lebih pada upaya mempertemukan Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) Joseph Kabila dan Presiden Rwanda Paul Kagame. Sementara Laurent Nkunda, pemimpin pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK), tidak diundang dalam pertemuan itu. Menteri Luar Negeri Kenya, Moses Wetangula, sebagai tuan rumah KTT menjelaskan, pembicaraan dengan Laurent Nkunda akan dilakukan dalam upaya terpisah oleh utusan khusus PBB untuk konflik Republik Demokratik Kongo (RDK), Olesogun Obasanjo.

Keruntuhan sistem bipolar telah mendorong pecahnya berbagai konflik internal yang sangat brutal, khususnya terhadap penduduk sipil, umumnya yang didukung negara Barat serta beberapa negara Afrika dan Amerika Latin mengambil sikap, sarana utama PBB untuk membantu penyelesaian konflik, yakni

¹³⁵ "KTT Krisis Kongo Berakhir Tanpa Solusi Berarti", <http://www.dwworld.de/dw/article/0,,3773308,00.html>.
Tanggal akses : 30 Mei 2009.

operasi pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping operations*), sudah tidak lagi memadai.¹³⁶ Peran PBB harus lebih proaktif dari pada sekadar memelihara perdamaian, sekaligus menegakkan nilai-nilai "universal" seperti hak asasi manusia (HAM), hukum kemanusiaan internasional (HKI), sistem hukum (*rule of law*) dan penyelenggaraan negara (*good governance*).¹³⁷ PBB perlu membantu menciptakan dan menguatkan lembaga-lembaga politik serta meluaskan basisnya. Intervensi bersenjata harus merupakan opsi yang dipertimbangkan jika konflik yang terjadi ditandai oleh pelanggaran besar-besaran HAM dan HKI. Dilema masyarakat internasional saat ini adalah di satu pihak penghormatan atas kedaulatan suatu negara, di pihak lain moralitas internasional menghendaki PBB melakukan intervensi atas pelanggaran HKI dan HAM besar-besaran dalam konflik suatu negara. Upaya reformasi dan perluasan keanggotaan DK PBB telah berjalan sejak Januari 1994, namun sampai sekarang belum mendapatkan titik temu. Selain itu, perubahan komposisi itu harus dilakukan melalui perubahan Piagam PBB, yang harus disetujui dan diratifikasi kelima anggota tetap Dewan PBB.

E.2 Perkembangan Perdamaian Konflik Uganda dengan Republik Demokratik Kongo 2008-2009

Pertempuran antara tentara Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) dan kelompok pemberontak suku Tutsi telah menyebabkan bencana kemanusiaan. Warga kota Goma, ibu kota Provinsi Kivu Utara, menjadi sasaran pembunuhan, penjarahan, dan perkosaan oleh tentara. Bantuan kemanusiaan juga belum bisa mencapai pengungsi yang terpaksa meninggalkan kamp pengungsian. Lembaga bantuan kemanusiaan menggambarkan situasi di kota Goma sangat mengerikan. Kelompok pemberontak pimpinan Jenderal Laurent Nkunda juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti menembak membabi buta atas sebuah klinik yang sebelumnya dikuasai tentara Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK). Sedikitnya 30.000 pengungsi terjebak di antara kelompok pemberontak dan pasukan PBB yang mencoba menutup akses pemberontak ke Goma. Sekitar 8.000 pengungsi telah menyeberang ke Uganda

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ *Ibid*

dan 1.200 pengungsi masuk ke Rwanda. Pasukan pemberontak juga telah merebut beberapa kota di timur Republik Demokratik Kongo (RDK).¹³⁸

Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Rwanda memperbaharui kerjasama dalam bidang militer dan politik tetapi tidak cukup untuk membawa perdamaian. Lima hari mereka bersama mengadakan operasi militer namun tidak menghasilkan hasil yang signifikan terhadap pemberontak Rwandan Hutu. Walaupun pada 23 Maret 2009 telah ditandatangani perjanjian dengan Kinshasa. Internasional pemantauan grup yang dipimpin oleh utusan khusus PBB Olusegun Obasanjo bekerjasama dengan pemerintah Congolese dan Rwandan untuk mendukung dan menerapkan strategi perdamaian.¹³⁹ Sebuah strategi untuk perdamaian Kongo harus memiliki lima prioritas:¹⁴⁰

- 1) Strategi yang baik untuk menangani pemberontak
- 2) Melanjutkan reformasi sistem keamanan yang baru dengan fokus pada pembangunan kapasitas dan akuntabilitas
- 3) Mendorong rencana rekonsiliasi dan keamanan manusia yang berkonsentrasi pada yudisial akuntabilitas dan persyaratan pengungsi
- 4) Keterlibatan politik untuk meningkatkan ekonomi pemerintahan melalui peningkatan transparansi, adil perpajakan, desentralisasi dan Pilkada
- 5) Upaya untuk terus mempertahankan hubungan dengan stabil.

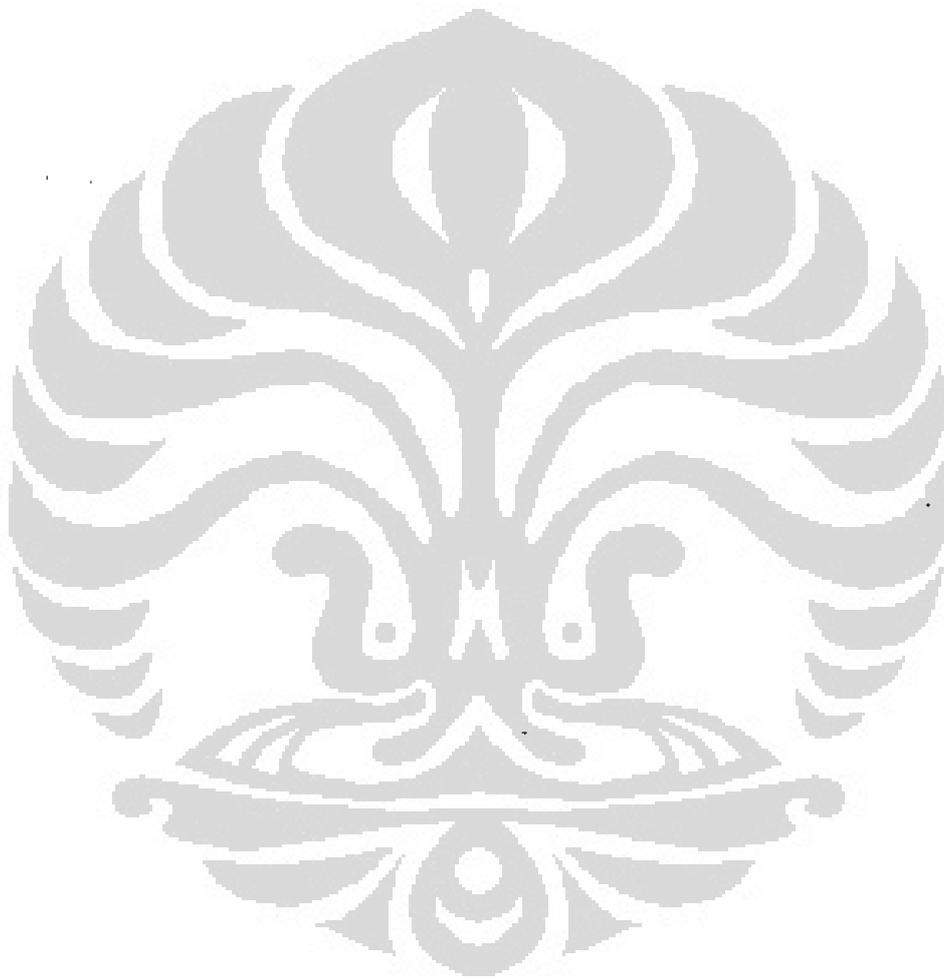
Lebih dari 200.000 orang terusir dari tempat tinggal mereka akibat konflik di sepanjang wilayah timur Republik Demokratik Kongo (RDK). Ribuan orang mengungsi di Goma, sementara ribuan lainnya melarikan diri ke hutan-hutan di

¹³⁸ *Mahkamah PBB: Uganda Langgar Kedaulatan Kongo*,
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/20/int3.htm>. Tanggal akses : 12 Mei 2009.

¹³⁹ Lihat "*Congo: Five Priorities for a Peacebuilding Strategy*",
<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6095&l=5>. Tanggal akses : 28 Mei 2009.

¹⁴⁰ *Ibid.*

mana pemberontak tidak bisa menemukan mereka dan lembaga kemanusiaan tidak bisa membantu mereka.¹⁴¹



¹⁴¹ *"Bencana Kemanusiaan Membayangi Rakyat"*,
<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/01/00432620/bencana.kemanusiaan.membayangi.rakya>
t. Tanggal akses : 28 Mei 2009.

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil analisa permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa konflik bersenjata antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah bersumber dari :

1. **Konflik Etnis** : Konflik etnis yang terjadi antara Uganda dan Kongo membuahakan kelompok pemberontakan yang memberi dampak langsung pada hubungan Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) sebagai negara yang berbatasan langsung. Bergabungnya etnis Hutu di Republik Demokratik Kongo (RDK) bergabung dengan etnis Hutu di Rwanda mengakibatkan terjadinya pembantaian ribuan orang etnis Tutsi. Hal ini disebabkan karena etnis Hutu ingin membentuk suatu negara etnis di Kongo. Persengketaan tanah di Republik Demokratik Kongo (RDK) antara etnis suku Hutu dan Tutsi tersebut membawa dampak buruk bagi negara yang berbatasan langsung, yaitu Uganda. Ketidakjelasan dalam perbatasan di negara Burundi, Rwanda, dan Republik Demokratik Kongo (RDK) mengakibatkan banyak ditemukan suku Hutu dan Tutsi di masing-masing negara tersebut. Terjadinya etnopolitik yang memberi dampak langsung bagi keutuhan nasionalis bangsa/negara merupakan suatu ancaman yang dapat menggoyahkan politik pemerintahan Uganda dan Kongo. Konflik yang menghilangkan identitas bangsa/negara dengan adanya gelombang pengungsian membuat Uganda merespon keras dengan melancarkan gencatan bersenjata. Hal ini juga mengancam kondisi sosial dan politik.
2. **Sumber Daya Alam** : Sumber daya alam yang dimiliki Kongo mencuri perhatian Uganda untuk mencapai *national interest*-nya. Perluasan wilayah dengan menguasai sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK) dilakukan Uganda dengan tindakan yang keras. Warga sipil Republik Demokratik Kongo (RDK) menderita kelaparan,

kekurangan gizi, dan tindak asusila akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh militer Uganda. Eksploitasi ilegal yang dilakukan Uganda dibawah pasukan Bemba dilakukan dengan cara Uganda mengontrol area di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan memonopoli wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, melakukan perdagangan sebagai tujuan untuk memperkaya jaringan Uganda juga memperluas wilayah kekuasaan Uganda.

3. ***Kekecewaan Museveni terhadap Laurent kabila*** : Kekecewaan yang dirasakan Uganda atas kegagalan Laurent Kabila menyelesaikan konflik negara Republik Demokratik Kongo (RDK) membuat Uganda harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan gelombang pengungsian ke perbatasan Uganda sebagai dampak dari konflik etnis yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK). Museveni melihat politik pemerintahan Laurent Kabila hanya menambah parah kondisi Republik Demokratik Kongo (RDK). Kegagalan Laurent Kabila memberikan jaminan atas keamanan wilayah perbatasan semakin membuat Uganda khawatir atas kedaulatan negaranya dan keutuhan wilayahnya. Hal itu tidak lepas dari kepentingan Uganda untuk menjaga identitas bangsa/negara-nya.
4. ***Keberadaan Jean Pierre Bemba*** : Keberadaan Bemba dalam membantu Uganda merespon kekecewaan politik dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) didasari pula oleh kekecewaan Bemba dalam persaingan dengan Laurent Kabila yang pada saat itu terpilih menjadi Presiden Kongo. Bemba mengalami kekalahan dan menimbulkan respon politik terhadap lawan politiknya.

Dari pihak Republik Demokratik Kongo (RDK), konflik internal yang memecahkan hubungan antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang berakar dari tindak diskriminasi di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada salah satu etnis yang ada. Hal ini sesuai dengan Barry Possen yang

memberikan penjelasan tentang konflik etnis. Ia mencatat bahwa pecahnya negara-negara multietnis menempatkan kelompok etnis lawan dalam situasi yang anarkis. Sehingga memicu intensitas ketakutan dan menggoda masing-masing kelompok menggunakan kekuatan untuk meningkatkan posisi relatif mereka. Permasalahan ini akan semakin parah ketika di dalam wilayah masing-masing kelompok terdapat wilayah yang didiami oleh etnis lawan, hal ini dikarenakan masing-masing pihak akan tergoda melakukan tindakan keras terhadap kelompok minoritas dan melakukan ekspansi untuk memasukan anggota kelompok mereka yang berada di luar batas wilayah. Inilah yang telah terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK), pemerintahan Mobutu yang telah mendiskriminasi salah satu etnis telah melahirkan kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang buruk juga menambah konflik yang ada menjadi semakin tidak terkontrol. Banyak tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditemukan di dalam pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK). Pergantian presiden tidak membawa kondisi Republik Demokratik Kongo menjadi lebih baik.

Di pihak Uganda, permasalahan yang menjadi dasar intervensi Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah rawannya kondisi perbatasan wilayah Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Uganda melihat banyaknya pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang lari ke perbatasan dan wilayah Uganda akan menjadikan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Uganda. Karena itulah Uganda membuat suatu kebijakan luar negeri dengan memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah di negara tetangganya yaitu Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan membuat suatu kebijakan politik untuk membantu Republik Demokratik Kongo (RDK) melalui Laurent Kabila. Uganda mengirimkan pasukannya membantu Laurent Kabila dalam menumbangkan Mobutu yang dinilai sebagai tindakan diktator Mobutu sebagai penyebab banyaknya pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) yang lari ke perbatasan Uganda dan Republik Demokratik Kongo (RDK).

Uganda melihat semua yang telah terjadi di Kongo tidak dapat dibiarkan terlalu lama. Dengan memberikan dukungan kepada Bemba, Museveni

mengambil kebijakan untuk menyelesaikan hubungan kerjasama dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang telah tercipta sejak saat menjatuhkan kekuasaan Mobutu. Jatuhnya pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK) juga dirasakan sejak pemerintahan diktator Mobutu yang menghasilkan perang saudara. Mobutu terkenal dengan tindakan yang diktator dan represif dalam mempertahankan kekuasaannya. Kelompok-kelompok pemberontak MLC (*Mouvement Pour la Liberation du Kongo*) yang dipimpin oleh Bemba, mantan pemimpin kelompok pemberontak Republik Demokratik Kongo (RDK) dan RCD (*Rassemblement Congolais Pour la Democratie*) beserta elit-elit politik militer Uganda melakukan berbagai pelanggaran HAM di Republik Demokratik Kongo (RDK) seperti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan; kekerasan dan penyalahgunaan anak-anak, terutama seksual; perdagangan orang, kekerasan dan diskriminasi terhadap orang cacat, kerja paksa, termasuk oleh anak-anak, dan pekerja anak.

Dalam sebuah konflik etnis yang merupakan sejarah panjang antara Uganda, Rwanda dan Republik Demokratik Kongo (RDK),

Jadi intisari dari *keterlibatan Uganda dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo dilihat dari faktor internal Uganda* adalah :

- Dari segi faktor internal Uganda : Kepentingan nasional Uganda untuk selalu menjaga stabilitas keamanan wilayah dan negara dari berbagai macam jenis ancaman.
- Kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Uganda terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK) :
 - ✓ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Uganda memiliki kepentingan nasional yaitu ingin menjaga stabilitas keamanan wilayahnya dan Uganda ingin membawa negaranya menjadi lebih kondusif dari berbagai sektor, sehingga Uganda dapat memberikan jaminan kepada negara lain maupun tetangga yang ingin berinvestasi maupun melakukan kerjasama dengan Uganda.
 - ✓ Sedangkan kebijakan luar negerinya adalah, Dalam suatu usaha pencapaian kepentingan nasional dan merupakan cita-cita bangsa

dan negara tentu akan berpengaruh dan tertuang dalam sebuah rumusan politik yang disebut politik luar negeri dan di implementasikan kedalam sebuah kebijakan luar negeri.

Sesuai dengan asumsi neo realis bahwa dalam mewujudkan kepentingan nasional Uganda yaitu untuk menciptakan keamanan nasional, Uganda dalam membuat politik dan kebijakan luar negerinya memperhatikan beberapa hal :

1. Kedaulatan negara : Uganda merespon konflik internal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) melihat dari kondisi Uganda yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) yang membuat para pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) di Uganda menjadi sebuah ancaman sosial dan politik, khususnya bagi kedaulatan Uganda. Dimana antara para pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan penduduk Uganda melakukan berbagai interaksi sosial seperti menikah dan membuat kelompok pemberontakan. Uganda ingin tetap menjaga stabilitas keamanan negaranya demi kedaulatan negaranya. Menjaga nasionalitas Uganda adalah merupakan salah satu kepentingan nasional Uganda untuk masuk kedalam konflik internal di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan membantu Laurent Kabila menumbangkan Mobutu yang telah gagal menyelesaikan konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK).
2. Kepentingan nasional Uganda : kepentingan nasional Uganda bila dilihat dari hasil analisa diatas tidak hanya dalam lingkup menjaga keamanan nasional Uganda tetapi juga Uganda memiliki tujuan lain yang merupakan "*hidden agenda* Uganda" yang mencoba mengambil sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk membantu perekonomian Uganda menjadi semakin lebih baik. Keterkaitan antara kepentingan nasional dengan Politik luar negeri, K.J Holsti menilainya sebagai tindakan tertentu yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara terhadap satu atau lebih negara lainnya dalam menghadapi keadaan domestik serta situasi luar negerinya. Dalam konflik bersenjata antara

Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK), Uganda melihat pengungsi dari Republik Demokratik Kongo yang telah berdatangan di daerah perbatasan antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) secara perlahan akan menjadi ancaman bagi Uganda sendiri. Merespon dampak dari konflik internal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) karena pemerintahan diktator Mobutu Sese Seko, Uganda mengambil kebijakan untuk membantu Laurent Kabila untuk menjatuhkan pemerintahan Mobutu Sese Seko dengan jaminan Laurent Kabila mampu menyelesaikan konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) dan memberikan kondisi aman di daerah perbatasan tersebut. Namun hal tersebut ternyata gagal diwujudkan. Laurent Kabila yang pada akhirnya menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) gagal memberikan kondisi yang aman di daerah perbatasan dan konflik internal Republik Demokratik Kongo (RDK) juga tidak terselesaikan. Uganda akhirnya kembali merespon dan apa yang menjadi kebijakan Uganda untuk kepentingan nasional Uganda yang ingin menjaga kedaulatan negaranya, kondisi politik pemerintahan Uganda yang stabil dan kondisi yang aman bagi perbatasan antara Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK) ternyata tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Uganda untuk mencapai kepentingannya tersebut ternyata melakukan berbagai pelanggaran HAM seperti menculik anak-anak dibawah umur yang dijadikan tentara perang, memperkosa perempuan-perempuan dewasa dan dibawah umur, dan lain sebagainya. Kepentingan nasional Uganda ternyata tidak hanya itu saja. Sumber daya alam yang dimiliki Republik Demokratik Kongo (RDK) menarik perhatian Uganda, yang ternyata menjadi *hidden agenda* dari kepentingan nasional Uganda. Uganda tidak hanya melakukan pelanggaran HAM tetapi untuk mencapai *hidden agenda* yang dimiliki, Uganda menjarah sumber daya alam yang dimiliki Republik Demokratik Kongo (RDK).

Ada beberapa poin penting yang dapat ditarik dari analisa keterlibatan Uganda dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah :

1. Posisi geografis yang saling berbatasan menjadikan pentingnya sebuah batas negara yang jelas dalam setiap negara agar tidak terjadi persengketaan yang mengakibatkan konflik internal di negara tersebut. Dalam hal ini khususnya Republik Demokratik Kongo (RDK). Jika ada batas wilayah yang jelas maka konflik internal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) dapat dihindarkan.
2. Kondisi pemerintahan yang demokratis, bersih dan berjalan baik dapat membantu memperbaiki kondisi internal negara. Hal ini akan memberi kemudahan bagi sebuah negara dalam menyelesaikan konflik internal yang terjadi. Pada kasus keterlibatan Uganda dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo (RDK), jika pemerintahan Republik Demokratik Kongo (RDK) berjalan dengan baik, tidak adanya tindakan korupsi, kolusi juga nepotisme yang dilakukan pemerintah maka tidak akan menghasilkan kekecewaan masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK) terhadap pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK). Tentu saja hal ini akan menghasilkan situasi negara yang lebih baik dengan tidak adanya kelompok pemberontak yang melawan pemerintah.
3. Pentingnya menjaga stabilitas keamanan nasional dan kawasan. Terjaganya stabilitas keamanan nasional dan kawasan membawa kondisi suatu negara khususnya dalam masalah ini adalah Republik Demokratik Kongo (RDK) akan menghasilkan kerjasama yang baik antar Uganda dan Republik Demokratik Kongo juga dengan negara-negara lainnya. Dengan kondisi keamanan yang baik maka dapat menghasilkan kerjasama dengan negara lain disegala bidang untuk saling memperbaiki kondisi negara disegala sektor baik ekonomi, sosial, politik dan budaya.
4. Dalam suatu komunitas pasti ada yang kelompok minoritas dan mayoritas. Perilaku dan pembentukan struktur institusi dapat memberikan pengaruh dalam sebuah identitas etnis yang dominan tersebut. Kesenjangan antar

etnis dan antar kawasan adalah salah satu penyebab dan sumber permasalahan yang dapat menjelaskan berbagai pergolakan yang menuju pada disintegrasi bangsa. Suku yang termasuk kaum minoritas tersebut akhirnya mengalami diskriminasi politik, dimana diskriminasi politik disini adalah pembatasan secara sistematis dalam hak politik maupun akses untuk sebuah posisi politik yang dimana didalamnya akan membandingkan antara satu dengan lainnya.

Salah satu isu hasil yang ingin dicapai dalam KTT Uni Afrika sendiri adalah menemukan solusi tetap bagi konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (RDK). Pertemuan secara bilateral antara Presiden RD Kongo Joseph Kabila dan Presiden Rwanda Paul Kagame untuk mendorong keduanya menemukan solusi damai. Selama empat tahun terakhir, sudah banyak gencatan senjata dan kesepakatan perlucutan milisi bersenjata, tetapi tidak ada hasilnya.

Demikianlah kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pendidikan khususnya dalam ilmu hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azzelini, Dario, Boris Kanzleiter., *Tentara Sewaan Perusahaan: Kepentingan Ekonomi dan Perdagangan Militer di Kongo, La Empresa Guerra: Bisnis Perang dan Kapitalisme Global*, Insist Press, Yogyakarta, 2005.
- Buzan, Barry., *People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post Cold War Area*, New York: Harvester Wheatsheaff, 1991.
- Brown, Chris & Kirsten Ainley., *Understanding International Relations*, 3rd edition London: Palgrave MacMillan, 2005.
- Fisher, Markus., *Machiavelli's Theory of Foreign Politics*, di dalam Benjamin Frankle (ed.), *Roots of Realism*, London & Portland: Frank Cass Co. Ltd, 1996.
- Holsti, K.J., *Pengantar Politik Internasional; kerangka untuk analisis*, terjemahan M. Thahir Azhary, SH, Erlangga, Jakarta, 1998.
- Holsti, K.J., *International Politics: A Framework for Analysis*, 7th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, 1995.
- J, Robert dan George S., *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Papp, Daniel S., *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, 5th Edition (Boston: Allyn & Bacon, 1997),
- Robert, Ted Gurr, *Minorities at Risk; A Global View of Ethnopolitical Conflict*, United States Institute of Peace Press, Washington, D.C, 1993
- Synder, Richard C., "The Decision Making Approach to The Study of International Politics", dalam James N Rosenau, *International Politics and Foreign Policy, A Reader in Research and Theory*, The Free Press, New York, 1962
- Smith, Steve., 'New Approaches to International Theory' di dalam John Baylis & Steve Smith (ed.), *The Globalization of World Politics: Introduction*

to International Relations, New York: Oxford University Press, 1997.

Tirtosudarmo Riwanto., Demografi-politik pasca-Soeharto : *Etnopolitik-Pemekaran Wilayah*, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Wibisono, Makarim., Tantangan Diplomasi Multilateral, dalam *Selamat Datang Dewan Keamanan Hak Asasi Manusia PBB*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Walt, Stephen M., "International Relations: One World, Many Theories" *Foreign Policy*, No. 110, Spring 1998.

MAKALAH

Anggoro, Kusnanto., *KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM*, Centre for Strategic and International studies, Jakarta. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003.

Elvan Swasono. Dionnisius., *Kebijakan luar negeri Israel mengenai penyelesaian konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahan Yitzhak Rabin (1992-1995)*, Jakarta 2005.

DOKUMEN / JURNAL

David Carment, "The Ethnic Dimension In World Politics", *Thirth World Quarterly*, Journal of Emerging Areas Volume 15 Number 4, Carfax Publishing Company, UK, 1994.

Dickens, Elijah Mushemeza, "Issues of Violence in the Democratisation Process in Uganda" dalam jurnal online, http://www.codesria.org/Links/Publications/ad_articles/mushemaza.pdf

Kristin, Leefers., "The Course of Political Development in Uganda and its Effect on Economic Development", <http://lilt.ilstu.edu/critique/spring2004docs/leefers.pdf>

Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), *Inter Parliamentary Union (IPU), Pengawasan Parlemen dalam Sektor*

Keamanan "Asas, Mekanisme dan pelaksanaan", Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Inter Parliamentary Union (IPU), Jakarta 2005.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakkar., *Laporan Tahunan 1996-1997*.

Departemen Luar Negeri Direktorat Afrika, *"Demokrasi Kongo"*, Jakarta, Desember 2004

----- *"Country Profile Uganda"*, Departemen Luar Negeri Afrika, 2003.

KORAN

"Bom nyasar tewaskan 7 pengungsi Kongo", Bernas Jogja 8 Desember 2006.

WEBSITE

Duardus, Karel Dewanto (*IRC, Reuters, BBC,*), *"Perang Paling Mematikan"*, dalam <http://majalah.tempointeraktif.com/id/email/2004/12/27/LN/mbm20041227.LN95380.id.html>.

"Afrika Akan Lebih Menderita Akibat Pemanasan Global", dalam <http://www.geografiana.com/dunia/ekonomi/afrika-akan-lebih-menderita-akibat-pemanasan-global>.

"Africa-Uganda, General Information, Uganda Conflict", dalam <http://www.pcr.uu.se/database/conflictsummary.php>

"Bencana Kemanusiaan Membayangi Rakyat", dalam <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/01/00432620/bencana.kemanusiaan.membayangi.rakyat>

"Congo: Five Priorities for a Peacebuilding Strategy", dalam <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6095&i=5>,

"Data Penduduk miskin Republik Demokratik Kongo tahun 2006", dalam http://www.undp.org/es/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_COD.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Dtabel%2Bkemiskinan%2Bdi%2BKongo%26tq%3Dthe%2Btable%2Bof%2Bpoverty%2Bin%2BCongo%26sl%3Did%26tl%3Den

"Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh", dalam

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78763.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Ddata%2Bpelanggaran%2BHAM%2BUganda%26tq%3Ddata%2Bof%2Bhuman%2Brights%2Bviolations%2BUganda%26sl%3Did%26tl%3Den

"Diskriminasi ke impunitas", dalam

<http://pambazuka.org/en/category/wgender/49903>.

"HIV/AIDS Sama Menakutkannya dengan Terorisme", dalam

<http://pusdiknakes.or.id/pdpersi/?show=detailnews&kode=933&tbl=artikel>.

"HIV/AIDS Data from the 2005 Ethiopia Demographic and Health Survey.

United Nations Childrens Fund (UNICEF)", dalam www.unaids.org.

"Indikator Kemiskinan Kongo tahun 2006",

dalam http://www.undp.org/es/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_COD.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Dtabel%2Bkemiskinan%2Bdi%2BKongo%26tq%3Dthe%2Btable%2Bof%2Bpoverty%2Bin%2BCongo%26sl%3Did%26tl%3Den

"Kerawanan Konflik di Afrika",

dalam <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/09/02/0029.html>.

"Kabinet Baru Kabila Terbentuk", dalam

<http://www2.kompas.com/kompascetak/0104/16/LN/kabi03.htm>.

"Kekuasaan Idi Amin", dalam <http://www.country-data.com>.

"Kabila Tewas, Anaknya Menggantikan", dalam

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2001/01/22/LN/mbm.20010122.LN77092.id.html>.

"Kongo Membara, 14 Duta Besar Terjebak", dalam

http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2006/08/23/brk_20060823-82394.id.html.

"Kekerasan terhadap perempuan di Afrika: Dari diskriminasi ke impunitas",

dalam <http://pambazuka.org/en/category/wgender/49903>.

"Kembalinya Obote dengan Pemilu", dalam

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/1980/12/27/LN/mbm.19801227.LN53080.id.html>

- "KTT Krisis Kongo Berakhir Tanpa Solusi Berarti"*,
<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3773308,00.html>.
- "Laurent Kabila dikabarkan Tewas"*, dalam
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/29/JATIM/284610.htm>.
- "Mahkamah PBB: Uganda Langgar Kedaulatan Kongo"*,
dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/20/int3.htm>.
- "The Lord Resistant Army"*,
dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/lra.htm>.
- "Oktober 1965: Ramai-ramai Menggadai Kedaulatan Politik Luar Negeri"* –
Category : Politik, dalam <http://www.geopolitik.org>.
- Pembantaian Etnis*, dalam
<http://www2.kompas.com/kompascetak/0407/06/In/1130019.htm>.
- "Pasukan Uganda Secara Ilegal Menyalurkan Senjata Kepada Pemberontak"*,
dalam [Http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/HR05_ham.html](http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/HR05_ham.html).
- "Pasukan Uganda Secara Ilegal Menyalurkan Senjata Kepada Pemberontak"*,
dalam [Http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/HR05_ham.html](http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/HR05_ham.html)
- "Pengungsi Kongo Jadi Ancaman Keamanan Bagi Uganda Barat"*,
dalam <http://www.hupelita.com/cetakartikel.php>.
- "Peta Ekspor Impor Uganda"*,
dalam www.fao.org/DOCREP/005/Y4632E/y4632e0t.jpg
- "Peta Ethnographic Uganda"*,
dalam <http://www.e-r.org/our-work/accord/northern-uganda/images/uganda-political-map.jpg>
- "Peta Wlayah Penduduk Uganda"*, dalam
<http://www.fokh.org.uk/images/population.gif>.
- "Personel PBB Diduga Eksploitasi Perempuan Kongo"*,
dalam <http://memobisnis.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/17/brk,20060817-82130,id.html>.
- "Perjanjian Damai Kongo Terancam Gagal"*,
dalam <http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/11/14/Internasional/krn.20081114.147984.id.html>.

- "Pasukan Uganda Secara Ilegal Menyalurkan Senjata Kepada Pemberontak"*,
dalam http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/HR05_ham.html
- "Pemimpin Milisi Kongo Menghadap ICC; Kasus JeanPierreBemba"*, dalam
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/hukum/milisi_kongo_icc080704.
- "Population of Uganda"*, <http://www.fokh.org.uk/images/population.gif>
- "Situasi Kongo Masih Tegang"*, dalam
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/24/ln/2901599.htm> .
- "Shock Therapy for Northern Uganda's Peace Process"*,
dalam <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3366&l=5>.
- "The Congo : Solving The FDLR Program Once and All"*, dalam
<http://www.Crisisgroup.org/home/index>.
- "The 2002 Uganda Population and Housing Census"*, dalam
<http://www.ubos.org/census%20tabulation?centableB1.pdf>.
- The Economist, The Washington Post, BBC,*
dalam <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/06/02/LN/mbm.20030602.LN88103.id.html>.
- "Tewasnya Laurent Kabila"*, dalam <http://liputan6.com/luarnegeri>.
- "Uganda's Illegal Resource Exploitation In The Democratic Republic of The Congo (Part of UN Report)"*, dalam
http://www.afrol.com/countries/DRC/documents/un_resources_2002_uganda.htm.
- World Atlas*, dalam
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/africaa.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Ddata%2Bstatistik%2Bkekerasan%2BUganda%2Bdi%2BKongo%26sl%3Did%26tl%3Den&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhbcOcTfII0fUGJnliL9XNPROnRNQ
- "15 Presiden Afrika Janjikan Perdamaian"*,
dalam <http://www.gatra.com/2004-12-19/artikel.php?id=49268>.
- , <http://www.diaryof1.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/massacredrc.jpg>

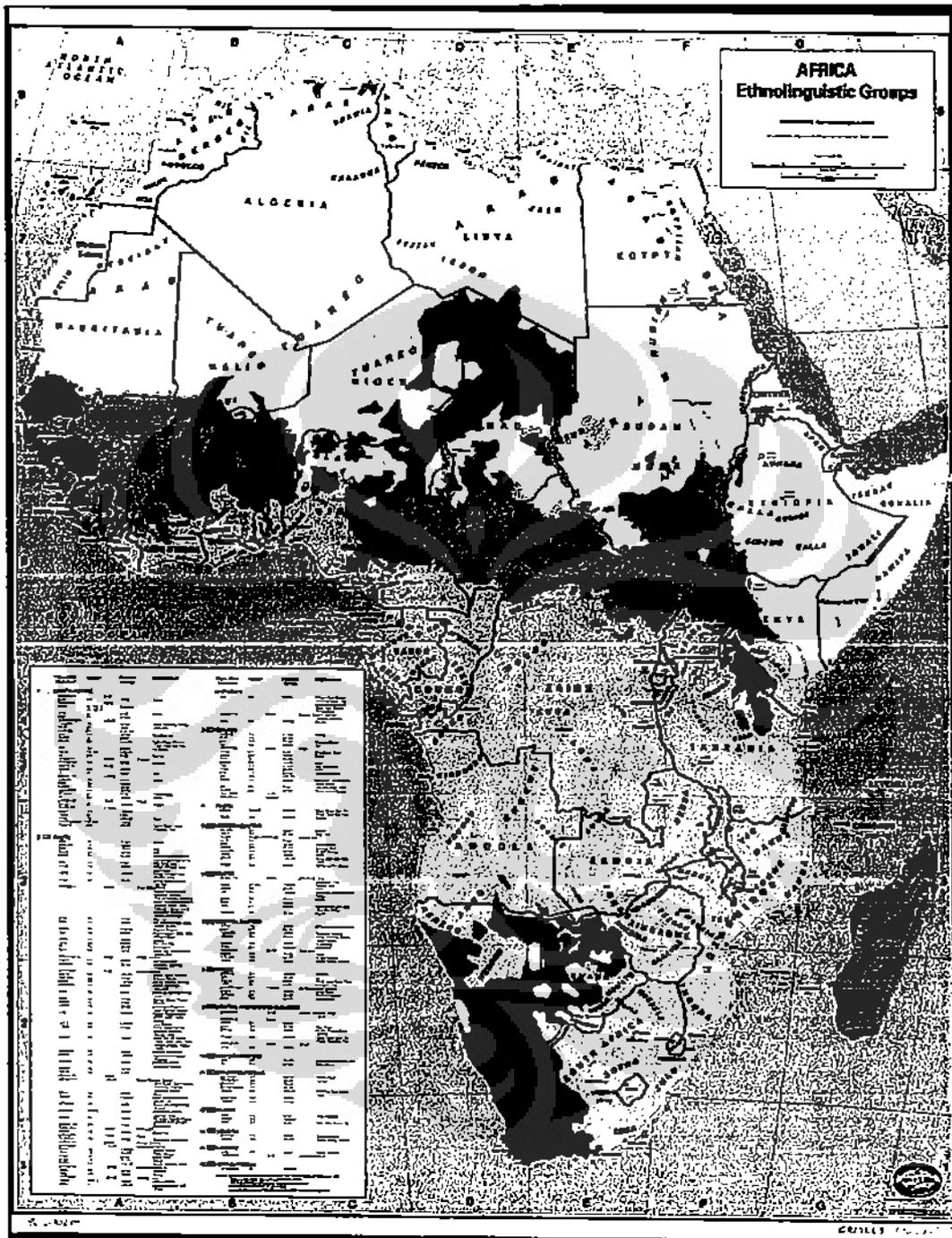
LAMPIRAN GAMBAR

1. **Gambar I, Pasukan LRA (*Lord Resistant Army*) di Uganda.**

Pasukan militer Uganda tidak mampu melindungi rakyat Uganda dari LRA.



2. Gambar II, Peta Etnis di Afrika¹



¹ "Peta Etnis di Afrika". http://thumb/4/49/Africa_ethnic_groups_1996.jpg/800px-Africa_ethnic_groups_1996.jpg. Tanggal akses :15 Mei 2009.